



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
TAHUN 2017**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TAHUN 2017.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	3
1. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	3
2. Standar Pemeriksaan.....	3
3. Tujuan Pemeriksaan.....	3
4. Entitas yang Diperiksa.....	3
5. Lingkup Pemeriksaan.....	3
6. Sasaran Pemeriksaan.....	3
7. Metodologi Pemeriksaan.....	4
8. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	5
9. Batasan Pemeriksaan.....	5

SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2017 terdiri dari tiga bagian sebagai berikut:

1. Buku 1 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2017.

Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2017; (b) Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2017; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan.

2. Buku 2 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2017.

Laporan II berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Hasil pemeriksaan atas SPI Tahun 2017; dan (c) Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Temuan SPI Tahun 2006 – 2017.

3. Buku 3 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2017.

Laporan III berisi : (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017; dan (c) Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2006-2017.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

BP Batam bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan BP Batam untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern BP Batam. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh BP Batam, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

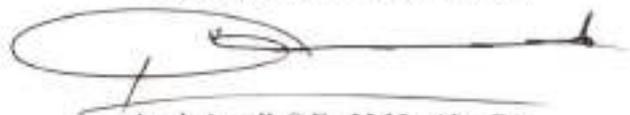
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BP Batam tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19.B/LHP/XVIII/05/2018 dan Nomor 19.C/LHP/XVIII/05/2018, masing-masing tertanggal 02 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 2 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA.
Register Negara Akuntan, RNA 9332

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BP Batam berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2017 bertujuan untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian Laporan Keuangan BP Batam yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

BP Batam, satker-satker dan Unit Pengelola Teknis yang berada di lingkungan BP Batam.

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2017 yaitu Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi BP Batam Tahun 2017 meliputi pengujian atas:

- a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern (SPI) termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
- b. Penyajian saldo akun-akun pada neraca dan realisasi belanja dan pendapatan pada LRA, serta akun-akun pada LPSAL, LO, LAK, dan LPE;

- c. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
- d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LK BP Batam Tahun 2017 dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Risiko

Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap LK BP Batam Tahun 2017 menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas SPI penyusunan Laporan Keuangan.

Hasil pemahaman dan pengujian tersebut akan menentukan tingkat keandalan asersi manajemen dan ketentuan yang berlaku. Penetapan risiko pemeriksaan (*audit risk*) simultan dengan tingkat keandalan pengendalian (risiko pengendalian) serta tingkat bawaan (*inherent risk*) LK BP Batam yang diperiksa digunakan sebagai acuan dalam menentukan risiko deteksi (*detection risk*) dan jumlah pengujian yang dilakukan serta menentukan fokus pemeriksaan.

b. Materialitas

Tingkat materialitas awal (*Planning Materiality*)/ PM yang merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan ditetapkan dari total realisasi pendapatan per 31 Desember 2017. Untuk tingkat akun, ditetapkan salah saji yang dapat ditoleransi (*Tolerable Misstatement/TM*) dengan cara mengalokasikan nilai materialitas awal ke akun-akun berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko masing-masing akun.

c. Uji Petik Pemeriksaan (*sampling audit*)

Pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan diperoleh berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasi. Dalam pemeriksaan, pemeriksa menggunakan metode *non statistical sampling* dengan memperhatikan kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah atau jenis transaksinya. Penetapan sampel juga menggunakan *judgement* baik berdasarkan pemahaman atas proses bisnis entitas, hasil reвью SPI maupun hasil *analytical review*.

d. Pelaporan

Tim Pemeriksa menyusun konsep Temuan Pemeriksaan (TP) apabila menemukan permasalahan yang perlu dikomunikasikan kepada BP Batam. Permasalahan tersebut meliputi (1) Ketidakefektifan sistem pengendalian intern, (2) Penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan, dan (4) Ikhtisar koreksi.

Konsep TP disampaikan Ketua Tim kepada pejabat BP Batam untuk mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi. Setelah disampaikan kemudian dilaksanakan pembahasan tim pemeriksa dengan pejabat BP Batam. Penolakan

atas ikhtisar koreksi, temuan SPI dan ketidakpatuhan akan berpengaruh terhadap opini.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan selama 55 hari terhitung mulai tanggal 29 Januari s.d. 25 Februari, tanggal 11 s.d 24 Maret dan tanggal 2 s.d 19 April 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor 08/ST/VII-XVIII/01/2017 tanggal 6 Januari 2017.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab manajemen BP Batam. Data yang disampaikan kepada BPK digunakan sebagai dasar pemeriksaan untuk kepentingan pembuatan laporan ini. Sepanjang pemeriksaan, BPK beranggapan bahwa BP Batam telah menyediakan data dan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan informasi yang material untuk pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak benar dan diberikan baik yang disengaja maupun tidak oleh BP Batam.

Pemeriksaan atas LK BP Batam Tahun 2017 tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, BPK akan mengungkapkannya. Pemeriksaan ini meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan.

BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh BP Batam. Namun, pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa setiap tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

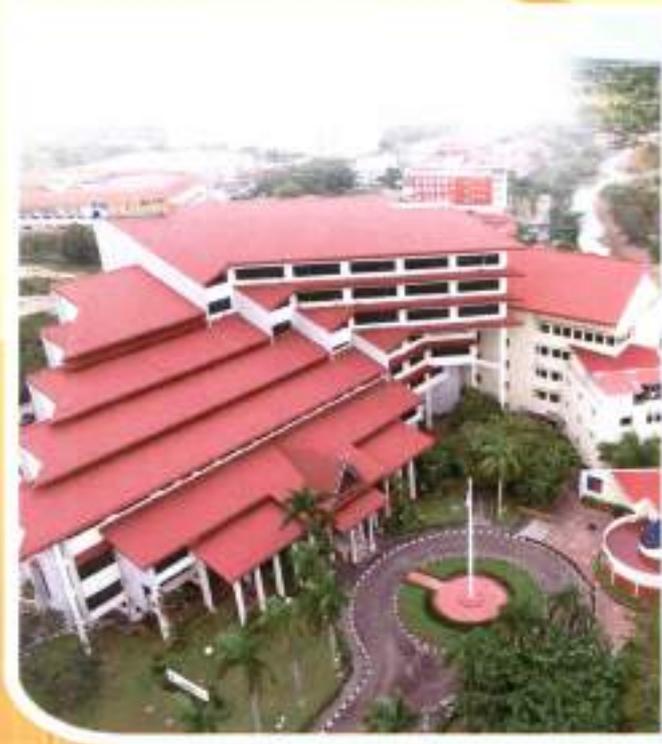
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017



**BAGIAN ANGGARAN 112
(AUDITED)**

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)



KATA PENGANTAR



STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Mengacu pada ketentuan tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan PSAP 13 serta kaidah-kaidah yang terkait pengelolaan keuangan negara. Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp974.816.489.783,00** atau **84,17%** dari yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2017 sebesar **Rp1.158.197.829.000,00** (setelah revisi). Realisasi Penerimaan Negara Bukan pajak tersebut merupakan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp644.796.000,00, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp78.848.039,00, dan Pendapatan Pengelolaan Kawasan otorita sebesar Rp974.092.845.744,00.



Realisasi Belanja Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp1.533.494.094.476,00** atau **74.04%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.071.102.764.000,00 (setelah revisi). Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp978.777.202.300,00 atau 83,22% dari anggaran sebesar Rp1.176.086.470.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp554.716.892.176,00 atau sebesar 61.98% dari pagu anggaran sebesar Rp895.016.294.000,00 (termasuk di dalamnya Belanja Modal atas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp111.174.565.692,00 atau sebesar Rp38.84% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp286.240.000.000,00).

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun 2017. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2016 adalah sebesar **Rp622.848.698.190,00**, penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar Rp558.677.604.693,00, penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp378.447.992.422,00 terdiri dari pendapatan dari APBN sebesar Rp379.171.636.461,00, penyetoran PNBPN ke Kas Negara sebesar Rp723.644.039,00. sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp180.229.612.271,00** yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih Akhir sehingga menyajikan saldo anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp442.619.085.919,00**.
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang berakhir Per 31 Desember 2017. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Badan Pengusahaan Batam adalah sebesar **Rp28.249.175.434.166,00** dan Kewajiban sebesar **Rp1.297.667.507.378,00** sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) Per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp26.951.507.926.788,00**.
5. Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan, beban, surplus/(defisit) dari operasional dan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa dan surplus/(defisit) tahun berjalan. Pendapatan Operasional Badan Pengusahaan Batam untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp957.631.494.983,00** sedangkan beban operasional adalah sebesar **Rp1.217.520.453.834,00** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp259.888.958.851,00**. Selain itu jumlah surplus dari kegiatan non



operasional adalah sebesar **Rp8.712.633.376,00**. Dengan demikian total defisit-LO periode berjalan sebesar **Rp251.176.325.475,00**.

6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2017 adalah sebesar **Rp26.724.968.288.234,00** sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp251.176.325.475,00**. Disisi lain, terdapat koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar **Rp95.970.309.107,00** yang terdiri dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp150.863.528.172,00, dikurang Koreksi Lain-lain sebesar Rp54.893.219.065,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp381.745.654.922,00. Dengan demikian Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai **Rp26.951.507.926.788,00**.
7. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017. Saldo awal Kas dan setara Kas sebesar Rp709.062.255.915,00 (Saldo Kas Awal BLU sebesar Rp622.848.698.190,00 dan Kas Lainnya Setara Kas sebesar Rp86.213.557.725,00). Selama TA 2017 terjadi Koreksi Saldo awal Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp86.213.557.725,00 yang merupakan koreksi reklasifikasi akun Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan ke Kas Lainnya BLU, Kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp373.842.483.905,00, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp554.072.096.176,00 dan kenaikan dari aktivitas transitoris sebesar Rp34.835.959.126,00, Sehingga penurunan kas total adalah sebesar Rp145.393.653.145,00. Saldo Akhir Kas dan Setara Kas sebesar Rp563.668.602.770,00 (Saldo Akhir Kas BLU sebesar Rp442.619.085.919,00 dan Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara kas Rp121.049.516.851,00).
8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.



Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas Badan Pengusahaan Batam.

Batam, 23 April 2018
Kepala,

Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP.1961092519880111001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	v
Daftar Lampiran	ix
Pernyataan Tanggung Jawab.....	xi
Pernyataan Telah Direviu.....	xii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realiasi Anggaran	5
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	6
III. Neraca	7
IV. Laporan Operasional.....	8
V. Laporan Perubahan Ekuitas	9
VI. Laporan Arus Kas.....	10
VII. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum.....	11
A.1 Dasar Hukum.....	11
A.2 Kebijakan Teknis	12
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.4 Basis Akuntansi	16
A.5 Dasar Pengukuran.....	16
A.6 Kebijakan Akuntansi	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	30
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah	30
B.2 Belanja Negara	37
B.2.1 Belanja Barang	40
B.2.2 Belanja Modal	43
C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	48
C.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	48
C.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	48
C.3 Penyesuaian SiLPA/SiKPA	49
C.3.1 Pendapatan dari APBN.....	49
C.3.2 Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	50



DAFTAR ISI

	Halaman
C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	50
C.5 Penyesuaian Lain-Lain.....	50
C.6 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir.....	51
D. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	52
D.1 Aset Lancar	52
D.1.1 Kas dan bank.....	52
D.1.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas.....	55
D.1.1.2 Kas pada Badan Layanan Umum.....	62
D.1.2 Belanja di Bayar Dimuka	63
D.1.3 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	63
D.1.4 Piutang Bukan Pajak.....	65
D.1.5 Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum.....	66
D.1.6 Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional	79
D.1.7 Persediaan	79
D.2 Aset Tetap.....	91
D.2.1 Tanah	92
D.2.2 Peralatan dan Mesin	93
D.2.3 Gedung dan Bangunan.....	95
D.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	99
D.2.5 Aset Tetap Lainnya.....	102
D.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	103
D.3 Aset Lainnya	104
D.3.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.....	105
D.3.1.1 Kantor Pelabuhan Laut.....	109
D.3.1.2 Kantor Air dan Limbah	109
D.3.2 Aset Tak Berwujud.....	106
D.3.2.1 <i>Software</i>	107
D.3.2.2 Lisensi.....	108
D.3.2.3 Hasil Kajian/Penelitian.....	108
D.3.2.4 Hak Pengelolaan lahan	109



DAFTAR ISI

	Halaman
D.3.2.5 Aset Tidak Berwujud Lainnya.....	113
D.3.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	114
D.3.4 Aset Lain-lain.....	115
D.3.4.1 Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan.....	115
D.3.4.2 Piutang Tidak Lancar	117
D.3.4.3 Panjar Tidak Lancar	120
D.3.4.4 Piutang Pegawai Tidak Lancar	121
D.3.4.4 Piutang TGR.....	121
D.3.5 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-lain.....	121
D.4 Kewajiban	122
D.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga BLU.....	122
D.4.1.1 Utang Usaha	123
D.4.1.2 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	125
D.4.1.3 Titipan Pihak Ketiga	126
D.4.1.4 Dana Pihak Ketiga.....	131
D.4.1.5 Utang Lancar Uang Penghargaan Pengabdian (UPP)	132
D.4.2 Pendapatan Yang Diterima Dimuka.....	133
D.4.3 Utang Jangka Pendek Lainnya	135
D.5 Ekuitas.....	135
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	136
E.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	136
E.1.1. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	137
E.1.2. Pendapatan Usaha Lainnya.....	144
E.1.3. Retur Pendapatan & Keuntungan Lainnya	152
E.1.4. Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha- Barang /Jasa.....	153
E.2 Beban Pegawai.....	153
E.3 Beban Persediaan	155
E.4 Beban Barang dan Jasa	155
E.5 Beban Pemeliharaan.....	156
E.6 Beban Perjalanan Dinas	157
E.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	158



DAFTAR ISI

	Halaman
E.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	159
E.9 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	159
E.10 Beban Pelepasan Aset Non Lancar	159
E.11 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	160
E.12 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	160
F. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	162
F.1 Ekuitas Awal.....	162
F.2 Surplus (Defisit) LO	162
F.3 Koreksi Nilai asset Non Revaluasi.....	162
F.4 Koreksi Lain-lain	162
F.5 Transaksi Antar Entitas.....	163
F.6 Ekuitas Akhir.....	164
G. Pengungkapan Penting Lainnya	166
G.1 Ikatan dan Kontijensi	166
G.2 Pengungkapan Lain-Lain.....	180



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1a : Daftar Rincian Kas
- Lampiran 1b : Daftar Rincian Saldo Bank Giro Rupiah, Rekening Bersama dan Hasil Rekonsiliasi
- Lampiran 1c : Daftar Rincian Saldo Bank Giro Valas dan Rekening Bersama Valas
- Lampiran 1d : Daftar Rincian Surat Berharga
- Lampiran 2a : Daftar Rincian Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP)
- Lampiran 2b : Daftar Rincian Titipan Dana Rusun
- Lampiran 2c : Daftar Rincian Deposit/Simpanan Pelanggan RSBP
- Lampiran 2d : Daftar Rincian Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya RSBP
- Lampiran 3 : Daftar Piutang Usaha Kantor Pengelolaan Lahan
- Lampiran 4 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Pemanfaatan Aset
- Lampiran 5 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana
- Lampiran 6 : Daftar Piutang Usaha Kantor Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi
- Lampiran 7 : Daftar Piutang Usaha Kantor Air dan Pengelolaan Limbah
- Lampiran 8 : Daftar Piutang Usaha BUBU Hang Nadim
- Lampiran 9 : Daftar Piutang Usaha Kantor Pelabuhan Laut
- Lampiran 10 : Daftar Piutang Usaha RSBP
- Lampiran 11 : Daftar Rincian Persediaan
- Lampiran 12 : Daftar Rincian Aset Tetap Tanah
- Lampiran 13 : Daftar Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Lampiran 14 : Daftar Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 15 : Daftar Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Lampiran 16 : Daftar Rincian Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 17 : Daftar Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 18 : Daftar Rincian Aset Tak Berwujud
- Lampiran 19 : Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan
- Lampiran 20 : Daftar Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan
- Lampiran 21 : Kronologis Terbentuknya Piutang Usaha Biro Keuangan (Royalti Pasir)
- Lampiran 22 : Daftar Piutang Tidak Lancar Kantor Air dan Limbah
- Lampiran 23 : Daftar Piutang Tidak Lancar Kantor Pelabuhan Laut
- Lampiran 24 : Daftar Rincian Panjar Tidak Lancar
- Lampiran 25 : Daftar Piutang Pegawai Tidak Lancar
- Lampiran 26a : Daftar Utang Usaha Kantor Pelabuhan Laut
- Lampiran 26b : Daftar Utang Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam
- Lampiran 27 : Daftar Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) dan Garansi Bank



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 28 : Daftar Titipan Uang Muka UWTO
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Jaminan lainnya
- Lampiran 30 : Daftar Titipan Pihak Ketiga pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
- Lampiran 31 : Daftar Titipan Pihak Ketiga BUBU Hang Nadim
- Lampiran 32 : Daftar Titipan Dana Pihak Ketiga Kantor Pelabuhan Laut
- Lampiran 33 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Lainnya RSBP
- Lampiran 34 : Daftar Penerimaan Sementara RSBP
- Lampiran 35 : Daftar Pendapatan Diterima Dimuka
- Lampiran 36 : Rincian Pendapatan Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain (KSO)
- Lampiran 37 : Rincian Pendapatan Sewa



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.1, BATAM CENTRE PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN**

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 23 April 2018

Kepala

Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP.1961092519880111001



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2017 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akuntansi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan PSAP 13 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Batam, April 2018
Kepala
Satuan Pemeriksa Internal

Agung Prasetya Adi
NIP.196002201982031002



Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp974.816.489.783,00** atau **84,17%** dari yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2017 sebesar **Rp1.158.197.829.000,00** (setelah revisi). Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut merupakan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp644.796.000,00, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp78.848.039,00, dan Pendapatan Pengelolaan Kawasan otorita sebesar Rp974.092.845.744,00.

Realisasi Belanja Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp1.533.494.094.476,00** atau **74,04%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.071.102.764.000,00 (setelah revisi). Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp978.777.202.300,00 atau 83,22% dari anggaran sebesar Rp1.176.086.470.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp554.716.892.176,00 atau sebesar 61,98% dari pagu anggaran sebesar



Rp895.016.294.000,00 (termasuk di dalamnya Belanja Modal atas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp111.174.565.692,00 atau sebesar Rp38.84% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp286.240.000.000,00).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 (Audited)		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.158.197.829.000,00	974.816.489.783,00	84,17
Belanja Negara	2.071.102.764.000,00	1.533.494.094.476,00	74,04
1 Belanja Barang PNBPN & RM	1.176.086.470.000,00	978.777.202.300,00	83,22
2 Belanja Modal PNBPN & RM	608.776.294.000,00	443.542.326.484,00	72,86
3 Belanja Modal PHLN	286.240.000.000,00	111.174.565.692,00	38,84

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2017 adalah sebesar **Rp622.848.698.190,00**, penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar minus **Rp558.677.604.693,00**, penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp378.447.992.422,00** terdiri dari pendapatan dari APBN sebesar Rp379.171.636.461,00, penyetoran PNBPN ke Kas Negara sebesar Rp723.644.039,00, sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp180.229.612.271,00** yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih Akhir sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp442.619.085.919,00**.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2017. Jumlah Aset adalah sebesar **Rp28.249.175.434.166,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp897.489.818.127,00, Aset Tetap sebesar Rp27.135.939.495.375,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp215.746.120.664,00.



Jumlah Kewajiban adalah sebesar **Rp1.297.667.507.378,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.297.667.507.378,00 dan Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00, dan jumlah Ekuitas sebesar **Rp26.951.507.926.789,00**.

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	Jumlah	%
Asset				
Aset Lancar	897.489.818.127,00	1.077.211.736.884,00	(179.721.918.757,00)	(16,68)
Aset Tetap	27.135.939.495.375,00	26.871.330.169.176,00	264.609.326.199,00	0,98
Aset Lainnya	215.746.120.664,00	137.407.679.240,00	78.338.441.424,00	57,01
JUMLAH ASET	28.249.175.434.166,00	28.085.949.585.300,00	163.225.848.866,00	0,58
Kewajiban				
Kewajiban jangka pendek	1.297.667.507.378,00	1.360.981.297.066,00	(63.313.789.688,00)	(4,65)
JUMLAH KEWAIBAN	1.297.667.507.378,00	1.360.981.297.066,00	(63.313.789.688,00)	(4,65)
Ekuitas				
Ekuitas	26.951.507.926.788,00	26.724.968.288.234,00	226.539.638.554,00	0,85
JUMLAH EKUITAS	26.951.507.926.788,00	26.724.968.288.234,00	226.539.638.554,00	0,85
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	28.249.175.434.166,00	28.085.949.585.300,00	163.225.848.866,00	0,58

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan, beban, surplus/(defisit) dari operasional dan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa dan surplus/(defisit) tahun berjalan. Pendapatan Operasional Badan Pengusahaan Batam untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp957.631.494.983,00** sedangkan beban operasional adalah sebesar **Rp1.217.520.453.834,00**, sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp259.888.958.851,00**, selain itu jumlah surplus dari kegiatan non operasional adalah sebesar **Rp8.712.633.376,00**. Dengan demikian total defisit-LO periode berjalan sebesar **Rp251.176.325.475,00**.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2017 adalah sebesar **Rp26.724.968.288.234,00**



sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp251.176.325.475,00**. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar **Rp95.970.309.107,00** yang terdiri dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp150.863.528.171,00, dikurangi Koreksi Lain-lain sebesar Rp54.893.219.065,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp381.745.654.922,00. Dengan demikian Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai **Rp26.951.507.926.788,00**.

6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017. Saldo awal Kas dan setara Kas sebesar Rp709.062.255.915,00 (Saldo Kas Awal BLU sebesar Rp622.848.698.190,00 dan Kas Lainnya Setara Kas sebesar Rp86.213.557.725,00). Selama TA 2017 terjadi Koreksi Saldo awal Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp86.213.557.725,00 yang merupakan koreksi reklasifikasi akun Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan ke Kas Lainnya BLU, Kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp373.842.483.905,00, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp554.072.096.176,00 dan kenaikan dari aktivitas transitoris sebesar Rp34.835.959.126,00. Sehingga penurunan kas total adalah sebesar Rp145.393.653.145,00, sehingga Saldo Akhir Kas dan Setara Kas sebesar Rp563.668.602.770,00 (Saldo Akhir Kas BLU sebesar Rp442.619.085.919,00 dan Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara kas Rp121.049.516.851,00).

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 (Audited)			Tahun 2016 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	B.1	1.158.197.829.000,00	974.816.489.783,00	84,17	952.433.330.107,00
JUMLAH PENERIMAAN		1.158.197.829.000,00	974.816.489.783,00	84,17	952.433.330.107,00
BELANJA					
1. Belanja Barang	B.2.1	1.176.086.470.000,00	978.777.202.300,00	83,22	1.046.448.031.119,00
2. Belanja Modal	B.2.2	608.776.294.000,00	443.542.326.484,00	72,86	370.741.429.729,00
3. Belanja Modal PHLN		286.240.000.000,00	111.174.565.692,00	38,84	-
JUMLAH BELANJA		2.071.102.764.000,00	1.533.494.094.476,00	74,04	1.417.189.460.848,00

-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-

Batam, 23 April 2018

Kepala

Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP.1961092519880111001



II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
1.	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	C.1	622.848.698.190,00	1.005.692.955.864,00
2.	Penggunaan SAL		0,00	0,00
3.	Subtotal (1-2)		622.848.698.190,00	1.005.692.955.864,00
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (6-10)	C.2	(558.677.604.693,00)	(464.746.130.741,00)
5.	Penyesuaian SILPA/SIKPA	C.3	0,00	0,00
6.	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	C.3.1	378.447.992.422,00	91.719.340.336,00
7.	a. Pendapatan dari APBN	C.3.1.1	379.171.636.461,00	104.700.600.790,00
8.	b. Penyetoran PNBP ke Kas Negara	C.3.2.1	(723.644.039,00)	(12.981.260.454,00)
9.	SILPA/SIKPA setelah penyesuaian (4+6)		(180.229.612.271,00)	(373.026.790.405,00)
10.	Subtotal (3-10)		442.619.085.919,00	632.666.165.459,00
11.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C.4	0,00	(9.867.467.269,00)
12.	Penyesuaian Lain-Lain	C.5	0,00	50.000.000,00
13.	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (11+12+13)	C.6	442.619.085.919,00	622.848.698.190,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, 23 April 2018
Kepala

Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP.1961092519880111001



III. NERACA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
ASET			
Aset Lancar	D.1		
Kas dan Bank	D.1.1	563.668.602.770,00	709.062.255.915,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.1.1.1	121.049.516.851,00	86.213.557.725,00
Kas pada Badan Layanan Umum	D.1.1.2	442.619.085.919,00	622.848.698.190,00
Belanja Dibayar Dimuka	D.1.2	0,00	898.858.750,00
Pendapatan yang Masih Harus diterima	D.1.3	28.046.814.084,00	37.043.398.377,00
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	D.1.4	2.031.729.289,00	5.468.098.090,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D.1.5	368.498.898.367,00	369.477.744.235,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D.1.6	(81.016.571.919,00)	(58.351.710.349,00)
Piutang dari kegiatan Oprsnl BLU (Netto)		287.482.326.448,00	311.126.033.886,00
Persediaan	D.1.7	16.260.345.536,00	13.613.091.866,00
Jumlah Aset Lancar		897.489.818.127,00	1.077.211.736.884,00
Aset Tetap	D.2		
Tanah	D.2.1	21.830.341.424.135,00	21.691.054.309.935,00
Peralatan dan Mesin	D.2.2	1.063.527.969.569,00	904.983.356.437,00
Gedung dan Bangunan	D.2.3	1.062.442.964.853,00	897.784.488.377,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	D.2.4	7.405.404.216.665,00	7.566.635.441.272,00
Aset Tetap Lainnya	D.2.5	14.901.552.509,00	14.848.929.309,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan	D.2.6	426.717.114.669,00	179.767.524.217,00
Akumulasi Penyusutan	D.2.7	(4.667.395.747.025,00)	(4.383.743.880.371,00)
Jumlah Aset Tetap		27.135.939.495.375,00	26.871.330.169.176,00
Aset Lainnya	D.3		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.3.1	167.065.369.296,00	178.751.471.233,00
Aset Tak Berwujud	D.3.2	66.148.324.196,00	57.097.001.849,00
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	D.3.3	3.302.885.193,00	3.302.885.193,00
Aset Lain-Lain	D.3.4	200.659.098.517,00	39.345.970.649,00
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	D.3.5	(221.429.556.538,00)	(141.089.649.684,00)
Jumlah Aset Lainnya		215.746.120.664,00	137.407.679.240,00
JUMLAH ASET		28.249.175.434.166,00	28.085.949.585.300,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kewajiban Jangka Pendek	D.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.4.1	127.672.110.075,00	264.122.791.968,00
Pendapatan Diterima Dimuka	D.4.2	1.169.990.012.803,00	1.096.852.680.598,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.4.3	5.384.500,00	5.824.500,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.297.667.507.378,00	1.360.981.297.066,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.297.667.507.378,00	1.360.981.297.066,00
EKUITAS			
Ekuitas	D.5	26.951.507.926.788,00	26.724.968.288.234,00
JUMLAH EKUITAS		26.951.507.926.788,00	26.724.968.288.234,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		28.249.175.434.166,00	28.085.949.585.300,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, 23 April 2018
Kepala

Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP.196109251988011101



IV. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.1	957.631.494.983,00	771.995.101.348,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		957.631.494.983,00	771.995.101.348,00
BEBAN			
Beban Pegawai	E.2	476.796.148.499,00	465.070.008.982,00
Beban Persediaan	E.3	114.751.847.656,00	57.789.873.271,00
Beban Barang dan Jasa	E.4	144.354.513.156,00	175.985.870.310,00
Beban Pemeliharaan	E.5	60.765.719.861,00	74.837.254.600,00
Beban Perjalanan Dinas	E.6	19.156.966.035,00	21.523.793.846,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.7	365.893.968.847,00	349.845.160.301,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.8	35.801.289.780,00	18.022.219.040,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1.217.520.453.834,00	1.163.074.180.350,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(259.888.958.851,00)	(391.079.079.002,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.9	1.333.536.000,00	552.395.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.10	(2.970.989.477,00)	(3.676.799.885,00)
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(1.637.453.477,00)	(3.124.404.885,00)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.11	19.529.568.160,00	13.577.812.646,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.12	(9.179.481.307,00)	(18.819.899.425,00)
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		10.350.086.853,00	(5.242.086.779,00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		8.712.633.376,00	(8.366.491.664,00)
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(251.176.325.475,00)	(399.445.570.666,00)

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, 23 April 2018
Kepala

Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP.196109251988011101



V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
EKUITAS AWAL	F.1	26.724.968.288.234,00	27.081.463.631.900,00
SURPLUS/(DEFISIT) LO	F.2	(251.176.325.475,00)	(399.445.570.666,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		95.970.309.107,00	(48.760.514.502,00)
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi aset tetap		0,00	0,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	F.3	150.863.528.172,00	30.634.142.929,00
Koreksi Lain-Lain	F.4	(54.893.219.065,00)	(79.394.657.431,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	F.5	381.745.654.922,00	91.710.741.502,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		226.539.638.554,00	(356.495.343.666,00)
EKUITAS AKHIR	F.6	26.951.507.926.788,00	26.724.968.288.234,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, 23 April 2018
Kepala

Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP.196109251988011101



VI. LAPORAN ARUS KAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN	379.171.636.461,00	104.700.600.790,00
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	974.092.845.745,00	811.690.581.428,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	0,00	65.351.697.484,00
Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	62.419.790.741,00
Pendapatan PNBPN Umum	78.848.039,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.353.343.330.245,00	1.044.162.670.443,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	645.368.681.624,00	721.940.548.284,00
Pembayaran Barang	85.678.973.835,00	89.051.464.282,00
Pembayaran Jasa	163.925.200.376,00	145.039.888.643,00
Pembayaran Pemeliharaan	64.444.476.388,00	68.206.296.834,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	19.135.776.783,00	21.520.563.846,00
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	224.093.295,00	0,00
Pembayaran Lainnya	0,00	689.269.230,00
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	723.644.039,00	0,00
Jumlah Arus Keluar	979.500.846.340,00	1.046.448.031.119,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	373.842.483.905,00	(2.285.360.676,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar Masuk		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	644.796.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar	644.796.000,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	1.004.501.669,00	1.408.816.892,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	122.449.427.729,00	102.701.683.707,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	140.197.875.702,00	150.015.898.329,00
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	281.072.981.831,00	103.032.016.701,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	9.992.105.245,00	13.583.014.100,00
Jumlah Arus Keluar	554.716.892.176,00	370.741.429.729,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(554.072.096.176,00)	(370.741.429.729,00)
Arus kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	74.791.210.272,00	50.773.830.819,00
Jumlah Arus Kas Masuk	74.791.210.272,00	50.773.830.819,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	39.955.251.146,00	31.071.419.478,00
Jumlah Arus Keluar	39.955.251.146,00	31.071.419.478,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	34.835.959.126,00	19.702.411.341,00
Kenaikan /P enurunan Kas	(145.393.653.145,00)	(353.324.379.064,00)
Saldo Awal Kas		
Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :		
Saldo Awal Kas BLU	622.848.698.190,00	1.005.692.955.864,00
Koreksi Saldo Awal Kas	0,00	(9.817.467.269,00)
Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	56.804.436.634,00
Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	86.213.557.725,00	9.706.709.750,00
Saldo Akhir Kas (Q=M+N+O+P)	563.668.602.770,00	709.062.255.915,00
Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :		
Saldo Akhir Kas BLU	442.619.085.919,00	622.848.698.190,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	121.049.516.851,00	86.213.557.725,00

Batam, 23 April 2018

Kepala

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP.196109251988011101

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Umum

A. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam BA.112 Per 31 Desember 2017 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Batam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

*Rencana
Strategis*

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

A.2.1. Dasar Hukum

Badan Pengusahaan Batam didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Pada tahun 2011 dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 dimana wilayah kerja tersebut ditambah dengan Pulau Janda berhias dan gugusannya. Kegiatan utama pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor **perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata**. Pada ketentuan dimaksud ditetapkan juga bahwa hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Batam. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang revisi PP 46 Tahun 2007 maka Wilayah Kerja dan kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam** atau disingkat dengan **Badan Pengusahaan Batam**.

Badan Pengusahaan Batam mempunyai visi "**Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara**". Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengusahaan Batam menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional;
2. Memantapkan Pengelolaan Kawasan Investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

A.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam

Pada Tahun 2016 terjadi penggantian pimpinan Badan Pengusahaan Batam yaitu sesuai Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 43 Tahun 2016 Tentang pemberhentian, dan Penetapan, dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Personil Pimpinan BP Batam tersebut diatas telah dilakukan pelantikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian pada tanggal 5 April 2016. Sehingga personil pimpinan Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

1.	Kepala	:	Hatanto Reksodipoetro
2.	Wakil Kepala	:	Agus Tjahajana Wirakusumah
3.	Anggota 1/Deputi BidangAdministrasi dan Umum	:	Sigit Priadi Pramudito
4.	Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan	:	Junino Jahja
5.	Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha	:	Eko Santoso Budianto
6.	Anggota 4/Deputi Bidang PengusahaanSaranaLainnya	:	Purba Robert M. Sianipar
7.	Anggota 5/Deputi BidangPelayanan Umum	:	Gusmardi Bustami

Pada Tahun 2017, tepatnya tanggal 19 Oktober 2017 terjadi penggantian pimpinan Badan Pengusahaan Batam yaitu sesuai Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 146 Tahun

2017 Tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sehingga personil pimpinan Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

1.	Kepala	:	Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, M.A.
2.	Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum	:	Drs. Purwiyanto, M.A.
3.	Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan	:	Yusmar Anggadinata, S.Si., MBA.
4.	Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha	:	Dwianto Eko Winaryo, S.T, M.T.
5.	Anggota 4/Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya	:	Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto
6.	Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum	:	Irjen Pol Drs. Bambang Purwanto, S.H., M.Si

A.2.3.Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016, ditetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan) yang terdiri dari:

1.	Ketua merangkap Anggota	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
2.	Anggota	:	Menteri Dalam Negeri
3.	Anggota	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.	Anggota	:	Menteri Keuangan
5.	Anggota	:	Menteri Perdagangan
6.	Anggota	:	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
7.	Anggota	:	Panglima Tentara Nasional Indonesia
8.	Anggota	:	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
9.	Anggota	:	Sekretaris Kabinet
10.	Anggota	:	Gubernur Kepulauan Riau
11.	Anggota	:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
12.	Anggota	:	Walikota Batam

A.2.4. Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kemudian terjadi beberapa kali penggantian struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam sampai dengan perubahan terakhir adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kawasan Nomor 21/KA-DK/BTM/XII/2015 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dari Sdr. Drs. Zamhari, M.Ec dan Sdri. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak. MAFIS kepada Sdr. Heru Pambudi dan Sdr. Sofandi Arifin sehingga struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam periode 2015 – 2018 adalah sebagai berikut:

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.	Ketua merangkap Anggota	:	Dr. M. Iman Santoso, SH, MA, MH
2.	Anggota	:	Sofandi Arifin
3.	Anggota	:	Astoerullah Aziz, Msc.MM
4.	Anggota	:	Heru Pambudi
5.	Anggota	:	Ir. Mochamad Prijanto, ME

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Pengusahaan Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.



SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan dan Aset Lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4 BASIS AKUNTANSI

Badan Pengusahaan Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan meliputi Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengusahaan Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh

aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2017 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Badan Pengusahaan Batam yang menambah saldo Kas BLU dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Badan Pengusahaan Batam dan tidak perlu dibayar kembali, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan penggunaan dana APBN yang disetorkan ke Kas Negara.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas BLU Badan Pengusahaan Batam atau disetorkan ke Kas Negara.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



Pendapatan Operasional

(2) Pendapatan Operasional

- Pendapatan Operasional adalah hak Badan Pengusahaan Batam yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan Operasional dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran Kas BLU Badan Pengusahaan Batam yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Pengusahaan Batam.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas BLU Badan Pengusahaan Batam.
- Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi asset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, belanja dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Belanja dibayar dimuka merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas/Bank Badan Pengusahaan Batam tetapi dan belum membebani pagu anggaran.

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima Karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh Badan Pengusahaan Batam maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017 berdasarkan harga perolehan dan/atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan*

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Badan Pengusahaan Batam selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Aset Kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya dan Aset Lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Tidak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Massa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer;	4
<i>Franchise</i> ;	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim;	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan;	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram;	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Hak Pengelolaan memenuhi definisi sebagai aset sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang penyajian Laporan Keuangan dengan klasifikasis sebagai berikut:

- a. Aset Lainnya untuk Hak Pengelolaan yang belum diserahkan kepada/dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- b. Aset Lainnya untuk Hak Pengelolaan yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- c. Aset Tetap untuk Hak Pengelolaan yang dipergunakan sendiri oleh BP Batam.
- d. Dikeluarkan dari Aset Lainnya atas Hak Pengelolaan yang diserahkan ke instansi pemerintah lainnya.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan

ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Badan Pengusahaan Batam yang dihentikan dari penggunaan aktif.

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Badan Pengusahaan Batam. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Badan Pengusahaan Batam. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Badan Pengusahaan Batam pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan Badan Pengusahaan Batam. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam (SAKBA) tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Penyisihan
1	Piutang dengan umur 0 – 6 bulan	0%
2	Piutang dengan umur 6 - 12 bulan	25%
3	Piutang dengan umur 12 – 18 bulan	50%
4	Piutang dengan umur 18 – 24 bulan	75%
5	Piutang dengan umur > 24 bulan	100%

Kebijakan tersebut dikecualikan atas piutang UWTO pada Kantor Pengelolaan Lahan karena dikategorikan sebagai piutang lancar dengan

umur piutang adalah 6 bulan.

Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013, Badan Pengusahaan Batam menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :
 - Tanah;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014, Badan Pengusahaan Batam menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Perubahan PMK tersebut menambahkan ketentuan pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:
- Penghitungan Penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010

sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap; dan

- Pencatatan Penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.”
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Tahun 2016 merupakan pertama kalinya mulai diterapkan Penyusutan Aset Tak Berwujud dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Tahun 2017 dilakukan Penilaian Kembali (Revaluasi) atas Aset Tetap berdasarkan PMK 118 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Terkait Penilaian kembali BMN (revaluasi) disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Akumulasi penyusutan barang yang telah tercatat sampai dengan tanggal revaluasi, agar di-nol-kan (dihapuskan)
 - b. Apabila revaluasi dilakukan pada semester 2, maka beban penyusutan semester 1 tidak dihapuskan karena manfaat barang telah dikonsumsi.
 - c. Setelah pencatatan transaksi revaluasi, barang disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi
 - d. Perhitungan penyusutan setelah pencatatan transaksi revaluasi dilakukan berdasarkan nilai wajar hasil revaluasi dan sisa masa

- manfaat atau dengan masa manfaat baru (untuk BMN yang pada saat revaluasi telah habis masa manfaatnya diberi manfaat baru)
- e. Apabila revaluasi dilakukan pada semester 2 (sebelum penyusutan reguler semester 2 dilakukan) maka penyusutan atas barang tersebut terdiri dari:
 - f. Penyusutan semester 1: nilai perolehan + pengembangan/koreksi nilai dll dibagi masa manfaat.
 - g. Penyusutan semester 2: nilai wajar hasil revaluasi dibagi sisa masa manfaat (atau masa manfaat baru).

Penyajian Revaluasi tersebut ditunda sampai dengan Tahun 2018.

- Berdasarkan Surat Ditjen Perbendaharaan No. S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 dibentuk Satker Konsolidasian dimana satker yang dibentuk dalam rangka mencatat transaksi tertentu yang tidak dapat dicatat pada Satker lingkup K/L tsb, dalam rangka penyajian LKKL yang komprehensif dan berkualitas dengan tujuan:
 1. Diamanatkan dalam kebijakan akuntansi K/L tsb.
 2. Eliminasi transaksi intra K/L
 3. Koreksi BPK
- Berdasarkan Surat Ditjen Perbendaharaan No. S-3383/PB/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2017 *audited*, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan kebijakan penyusunan LKKP dan LKKL tahun 2017 *audited* yang telah disepakati antara Pemerintah dengan BPK RI, bahwa atas hasil revaluasi seluruh BMN pada tahun 2017 agar tidak disajikan dalam *face* LKKL tahun 2017, namun tetap digunakan secara memadai dalam CaLK.
 2. Dalam hal saat ini hasil revaluasi BMN telah disajikan dalam *face*

LKKL tahun 2017, K/L perlu melakukan berpedoman pada petunjuk teknis.

- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada Neraca per 1 Januari 2015 yang berbasis *cash toward accrual* (CTA) direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dibuat perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Mulai tahun 2016, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mulai pertama kali mengimplementasikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai komponen laporan keuangan sesuai PSAP 13.



B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp974.816.489.783,00** atau **84,17%** dari yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2017 sebesar **Rp1.158.197.829.000,00** (setelah revisi).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp644.796.000,00, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp78.848.039,00 dan Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita sebesar Rp974.092.845.744,00 atau 84,10% dari pagu anggaran sebesar Rp1.158.197.829.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Hibah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.158.197.829.000,00	974.092.845.744,00	84,10
2	Pendapatan dari Pemindahan BMN Lainnya	-	644.796.000,00	-
3	Penerimaan kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	-	78.848.039,00	-
	Jumlah	1.158.197.829.000,00	974.816.489.783,00	84,17

Realisasi PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Pendapatan dari Pemindahan BMN Lainnya	644.796.000,00	552.395.000,00
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-
3	Penerimaan kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	78.848.039,00	12.428.865.454,00
4	PNBP Badan Pengusahaan Batam	974.092.845.744,00	939.462.069.653,00
	Jumlah	974.816.489.783,00	952.443.330.107,00



a. Realisasi PNBPN Murni Tahun 2017

Realisasi PNBPN Murni Badan Pengusahaan Batam periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp974.092.845.744,00 dibandingkan dengan anggaran unit per tahunnya dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Kantor Pusat	603.348.170.000,00	244.528.963.434,00	40,53
2	Kantor Air dan Air Limbah	28.409.379.000,00	28.222.663.926,00	99,34
3	Kantor Bandara Hang Nadim	192.966.063.000,00	237.592.155.913,00	123,13
4	Kantor Pelabuhan Laut	235.557.217.000,00	397.967.146.740,00	168,95
5	Rumah Sakit BP Batam	96.217.000.000,00	65.144.167.896,00	67,71
6	Kantor Perwakilan Jakarta	1.700.000.000,00	637.747.835,00	37,51
	Jumlah	1.158.197.829.000,00	974.092.845.744,00	84,10

Realisasi PNBPN Murni Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp974.092.845.744,00 dan Rp939.462.069.655,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Kantor Pusat	244.528.963.434,00	432.452.960.979,00
2	Kantor Air dan Air Limbah	28.222.663.926,00	30.996.864.202,00
3	Kantor Bandara Hang Nadim	237.592.155.913,00	172.572.126.663,00
4	Kantor Pelabuhan Laut	397.967.146.740,00	240.072.427.068,00
5	Rumah Sakit BP Batam	65.144.167.896,00	62.370.419.831,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	637.747.835,00	997.270.912,00
	Jumlah	974.092.845.744,00	939.462.069.655,00

Jenis PNBPN Murni Badan Pengusahaan Batam pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
1	Perizinan Pembersihan Lahan	9.000.000,00	-
2	Perizinan Pematangan Lahan	1.061.000.000,00	134.000.000,00
3	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	14.860.000,00	125.408.698,00
4	Pendapatan UWTO	131.183.360.176,00	343.896.561.023,00
5	Pendapatan Uji Lab Tanah dan Beton	26.334.000,00	6.538.000,00



No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
6	Pendapatan Sewa Tanah/Lahan	-	200.000,00
7	Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan	24.575.400,00	-
8	Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	329.392.900,00	155.253.950,00
9	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	45.343.500,00	6.000.000,00
10	Pendapatan Sewa Listrik	116.022.360,00	171.648.601,00
11	Pendapatan Sewa Lainnya	1.196.147.500,00	1.394.159.999,00
12	Pendapatan Sewa Kandang Ternak	90.000.000,00	43.495.000,00
13	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	4.676.271.900,00	3.033.063.000,00
14	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	2.500.000,00	-
15	Pendapatan Retribusi Tiket	1.035.790.000,00	373.070.000,00
16	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	49.200.000,00	900.000,00
17	Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang	70.220.000,00	89.620.000,00
18	Pendapatan Perijinan Lainnya	-	555.052.000,00
19	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	132.631.244,00	540.750.000,00
20	Pendapatan Penghijauan / show room bunga / tanaman	286.305.440,00	-
21	Pendapatan Penggantian Dokumen	20.400.000,00	-
22	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	178.093.560,00	20.016.500,00
23	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya	417.133.920,00	-
24	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	901.210.823,00	-
25	Pendapatan Lain-Lain	38.927.477.919,00	9.509.160.344,00
26	Pendapatan Jasa Perbankan Lainnya	37.892.131,00	65.856.215,00
27	Pendapatan Jasa Pematangan Ternak	19.950.000,00	6.870.000,00
28	Pendapatan Jasa Kunjungan Wisata	6.340.000,00	-
29	Pendapatan Jasa Giro	12.583.065.254,00	10.984.681.595,00
30	Pendapatan Hasil Produksi Agribisnis	2.205.000,00	-
31	Pendapatan Denda UWTO	2.806.384.822,00	8.198.687.946,00
32	Pendapatan Data Center IT Center (detail)	7.480.391.600,00	9.938.356.505,00
33	Pendapatan dari Sewa Lahan Reklame	1.616.947.570,00	1.623.661.000,00
34	Pendapatan dari Bida Sekupang	811.812.293,00	831.579.521,00
35	Pendapatan dari Bida Kuning	3.749.030.380,00	3.288.736.724,00
36	Pendapatan dari Bida Kabil	2.110.077.051,00	301.308.847,00



No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
37	Pendapatan dari Bida Ayu	-	1.381.576.950,00
38	Pendapatan dari Bida Ampar	1.847.311.471,00	1.498.660.742,00
39	Pendapatan Bunga Jangka Pendek	24.477.225.556,00	31.023.812.755,00
40	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	673.200,00	55.695.794,00
41	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	63.347.509,00	178.928.523,00
42	Pendapatan Agribisnis	-	31.992.000,00
43	Pendapatan Agribisnis lainnya	750.000,00	5.120.000,00
44	Pendapatan Administrasi Peralihan	5.808.388.955,00	2.897.538.747,00
45	Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	313.900.000,00	85.000.000,00
Jumlah		244.528.963.434,00	432.452.960.979,00

2. Kantor Air dan Limbah

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
1	Air Baku	16.915.578.748,00	16.952.976.516,00
2	Pengolahan Air Limbah	417.283.000,00	437.809.980,00
3	Pendapatan Sewa Lahan KPLI B3	739.895.308,00	269.915.650,00
4	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Air	9.702.785.435,00	13.212.785.435,00
5	Pendapatan Jasa Giro	54.795.730,00	110.944.645,00
6	Pendapatan Denda Kantor Air	14.063.287,00	12.407.973,00
7	Jasa Pengelolaan kasawan KPLI-B3	199.000.000,00	-
8	Pengelolaan Penyedotan	2.750.000,00	-
9	Sewa Forklit	560.000,00	-
10	Sewa Ruangan Kantor	10.560.000,00	-
11	Jasa pengelolaan Loading Bay	2.100.000,00	-
12	Pendapatan Lain-Lain	163.292.419,00	24.003,00
Jumlah		28.222.663.926,00	30.996.864.202,00

3. BUBU Hang Nadim

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
1	Piutang Usaha	-	586.222.740,00
2	Penyimpanan Luar Negeri	1.318.200,00	-
3	Penempatan Luar Negeri	681.774.815,00	520.180.098,00
4	Penempatan Dalam Negeri	1.347.460.370,00	1.737.385.910,00
5	Pendaratan Luar Negeri	3.357.756.723,00	3.736.684.561,00
6	Pendaratan Dalam Negeri	8.242.246.462,00	8.617.845.468,00
7	Pendapatan Taxi (Biaya Pangkalan)	636.000.000,00	-
8	Pendapatan Surcharge Taxi	-	793.935.000,00
9	Pendapatan Sewa Usaha	2.824.987.146,00	-



No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
10	Pendapatan Sewa Tanah	303.584.250,00	180.912.417,00
11	Pendapatan Sewa Space Reklame/ Iklan	11.720.000,00	-
12	Pendapatan Sewa Perkantoran	672.798.209,00	-
13	Pendapatan Sewa Jasa Pergudangan	338.604.000,00	-
14	Pendapatan Sewa Gudang Kargo dan GSE	-	4.590.000,00
15	Pendapatan Sewa Fasilitas X-Ray	270.000.000,00	-
16	Pendapatan Sewa Counter	11.428.714.936,00	7.669.249.182,00
17	Pendapatan Reklame (Umum)	-	1.339.972.857,00
18	Pendapatan Porter	-	-
19	Pendapatan Non Aeronautika lainnya	-	-
20	Pendapatan Listrik	-	5.616.608.510,00
21	Pendapatan Sewa Bus Apron	359.650.000,00	-
22	Pendapatan Reklame (Umum)	2.828.438.051,00	-
23	Pendapatan Promosi/ Pemotretan	1.500.000,00	-
24	Pendapatan Porter	103.350.000,00	-
25	Pendapatan Non Aeronautika Lainnya	116.000.629,00	-
26	Pendapatan Listrik	4.081.265.486,00	-
27	Pendapatan Lain-lain	12.929.728,00	17,00
28	Pendapatan Konsesi Usaha	3.961.584.112,00	-
29	Pendapatan Konsesi Perkantoran	284.603.102,00	-
30	Pendapatan Konsesi Pergudangan	8.740.944.960,00	-
31	Pendapatan Konsesi Fee	9.799.902.940,00	6.154.089.354,00
32	Pendapatan Jasa Giro	266.866.387,00	168.917.807,00
33	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Bandara	42.532.842.053,00	20.838.371.514,00
34	Pendapatan Denda Jasa Non- aeronautika	637.342.178,00	283.252.521,00
35	Pendapatan Denda Jasa Aeronautika	8.140.376,00	32.676.486,00
36	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	798.184.282,00	608.486.566,00
37	Pendapatan Aero Lain_lain	1.739.954.597,00	11.589.949.471,00
38	Pendapatan Air	477.154.346,00	434.900.233,00
39	Pelayanan Jasa Penumpang Luar Negeri / Haji (JP2U)	5.211.713.145,00	3.944.540.000,00
40	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam negeri (JP2U)	107.937.040.000,00	87.104.950.000,00
41	Pelayanan Jasa Penerbangan Dalam Negeri (PJP)	5.819.341,00	10.443.235,00
42	Pelayanan Jasa Penerbangan Luar Negeri (PJP)	-	264.518,00
43	Layanan Pergudangan Internasional	140.311.412,00	-
44	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik KWH	216.543.494,00	-
45	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik Catu Daya	977.059.217,00	-



No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
46	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Air	68.936.880,00	-
47	Konsesi Fee Aero	8.481.798.137,00	2.962.308.900,00
48	Keuntungan Lainnya	96,00	167,00
49	Fasilitas Extend	511.602,00	-
50	Fasilitas Counter Luar Negeri	112.492.795,00	95.457.684,00
51	Fasilitas Counter Dalam Negeri	2.895.290.400,00	2.929.906.678,00
52	Fasilitas Bus Apron	329.500.000,00	13.708.600,00
53	Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Luar Negeri	661.306.775,00	932.259.804,00
54	Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Dalam Negeri	3.057.179.281,00	3.664.056.365,00
55	Pendapatan Pas Bandara	629.035.000,00	-
	Jumlah	237.592.155.913,00	172.572.126.663,00

4. Kantor Pelabuhan Laut

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
1	Piutang Usaha Perusahaan	-	8.036.480.269,00
2	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	-	4.485.000,00
3	Pendapatan Sewa Tangki	8.205.352.088,00	6.154.014.066,00
4	Pendapatan Sewa Tanah	2.006.417.820,00	192.445.920,00
5	Pendapatan Sewa Ruangan	836.187.798,00	632.764.800,00
6	Pendapatan Sewa Rak	330.003.000,00	70.213.500,00
7	Pendapatan Sewa Listrik	204.484.419,00	417.310.005,00
8	Pendapatan Seaport Tax	15.240.840.000,00	6.529.458.500,00
9	Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan	2.769.566.000,00	1.310.275.000,00
10	Pendapatan Retribusi Lainnya	96.932.935,00	3.240.000,00
11	Pendapatan Retribusi Kebersihan	14.564.240,00	31.950.000,00
12	Pendapatan Pungutan Kebersihan	21.049.522,00	-
13	Pendapatan Retribusi Alat/Kendaraan	-	23.500,00
14	Pendapatan Pungutan Kebersihan	-	936.537.497,00
15	Pendapatan Pass Untuk Orang	819.710.000,00	131.750.000,00
16	Pendapatan Lainnya dari Pengadaan Barang dan Jasa	-	952.000,00
17	Pendapatan Lain-Lain	772.480,00	72.074,00
18	Pendapatan Jasa Yacht	436.693.943,00	431.881.897,00
19	Pendapatan Jasa Tunda	-	10.543.272,00
20	Pendapatan Jasa Throughput	6.693.905.317,00	6.242.085.012,00
21	Pendapatan Jasa Tambat	161.995.237.703,00	88.199.654.046,00
22	Pendapatan Jasa Penumpukan Barang	5.789.094.200,00	1.047.381.350,00
23	Pendapatan Jasa Labuh	93.639.275.624,00	59.273.936.584,00
24	Pendapatan Jasa Giro	128.870.394,00	73.356.099,00



No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
25	Pendapatan Jasa Dermaga	25.956.524.083,00	18.465.436.133,00
26	Pendapatan Jasa Chasis	2.421.072.821,00	726.185.752,00
27	Pendapatan Jasa Bongkar Muat	327.311.430,00	128.502.367,00
28	Pendapatan Jasa Alat	2.770.853.475,00	3.474.828.179,00
29	Pendapatan Jasa Air Tawar	2.343.946.203,00	1.157.830.180,00
30	Pendapatan Imbalan Layanan Bongkar Muat	8.454.382.075,00	4.602.897.794,00
31	Pendapatan Iklan	17.280.000,00	403.200,00
32	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya	8.849.891,00	444.865.195,00
33	Pendapatan Denda KSO	700.000,00	-
34	Pendapatan Denda Jasa Pelabuhan	0,00	151.033.590,00
35	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	13.355.612,00	206.372.571,00
36	Pendapatan Air Bersih Untuk Property	23.095.840,00	127.574.410,00
37	KSO Tunda	6.577.212.699,00	4.688.789.421,00
38	KSO Tambat	2.386.253.147,00	2.722.858.949,00
39	KSO Sewa Ruangan/Bangunan	928.923.957,00	851.693.407,00
40	KSO Seaport Tax/Pass Orang	20.131.047.237,00	19.554.582.900,00
41	KSO Sampah	34.371.784,00	13.445.832,00
42	KSO Royalty	24.263.533.366,00	-
43	KSO Pelayanan Air Bersih Kapal	19.692.186,00	9.540.081,00
44	KSO Pass Kendaraan	-	4.101.500,00
45	KSO Parkir	432.094.950,00	530.592.950,00
46	KSO Pandu	1.061.984.738,00	751.560.533,00
47	KSO Mooring Bouy	-	18.526.014,00
48	KSO Iklan	98.447.662,00	84.538.329,00
49	KSO Dermaga	414.540.803,00	189.966.713,00
50	KSO Chasis	796.098,00	1.197.814.860,00
51	KSO Alat	51.919.200,00	237.663.850,00
52	Keuntungan Lainnya	-	11.967,00
	Jumlah	397.967.146.740,00	240.072.427.068,00

5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
1	Farmasi	27.153.421.509,00	32.986.082.317,00
2	Kamar HCU	143.362.492,00	96.518.989,00
3	Kamar ICU	178.557.326,00	248.970.967,00
4	Kamar Klas I	717.876.238,00	987.601.834,00
5	Kamar Klas II	607.347.745,00	803.706.137,00
6	Kamar Klas III	462.198.030,00	761.090.080,00
7	Kamar Klas VIP	54.608.745,00	26.436.379,00
8	Konsultasi Umum/Spesialis	32.000,00	-
9	Laboratorium	122.664.527,00	245.460.085,00
10	Material	-	13.443.934,00
11	Medikal Check Up	-	70.600.000,00
12	Obat	2.296.248.179,00	1.994.508.484,00
13	Pemulasaran Jenazah	-	35.845.047,00
14	Pendapatan Denda	4.719.699,00	1.458.020,00



No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
15	Pendapatan IGD Lainnya	965.842.916,00	1.468.545.949,00
16	Pendapatan Jasa Giro	121.817.671,00	139.142.491,00
17	Pendapatan Lain-Lain	4.460.246.323,00	221.644.876,00
18	Pendapatan Operasional Lainnya	206.699.617,00	3.300.050,00
19	Pendapatan Operasional Tindakan Medis Lainnya	2.071.517.693,00	1.385.411.856,00
20	Pendapatan Penunjang Lainnya	-	75.600.000,00
21	Pendapatan Rawat Inap Lainnya	4.185.942.047,00	7.141.829.692,00
22	Pendapatan Rawat Jalan Lainnya	2.140.339.597,00	4.344.903.382,00
23	Pendapatan Rujukan	41.837.612,00	531.859.344,00
24	Pendapatan Sanksi, Klaim & Denda	-	71.698,00
25	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	70.500.000,00	73.750.000,00
26	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	6.052.376.221,00	-
27	Pendidikan dan Latihan	45.000.000,00	43.650.000,00
28	Pengembalian Pendapatan (Retur)	24.508.500,00	-
29	Piutang Usaha Perusahaan	581.500,00	-
30	Radiologi	90.000,00	-
31	Registrasi	20.614.031,00	12.135.550,00
32	Registrasi Rawat Inap	79.097.624,00	44.781.858,00
33	Registrasi Rawat Jalan	584.897.460,00	247.536.086,00
34	Tindakan Medis	11.850.444.021,00	7.220.462.990,00
35	Tindakan medis non operatif	478.988.573,00	1.143.270.336,00
36	UGD	-	1.400,00
37	Visit Dokter/ Konsultasi	1.790.000,00	-
38	Ambulance	-	800.000,00
	Jumlah	65.144.167.896,00	62.370.419.831,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
1	Pendapatan Piutang TP/TGR	-	-
2	Pendapatan Sewa Kamar	626.460.000,00	941.125.000,00
3	Pendapatan Restoran	-	302.000,00
4	Pendapatan Jasa Giro	11.284.865,00	55.820.383,00
5	Pendapatan Lain-lain	2.970,00	23.529,00
	Jumlah	637.747.835,00	997.270.912,00

Belanja Negara

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Badan Pengusahaan Batam periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp1.533.494.094.476,00** atau **74,04%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.071.102.764.000,00 (setelah revisi). Anggaran belanja Badan Pengusahaan Batam tahun 2017 telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Surat Pengesahan Nomor: SP



DIPA.112.01.1.568717/2017 tanggal 22 September 2017 dengan kode barcode DS: 6059.0250.2300.6949. DIPA tahun anggaran 2017 telah mengalami beberapa kali revisi dengan yang terakhir revisi ke 9 yang telah mendapat pengesahan Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor: S.2277/WPB.31/BD.0203/2017 tanggal 30 November 2017 yang terdiri dari Anggaran PNBPN sebesar Rp1.478.495.164.000,00, Rupiah Murni sebesar Rp306.367.600.000,00 dan Pinjaman Hibah Luar Negeri sebesar Rp286.240.000.000,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 menurut program adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.568717.KP.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP.Batam	824.319.291.000,00	737.921.085.884,00	89,52
112.01.3200.568717.KP.01.5113	Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan	6.565.661.000,00	3.825.002.961,00	58,26
112.01.3200.568717.KP.01.5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	77.183.582.000,00	68.116.898.358,00	88,25
112.01.3200.568717.KP.01.5115	Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian	714.652.862.000,00	649.978.463.273,00	90,95
112.01.3200.568717.KP.01.5116	Pengelolaan Administrasi Keuangan	4.358.686.000,00	2.349.949.734,00	53,91
112.01.3200.568717.KP.01.5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	4.689.643.000,00	2.319.066.571,00	49,45
112.01.3200.568717.KP.01.5118	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	6.338.263.000,00	5.232.652.042,00	82,56
112.01.3200.568717.KP.01.5119	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan	6.558.642.000,00	3.421.032.837,00	52,16
112.01.3200.568717.KP.01.5120	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha	605.336.000,00	414.962.829,00	68,55
112.01.3200.568717.KP.01.5121	Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi	1.015.810.000,00	654.036.134,00	64,39
112.01.3200.568717.KP.01.5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	2.350.806.000,00	1.609.021.145,00	68,45
112.01.3200.568717.KP.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB. Batam	1.246.783.473.000,00	795.573.008.592,00	63,81
112.01.3200.568717.KP.06.5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	66.727.224.000,00	14.302.461.836,00	21,43
112.01.3200.568717.KP.06.5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	274.874.656.000,00	172.464.729.978,00	62,74
112.01.3200.568717.KP.06.5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara	146.869.872.000,00	118.402.882.019,00	80,62
112.01.3200.568717.KP.06.5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	218.093.967.000,00	187.602.873.283,00	86,02
112.01.3200.568717.KP.06.5127	Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana	27.308.905.000,00	15.179.209.360,00	55,58



Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.568717.KP.06.5128	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	67.663.555.000,00	58.341.033.785,00	86,22
112.01.3200.568717.KP.06.5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam	3.489.880.000,00	2.376.966.327,00	68,11
112.01.3200.568717.KP.06.5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah	343.806.930.000,00	153.918.076.386,00	44,77
112.01.3200.568717.KP.06.5131	Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan	22.629.449.000,00	19.237.564.105,00	85,01
112.01.3200.568717.KP.06.5132	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	5.604.963.000,00	2.829.453.667,00	50,48
112.01.3200.568717.KP.06.5133	Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset	48.425.375.000,00	38.793.394.621,00	79,92
112.01.3200.568717.KP.06.5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	21.288.697.000,00	12.124.363.225,00	56,95
Jumlah Belanja		2.071.102.764.000,00	1.533.494.094.476,00	74,04

Anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 menurut klasifikasi belanja dapat dilihat berikut ini:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
52	Belanja Barang	1.176.086.470.000,00	978.777.202.300,00	83,22
53	Belanja Modal	895.016.294.000,00	554.716.892.176,00	61,98
Jumlah		2.071.102.764.000,00	1.533.494.094.476,00	74,04

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:





Daftar Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan jenis belanja. terdiri dari:

No	Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Belanja Barang	978.777.202.300,00	1.046.448.031.119,00
2	Belanja Modal	554.716.892.176,00	370.741.429.729,00
	Jumlah	1.533.494.094.476,00	1.417.189.460.848,00

*Belanja
Barang*

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp978.777.202.300,00 dan Rp1.046.448.031.119,00 dengan rincian menurut jenisnya adalah sebagai berikut ini:

Nama Belanja	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	640.767.287.918,00	721.940.548.284,00
Belanja Barang	90.250.567.923,00	89.051.464.282,00
Belanja Jasa	163.311.748.974,00	145.039.888.643,00
Belanja Pemeliharaan	65.186.250.174,00	68.206.296.834,00
Belanja Perjalanan	19.037.254.016,00	21.520.563.846,00
Belanja Barang Operasional Lainnya	224.093.295,00	689.269.230,00
Jumlah Realisasi Belanja	978.777.202.300,00	1.046.448.031.119,00

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 menurut unit disajikan sebagai berikut:

Nama Belanja	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
Kantor Pusat	818.931.467.742,00	873.880.508.890,00
BUBU Hang Nadim	53.019.451.518,00	54.916.899.788,00
Kantor Air dan Limbah	10.162.964.590,00	6.455.634.830,00
Kantor Pelabuhan Laut	27.436.176.060,00	24.361.466.288,00
Rumah Sakit BP Batam	63.994.490.348,00	72.794.028.090,00
Kantor Perwakilan Jakarta	5.232.652.042,00	14.039.493.233,00
Jumlah Realisasi Belanja	978.777.202.300,00	1.046.448.031.119,00



Rincian belanja barang menurut jenisnya pada masing-masing unit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	640.498.301.542,00	712.974.608.079,00
525112	Belanja Barang	40.525.687.167,00	29.875.220.657,00
525113	Belanja Jasa	90.304.012.075,00	80.305.477.038,00
525114	Belanja Pemeliharaan	30419.845.398,00	31.155.204.857,00
525115	Belanja Perjalanan	16.959.528.265,00	18.880.729.029,00
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	224.093.295,00	689.269.230,00
Total Belanja Barang		818.931.467.742,00	873.880.508.890,00

2. BUBU Hang Nadim

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	4.735.371.890,00	4.840.778.722,00
525113	Belanja Jasa	29.646.150.938,00	29.512.665.862,00
525114	Belanja Pemeliharaan	17.983.308.509,00	19.614.384.385,00
525115	Belanja Perjalanan	654.620.181,00	949.070.819,00
Total Belanja Barang		53.019.451.518,00	54.916.899.788,00

3. Kantor Air dan Limbah

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	435.804.994,00	482.510.181,00
525113	Belanja Jasa	4.592.909.133,00	5.044.174.649,00
525114	Belanja Pemeliharaan	4.621.159.329,00	735.718.000,00
525115	Belanja Perjalanan	513.091.134,00	193.232.000,00
Total Belanja Barang		10.162.964.590,00	6.455.634.830,00

4. Kantor Pelabuhan Laut

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	3.647.876.200,00	7.954.927.768,00
525113	Belanja Jasa	17.543.804.578,00	8.544.809.570,00



Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
525114	Belanja Pemeliharaan	5.949.688.253,00	7.346.674.950,00
525115	Belanja Perjalanan	294.807.029,00	515.054.000,00
Total Belanja Barang		27.436.176.060,00	24.361.466.288,00

5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	39.650.170.271,00	44.671.183.737,00
525113	Belanja Jasa	19.352.162.839,00	19.821.712.154,00
525114	Belanja Pemeliharaan	4.693.463.545,00	7.825.057.380,00
525115	Belanja Perjalanan	298.693.693,00	476.074.819,00
Total Belanja Barang		63.994.490.348,00	72.794.028.090,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	268.986.376,00	8.965.940.205,00
525112	Belanja Barang	1.255.657.401,00	1.226.843.218,00
525113	Belanja Jasa	1.872.709.411,00	1.811.049.369,00
525114	Belanja Pemeliharaan	1.518.785.140,00	1.529.257.262,00
525115	Belanja Perjalanan	316.513.714,00	506.403.179,00
Total Belanja Barang		5.232.652.042,00	14.039.493.233,00



Belanja
Modal

B.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp554.716.892.176,00 dan Rp370.741.429.729,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Audited)	(Audited)
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	53.895.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.259.250.984,00	96.820.914.955,00
4	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	49.190.000,00	51.650.000,00
5	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	70.113.950,00	135.606.560,00
6	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
7	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	134.297.144.150,00	0,00
8	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	222.687.407,00	0,00
9	Belanja Modal Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	105.420.000,00	0,00
10	Belanja Modal Irigasi	11.391.075.089,00	7.502.738.500,00
11	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	540.629.189,00	135.795.775,00
12	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	61.560.000,00	0,00
13	Belanja Modal Irigasi - PHLN	111.174.565.692,00	0,00
14	Belanja Modal Tanah - BLU	1.004.501.669,00	1.408.816.892,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	122.449.427.729,00	102.647.788.707,00
16	Belanja Modal Peralatan Gedung dan Bangunan - BLU	18.819.320.768,00	53.007.726.814,00
17	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU	23.279.900.304,00	95.393.482.426,00
18	Belanja Modal Lainnya - BLU	9.992.105.245,00	13.583.014.100,00
	Jumlah Realisasi Belanja Modal	554.716.892.176,00	370.741.429.729,00

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 menurut unit disajikan sebagai berikut:

Nama Belanja	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Audited)	(Audited)
	(Rp)	(Rp)
Kantor Pusat	76.941.413.025,00	85.726.145.996,00
BUBU Hang Nadim	65.383.430.501,00	118.658.074.016,00
Kantor Air dan Limbah	143.755.111.798,00	25.666.628.195,00
Kantor Pelabuhan Laut	145.028.553.918,00	92.638.315.370,00
Rumah Sakit BP Batam	123.608.382.934,00	47.895.678.852,00
Kantor Perwakilan Jakarta	0,00	156.587.300,00
Jumlah Realisasi Belanja	554.716.892.176,00	370.741.429.729,00

Rincian belanja modal menurut jenisnya pada masing-masing unit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		(Audited)	(Audited)
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.088.316.334,00	0,00
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	1.004.501.669,00	1.408.816.892,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	42.081.631.029,00	52.917.780.400,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	9.448.122.272,00	3.845.401.378,00
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	12.672.936.476,00	14.380.783.226,00
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	9.645.905.245,00	13.173.364.100,00
Total Belanja Modal		76.941.413.025,00	85.726.145.996,00

2. BUBU Hang Nadim

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		(Audited)	(Audited)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0,00	0,00



Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	62.129.726.200,00	35.870.637.700,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	2.907.504.301,00	18.650.086.316,00
537114	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - BLU	0,00	64.137.350.000,00
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	346.200.000,00	0,00
Total Belanja Modal		65.383.430.501,00	118.658.074.016,00

3. Kantor Air dan Limbah

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin RM	0,00	53.895.000,00
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
534121	Belanja Modal Irigasi RM	11.391.075.089,00	7.502.738.500,00
534121	Belanja Modal Irigasi PHLN	111.174.565.692,00	0,00
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	61.560.000,00	0,00
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	540.629.189,00	0,00
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	0,00	135.795.775,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	8.945.334.000,00	416.749.720,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1.034.984.000,00	272.450.000,00
537114	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - BLU	10.606.963.828,00	16.875.349.200,00
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0,00	409.650.000,00
Total Belanja Modal		143.755.111.798,00	25.666.628.195,00



4. Kantor Pelabuhan Laut

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	61.300.970.455,00
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0,00	25.600.000,00
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0,00	67.072.695,00
534111	Belanja Modal Jalan, Jembatan & Irigasi	132.536.935.223,00	0,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	8.795.207.500,00	2.793.127.400,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	3.696.411.195,00	28.451.544.820,00
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0,00	0,00
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0,00	0,00
Total Belanja Modal		145.028.553.918,00	92.638.315.370,00

5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.378.554.934,00	35.519.944.500,00
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0,00	26.050.000,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	497.529.000,00	0,00
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	1.732.299.000,00	68.533.865,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0,00	10.492.906.187,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	1.788.244.300,00
Total Belanja Modal		123.608.382.934,00	47.895.678.852,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	0,00	0,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0,00	156.587.300,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00



Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0,00	0,00
Total Belanja Modal		0,00	156.587.300,00



Penjelasan
LP SAL

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun 2017. Berdasarkan laporan tersebut. SAL Awal tahun 2017 adalah sebesar **Rp622.848.698.190,00**. penggunaan SAL sebesar Rp0.00. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar Rp558.677.604.693,00. penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp378.447.992.422,00 terdiri dari pendapatan dari APBN sebesar Rp379.171.636.461,00, penyetoran PNBK ke Kas Negara sebesar Rp723.644.039,00. sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp180.229.612.271,00** yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih Akhir sehingga menyajikan saldo anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp442.619.085.919,00**.

Saldo
Anggaran
Lebih Awal

C.1.Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Per 1 Januari 2017 sebesar Rp622.848.698.190.00 merupakan Saldo Awal Kas dan Bank – BLU pada Badan Pengusahaan Batam yang telah dilakukan rekonsiliasi pengesahan saldo tersebut dengan KPPN Kota Batam. Saldo Anggaran Lebih meliputi Kas Operasional Penerimaan, Operasional Pengeluaran, dan Pengelolaan kas (Deposito).

Sisa
Lebih/Kurang
Pembiayaan
Anggaran

C.2.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/ kurang pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp558.677.604.693,00 dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017	974.816.489.783,00
2	Belanja Tahun 2017 (Jan s/d Desember 2017)	1.533.494.094.476,00
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (3=1-2)	(558.677.604.693,00)

Penyesuaian SiLPA/SiKPA

C.3. Penyesuaian SiLPA/SiKPA

Penyesuaian SiLPA/SiKPA merupakan penyesuaian untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 adalah nihil.

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

C.3.1 Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp378.447.992.422,00 merupakan penyesuaian atas Pendapatan atas Alokasi APBN yang diberikan Pemerintah Pusat sebesar Rp379.171.636.461,00 dan Penyetoran PNBP ke Kas Negara (BUN) yang diperoleh oleh BP Batam sebesar Rp723.644.039,00 antara lain Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN sebesar Rp644.796.000,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp78.848.039,00.

Pendapatan dari APBN

C.3.1.1 Pendapatan dari APBN

Penyesuaian Pendapatan dari APBN selama periode sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp379.171.636.461,00 merupakan pendanaan atas realisasi Belanja Modal yang bersumber dari pendanaan Rupiah Murni (RM) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan tidak merupakan bagian dari pengurangan Saldo Anggaran Lebih Awal. Penyesuaian pendapatan dari APBN terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017 (Audited) (Rp)
1.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Peralatan dan mesin	0,00
2.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	49.190.000,00
3.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Gedung dan Bangunan	121.259.250.984,00

No	Uraian	Tahun 2017 (Audited) (Rp)
4.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Gedung dan Bangunan	0,00
5.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Gedung dan Bangunan	70.113.950,00
6.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Jalan & Jembatan	222.687.407,00
7.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan & Jembatan	105.420.000,00
8.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Perjalanan Jalan & Jembatan	134.297.144.150,00
9.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Irigasi	122.565.640.781,00
10.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	540.629.189,00
11.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Perjalanan Irigasi	61.560.000,00
	JUMLAH	379.171.636.461,00

*Penyetoran
PNBP ke Kas
Negara*

C.3.2 Penyetoran PNBPN ke Kas Negara

Penyesuaian penyetoran PNBPN ke Kas Negara selama periode sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp723.644.039,00 merupakan penerimaan Badan Pengusahaan Batam dari Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dimana penerimaan tersebut disetorkan langsung ke Kas Negara. terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	644.796.000,00
2	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	78.848.039,00
	Jumlah (1+2)	723.644.039,00

*Koreksi
Kesalahan
Pembukuan
Tahun
Sebelumnya*

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan penyesuaian selama periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah nihil.

*Penyesuaian
Lain-lain*

C.5 Penyesuaian Lain-lain

Penyesuaian Lain-lain selama periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah nihil.



*Saldo
Anggaran
Lebih Akhir*

C.6 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Per 31 Desember 2017 sebesar Rp442.619.085.919,00 merupakan Penambahan SAL Awal sebesar Rp622.848.698.190,00. SiLPA/SiKPA tahun berjalan sebesar Rp558.677.604.693,00 dan penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp378.447.992.422,00 yang terdiri dari Pendapatan dari APBN sebesar Rp379.171.636.461,00 dan Penyetoran PNBK ke Kas Negara sebesar Rp723.644.039,00. SAL Akhir pada Badan Pengusahaan Batam telah dilakukan rekonsiliasi dan pengesahan saldo dengan KPPN Kota Batam.



D. PENJELASAN ATAS POS.POS NERACA

Aset Lancar D.1. Aset Lancar

Kas dan Bank D.1.1 Kas dan Bank

Saldo Kas dan Bank Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp563.668.602.770,00 dan Rp709.062.255.915,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kas		
Kantor Perwakilan Jakarta	1.270.500,00	1.270.500,00
RSBP	59.618.300,00	42.268.100,00
Dana Kelolaan Rusun	18.487.925,00	22.932.925,00
Jumlah Kas (I)	79.376.725,00	66.471.525,00
Bank		
Giro Rupiah Kantor Pusat	396.252.052.419,00	318.360.298.685,00
Giro Rupiah Kantor Perwakilan	1.320.659.021,00	4.547.806,00
Giro Rupiah RSBP	188.093.610,00	37.689.469,00
Giro Rupiah Kantor Pelabuhan Laut	6.893.802.953,00	1.994.000,00
Giro Rupiah BUBU Hang Nadim	50.303.906,00	39.473.538,00
Giro Rupiah Kantor Air & Limbah	14.801.318,00	23.599.275,00
Jumlah Giro Rupiah (II)	404.719.713.227,00	318.467.602.773,00
Giro Dana Kelolaan Kantor Pusat	77.511.269.056,00	83.503.143.006,00
Giro Dana Kelolaan RSBP	555.577.446,00	429.358.433,00
Giro Dana Kelolaan Kan.Perwakilan	16.990.130,00	16.031.321,00
Giro Dana Kelolaan BUBU Hang Nadim	775.649.185,00	0,00
Jumlah Giro Dana Kelolaan (III)	78.859.485.817,00	83.948.532.760,00
Setara Kas		
Setara Kas Lainnya	80.000.000.000,00	380.000.000.000,00
Jumlah Surat Berharga (IV)	80.000.000.000,00	380.000.000.000,00
Jumlah Kas dan Bank (I+II+III+IV)	563.658.575.769,00	782.482.607.058,00
Rekonsiliasi Bank		
Kantor Pusat		
- Cek yang masih beredar	0,00	(71.718.255.590,00)
- Koreksi Pembukuan	10.027.000,00	0,00
- Setoran yang belum dibukukan	0,00	284.376,00
- Administrasi bank	0,00	70.000,00
- Uang Muka	0,00	50.000.000,00
RSBP		
- Kesalahan bank	0,08	0,00



Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kantor Pelabuhan Laut		
- Setoran yang belum dibukukan	0,00	(1.752.449.929,00)
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah		
- Kesalahan Bank	0,40	0,00
Total Rekonsiliasi Bank (V)	10.027.001,00	(73.420.351.143,00)
Jumlah Kas dan Bank Setelah Rekonsiliasi	563.668.602.770,00	709.062.255.915,00

Kas

- Kas Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.270.500,00 merupakan pettycash KGH atas pendapatan sewa kamar, service charge dan Pajak PB1 yang belum disetor ke rekening penerimaan .
- Kas Rumah Sakit Badan Pegusahaan Batam (RSBP) per 31 Desember 2017 sebesar Rp59.618.300,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas Kecil Kasir Apotik	22.245.900,00
2	Kas Kecil Kasir Rawat Jalan	4.663.000,00
3	Kas Kecil Kasir Rawat Inap	21.696.800,00
4	Kas Kecil Kasir Apotik Baloi	93.600,00
5	Kas Kecil Kasir Klinik BUBU Hang Nadim	3.470.000,00
6	Kas Kecil Kasir IGD	7.449.000,00
	Jumlah	59.618.300,00

- Kas Dana Kelolaan Rusun per 31 Desember 2017 sebesar Rp18.487.925,00 adalah Kas Kecil pada unit Direktorat Pemanfaatan Aset yang merupakan titipan jaminan penghuni rumah susun. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada penghuni pada saat penghuni dimaksud keluar dari rumah susun. [\(Rincian Kas dapat dilihat pada Lampiran 1.a\)](#)

Bank

- Saldo Giro Rupiah per 31 Desember 2017 sebesar Rp404.719.713.227,00 merupakan saldo Giro Rupiah yang dimiliki Badan Pengusahaan Batam. Dalam jumlah tersebut belum termasuk saldo rekening bersama sebesar Rp8.315.918.206,00 dan USD28.113,59 (Ekuivalen Rp380.882.917,00 USD = Rp13.548,00) yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan

perjanjiannya.

Saldo Giro Rupiah tersebut belum termasuk hasil rekonsiliasi Bank pada masing-masing unit mandiri yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat selisih pada Giro Rupiah Kantor Pusat antara saldo buku dengan rekening koran sebesar Rp10.027.000,00 yang disebabkan adanya koreksi pembukuan sebesar Rp10.027.000,00.
- b. Terdapat selisih pada Giro Rupiah RSBP antara saldo buku dengan rekening koran sebesar Rp0,08 yang merupakan kesalahan Bank.
- c. Terdapat selisih pada Giro Rupiah Kantor Pengelolaan Air dan Limbah antara saldo buku dengan rekening koran sebesar Rp0,40 yang merupakan kesalahan Bank.

Telah dilakukan penutupan rekening penerimaan Kantor Pusat pada tanggal 9 Maret 2017 dengan nomor rekening Mandiri 1090004600177 berdasarkan surat penutupan rekening nomor B/21/A1.KPA/3/2017 tanggal 30 Maret 2017. [\(Rincian saldo Bank, Hasil Rekonsiliasi dan Rekening Bersama dapat dilihat pada Lampiran 1.b dan 1.c\)](#)

- Saldo Giro Dana Kelolaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp78.859.485.817,00. Saldo giro dana kelolaan tersebut merupakan setoran atas titipan pihak ketiga dan penerimaan sementara pada Kantor Pusat sebesar Rp77.511.269.056,00. Setoran deposit dari perusahaan pada RSBP sebesar Rp555.577.446,00 dan *Service Charge* pada Kantor Perwakilan Jakarta yang belum dibagikan kepada karyawan Kuningan *Guest House* sebesar Rp16.990.130,00, serta penerimaan sementara pada BUBU Hang Nadim sebesar Rp775.649.185,00.

Setara Kas Lainnya

- Setara Kas Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp80.000.000.000,00 adalah Investasi dalam bentuk deposito jangka waktu 1 bulan yang secara otomatis diperpanjang setiap bulannya kecuali akan dicairkan secara langsung yang terdiri dari Deposito pada Bank BTN sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Bank Riau Kepri sebesar Rp50.000.000.000,00. Terdapat penurunan saldo sebesar Rp300.000.000.000,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember



2016 dikarenakan telah dilakukan pencairan deposito yang digunakan untuk keperluan operasional dan pengelolaan kas Badan Pengusahaan Batam berdasarkan surat penutupan sebagai berikut:

No	No Rekening Deposito	Nomor Surat	Jumlah (Rp)
1	BRI 0331010003369406	B/125/A1.2/06/2017 tanggal 6 Juni 2017	50.000.000.000,00
		B/32/A1-KPA/7/2017 tanggal 7 Juli 2017	
		S-807/WPB.31/KP.137/2017 tanggal 31 Juli 2017	
2	Bank Riau 1.063.000.006	B/200/A1.2/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017	50.000.000.000,00
3	BNI 2458888863	B/46/A1-KPA/12/2017 dan B/312/A1.2/11/2017 tanggal 30 November 2017	50.000.000.000,00
		S-1484/WPB.31/KP.137 /2017 tanggal 20 Desember 2017	
4	BNI 362625136	B/45/A1-KPA/12/2017; B/334/A1.2/12/2017 tanggal 15 Desember 2017	50.000.000.000,00
		S-1484/WPB.31/KP.137 /2017 tanggal 20 Desember 2017	
5	BTN 0027.01.40.00.2719.9	B/342/A1.2/12/2017 tanggal 21 Desember 20	50.000.000.000,00
		B/4/A1-KPA/01/2018 tanggal 8 Januari 2018	
6	BRI 0331.01.003364406	B/341/A1.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017	50.000.000.000,00
		B/1/A1-KPA/01/2018 tanggal 8 Januari 2018	
Total			300.000.000.000,00

(Rincian Deposito dapat dilihat pada Lampiran 1.d)

*Kas Lainnya
dan Setara Kas*

D.1.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp121.049.516.851,00 dan Rp86.213.557.725,00 merupakan dana yang tersedia atas saldo titipan pihak ketiga yang ada di Badan Pengusahaan Batam serta Pendapatan/Belanja yang belum disahkan sampai dengan 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kantor Pusat	109.290.787.384,00	83.365.571.819,00
Kantor Air dan Limbah	135.257.040,00	140.634.080,00
BUBU Hang Nadim	2.639.697.167,00	422.162.189,00

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kantor Pelabuhan Laut	8.327.083.684,00	1.771.679.891,00
Rumah Sakit BP Batam	645.452.446,00	503.069.425,00
Kantor Perwakilan Jakarta	11.239.130,00	10.440.321,00
Jumlah	121.049.516.851,00	86.213.557.725,00

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing unit pelaporan terdiri atas:

D.1.1.1.a.Kantor Pusat

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP)	21.689.291.173,00
2	Titipan Dana Rusun	366.933.675,00
3	Titipan Penerimaan pihak ketiga Lainnya	9.142.762.987,00
4	Titipan Uang Muka UWTO	23.613.500.250,00
5	Penerimaan Sementara	1.594.972.529,00
6	Titipan Jaminan lainnya	1.661.566.573,00
7	Dana Pihak Ketiga	51.221.760.197,00
	Jumlah	109.290.787.384,00

- Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp21.689.291.173,00 dan Rp41.641.507.291,00 merupakan jaminan yang harus diberikan oleh pihak investor sebagai pelaksanaan pembangunan di atas lahan yang telah dialokasikan. Setiap penerima alokasi Lahan diwajibkan mengurus dokumen administrasi ke BP Batam dan Pemerintah Kota dan segera memulai kegiatan pembangunan fisik secara kontinyu dengan tidak menelantarkan lahan yang telah dialokasikan dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkan izin prinsip pengalokasian lahan. Jika dalam waktu yang tercantum telah terlampaui, ternyata penerima alokasi lahan belum melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, maka JPP tersebut akan menjadi milik BP Batam dan pengalokasian lahannya dapat dibatalkan (Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 74 Tahun 2014). Mulai Tahun 2017 tidak terdapat lagi penyetoran JPP ke dalam rekening Dana Kelolaan (Titipan) BP Batam, berdasarkan Perka 10 Tahun 2017 mekanisme JPP dilakukan dengan cara memberikan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Pembangunan, Garansi Bank per 31 Desember 2017 sebesar Rp494.935.750,00 merupakan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan dari PT. Chye Joo Sukses Indonesia dengan Nomor Garansi Bank MBG666110538417N pada Bank Mandiri (Rincian lihat Lampiran 2a).



Dari Jumlah Nilai JPP per 31 Desember 2016 sebesar Rp41.641.507.291,00, dapat dirinci sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah	Total
a.	JPP diakui sebagai pendapatan BP Batam		Rp19.952.216.118,00
b.	Sudah Evaluasi		Rp7.276.090.513,00
	1). JPP diakui sebagai pendapatan BP Batam (dikoreksi pada Tahun 2018)	Rp1.802.650.079,00	
	2). JPP yang telah dievaluasi namun dalam proses verifikasi administrasi	Rp5.315.558.761,00	
	3). JPP dapat dikembalikan	Rp157.881.673,00	
c.	c. Belum Evaluasi		Rp14.413.200.660,00
	1). Kurang dari 3 Tahun	Rp12.989.629.678,00	
	2). Lebih dari 3 Tahun	Rp1.423.570.982,00	

- Pengakuan Pendapatan atas JPP sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp19.952.216.118,00 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Unit Kantor Pengelolaan Lahan, Kepala Satuan Pemeriksa Internal dan Kepala Biro Keuangan dengan No JV-UJK-021-12-02-2017 tanggal 31 Desember 2017.
- Pengakuan Pendapatan atas JPP yang telah dilakukan proses evaluasi dan telah ditetapkan sebagai Pendapatan sebesar Rp1.802.650.079,00 pada Bukti Kas No DK/2018/02/0003 sd 0050 tanggal 27 Februari 2018 dan BK/2018/02/4272 tanggal 28 Februari 2018.
- Titipan Dana Rusun per 31 Desember 2017 sebesar Rp366.933.675,00 adalah dana deposit penyewa rusun, yang terdiri dari :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Titipan Dana Rusun Batu Ampar	82.642.500,00
2	Titipan Dana Rusun Sekupang	8.386.000,00
3	Titipan Dana Rusun Muka Kuning	191.632.675,00
4	Titipan Dana Rusun Kabil	84.272.500,00
	Jumlah	366.933.675,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 2b)

- Titipan Penerimaan Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp9.142.762.987,00 per 31 Desember 2017 adalah dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Penerimaan atas faktur yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp533.018.000,00 (sesuai Nota Dinas Direktur Lahan Nomor 209/A1.1/LHN/12/2015 tanggal 18 Desember 2015)
 - Penerimaan atas pembayaran UWTO PT. Pertamina pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp7.083.589.587,00 atas faktur yang diterbitkan atas UWTO tersebut adalah sebesar Rp10.475.128.090,00 (Nomor Faktur C.0045041304 tanggal 9 April 2014). Atas alokasi lahan yang diberikan kepada PT. Pertamina mengalami perubahan-perubahan yang belum memperoleh kesepakatan. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2015. Deputi Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha menerbitkan surat Nomor B/86/KA.A3/1/2015 yang menyatakan pembatalan sebagian alokasi lahan PT. Pertamina dan agar UWTO yang telah dibayarkan (Rp7.083.589.587,00) agar ditagih kembali ke Badan pengusahaan Batam, namun sampai dengan 31 Desember 2017 belum direalisasikan.
 - Penerimaan atas pembayaran UWTO sebesar Rp245.016.200,00 pada tanggal 23 Desember 2014 yang tidak dapat diidentifikasi baik faktur maupun penyeter (sampai dengan berakhirnya periode Laporan Keuangan. Direktorat Lahan belum memberikan klarifikasi yang memadai).
 - Penerimaan atas pembayaran UWTO sebesar Rp1.281.139.200,00 terdiri dari:

No	Tanggal Penerimaan	Jumlah
1	6 Maret 2015	213.523.200,00
2	28 April 2015	213.523.200,00
3	26 Mei 2015	213.523.200,00
4	23 Juni 2015	213.523.200,00
5	24 Agustus 2015	213.523.200,00
6	12 Oktober 2015	213.523.200,00
Jumlah		1.281.139.200,00

Sampai dengan berakhirnya periode Laporan Keuangan, Kantor Pengelolaan Lahan belum memberikan klarifikasi yang memadai atas pembayaran UWTO dimaksud.



- Titipan Uang Muka UWTO per 31 Desember 2017 sebesar Rp23.613.500.250,00 adalah perkiraan yang menampung uang Muka UWTO yang belum diakui sebagai pendapatan UWTO.
- Penerimaan Sementara per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.594.972.529,00 terdiri dari akun perkiraan yang menampung transaksi penerimaan yang belum dapat dicatat sebagai pendapatan karena bukti penyeterannya belum diperoleh sebesar Rp969.443.068,00. titipan rusun Kemenpera sebesar Rp625.529.461,00.
- Titipan Jaminan Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.661.566.573,00 merupakan jaminan yang harus diberikan oleh pihak investor sebagai pelaksanaan pembangunan di atas lahan yang telah dialokasikan. jika pembangunan dilaksanakan sesuai perjanjian maka jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Badan Pengusahaan Batam. sebaliknya jika pemohon tidak melaksanakan pembangunan sesuai perencanaan dan waktu yang telah ditentukan maka Badan perusahaan Batam memberikan surat peringatan hingga mencabut alokasi lahan yang telah diterbitkan dan jaminan tersebut akan diakui sebagai pendapatan Badan Pengusahaan Batam.
- Dana Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp51.221.760.197,00 merupakan hasil rekonsiliasi Kas da Bank BLU sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat giro *Check* yang beredar (*outstanding check*) dan belum dcaikan oleh supplier (pihak ketiga) pada Bank Mandiri 109.000091001370.

D.1.1.1.b.Kantor Air dan Limbah

Kas lainnya dan setara kas Titipan Deposit pada Kantor Air dan Limbah per 31 Desember 2017 sebesar Rp135.257.040.00 adalah dana jaminan Pelanggan KPLI B3 yang apabila perjanjian berakhir dan mengundurkan diri. maka dana dimaksud dikembalikan kepada pelanggan. Dana tersebut telah disetor ke rekening Kantor Pusat pada tahun 2016.

D.1.1.1.c. Kantor Pelabuhan Laut

Kas lainnya dan setara kas Titipan Pihak Ketiga Kantor Pelabuhan Laut per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.327.083.684,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Titipan pihak ketiga	2.831.103.544,00
2	Selisih kurs titipan pihak ketiga	(43.979.018,00)
3	Dana Pihak Ketiga	5.539.959.158,00
	Jumlah	8.327.083.684,00

Kas lainnya dan setara kas Titipan Pihak Ketiga pada Kantor Pelabuhan Laut Per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.327.783.684,00 terdiri dari:

- Titipan Pihak Ketiga sebesar Rp2.831.103.544,00 merupakan perkiraan transaksi penerimaan Bank yang belum diketahui peruntukan dan kelebihan setor pembayaran faktur;
- Terdapat selisih kurs titipan pihak ketiga sebesar Rp43.979.018,00;
- Dana Pihak Ketiga sebesar Rp5.539.959.158,00 merupakan hasil rekonsiliasi Kas da Bank BLU sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat giro *Check* yang beredar (*outstanding check*) dan belum dicaikan oleh supplier (pihak ketiga) pada Bank BNI 4505050506.

D.1.1.1.d. BUBU Hang Nadim

Kas lainnya dan setara kas Titipan Pihak Ketiga BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.268.732.167,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Titipan pihak ketiga	2.640.512.077,00
2	Selisih kurs titipan pihak ketiga	(814.910,00)
	Jumlah	2.639.697.167,00

Kas lainnya dan setara kas Titipan Pembayaran Pihak Ketiga Lainnya per per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.640.512.077,00 terdiri dari:

- Titipan Pembayaran pada Kantor Bandara sebesar Rp1.342.886.960,00 adalah titipan pihak ketiga akibat salah transfer dari pihak Debitur (PT.

Malindo) dan saat ini dalam proses permohonan pengembalian dana ke Biro Keuangan Batam Center.

- Titipan pembayaran pihak ketiga lainnya sebesar Rp775.649.185,00 merupakan Titipan Jaminan Jasa Layanan Kebandarudaraan yang belum diakui sebagai pendapatan.
- Penerimaan sementara sebesar Rp521.975.932,00 yang terdiri dari :
 - a. penerimaan yang tidak diketahui debiturnya sebesar Rp189.438.605,00;
 - b. penerimaan yang telah diketahui debiturnya tetapi tidak diketahui peruntukan pembayarannya sebesar Rp272.811.640,00;
 - c. kelebihan pembayaran dengan nominal diatas Rp1.000.00 sebesar Rp59.725.687,00.
- Terdapat selisih kurs pada penerimaan sementara sebesar Rp814.910,00 yang tidak mempengaruhi kas lainnya dan setara kas pada BUBU Hang Nadim.

D.1.1.1.e. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Kas lainnya dan setara kas Titipan Pihak Ketiga Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2017 sebesar Rp645.452.446,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Deposit/simpanan Pelanggan RSBP	81.750.000,00
2	Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya	555.577.446,00
3	Penerimaan Sementara	8.125.000,00
	Jumlah	645.452.446,00

- Deposit/simpanan pelanggan sebesar Rp81.750.000,00 merupakan jaminan pasien dalam perawatan yang belum diselesaikan pada saat pasien pulang. [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 2c\)](#)
- Titipan Dana Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp555.577.446,00 terdiri dari Jaminan Perusahaan sebesar Rp555.000.000,00 dan Pendapatan Bunga Bersih bulan atas rekening yang menampung setoran titipan tersebut sebesar Rp577.446,00. [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 2d\)](#)
- Penerimaan sementara sebesar Rp8.125.000,00 merupakan kelebihan bayar para pasien maupun pelanggan lainnya.

D.1.1.1.f. Kantor Perwakilan Jakarta

Service Charge KGH per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.239.130,00 yang merupakan *Service Charge* KGH pegawai yang belum dibayarkan/disetorkan kepada pegawai sebesar Rp11.679.130,00 dan utang pajak yang disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp440.000,00 sampai dengan 31 Desember 2017.

Kas Pada Badan Layanan Umum

D.1.1.2. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp442.619.085.919,00 dan Rp622.848.698.190,00. Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2017 sebesar Rp442.619.085.919,00 terdiri dari kas yang berasal dari realisasi PNBPN setelah dikurangi realisasi belanja yang telah disahkan KPPN sebesar Rp180.229.612.271,00. Saldo tersebut berada pada rekening operasional penerimaan, pengeluaran maupun rekening dana kelolaan Badan Pengusahaan Batam. Kas pada Badan Layanan Umum sebesar Rp442.619.085.919,00 terdiri dari:

Kas dan Bank - BLU

D.1.1.2.a Kas dan Bank - BLU

Saldo Kas dan Bank BLU per 31 Desember 2017 sebesar Rp362.619.085.919,00. Saldo tersebut merupakan realisasi PNBPN setelah dikurangi realisasi belanja yang telah disahkan dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Kas dan Bank BLU 1 Januari 2017 (Audited)	622.848.698.190,00
2	Penerimaan Kas PNBPN Tahun 2017	974.092.845.744,00
3	Pengeluaran Kas PNBPN Tahun 2017	(1.154.322.458.015,00)
4	Kenaikan/(penurunan) Kas Tahun 2017 (2.3)	(180.229.612.271,00)
5	Koreksi Saldo Awal Kas BLU (Memo Penyesuaian)	0,00
6	Saldo Akhir Kas dan Bank BLU 31 Desember 2017 (1+4+5) (Audited)	442.619.085.919,00
7	Setara Kas Lainnya - BLU	80.000.000.000,00
8	Saldo Akhir Kas dan Bank BLU 31 Desember 2017 (6-7) (Audited)	362.619.085.919,00



Pada saldo Kas pada Badan Layanan Umum sebesar Rp362.619.085.919,00 belum termasuk sisa uang muka/panjar tidak lancar Rp2.961.573.242,00 yang belum dipertanggungjawabkan. Uang muka/panjar tersebut dicatat pada akun Aset Lainnya (lihat penjelasan D.3.4.3).

*Setara Kas
Lainnya-BLU*

D.1.1.2.b Setara Kas Lainnya - BLU

Saldo Setara Kas Lainnya - BLU per 31 Desember sebesar Rp80.000.000.000,00. Setara Kas Lainnya - BLU per per 31 Desember 2017 sebesar Rp80.000.000.000,00 adalah Investasi dalam bentuk deposito jangka waktu 1 bulan yang secara otomatis diperpanjang setiap bulannya kecuali akan dicairkan secara langsung yang terdiri dari Deposito pada Bank BTN sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Bank Riau Kepri sebesar Rp50.000.000.000,00.

*Belanja
dibayar
Dimuka*

D.1.2 Belanja di Bayar Di Muka

Belanja dibayar di Muka Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp898.858.750,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
Kantor Pusat	0,00	898.858.750,00
Kantor Pelabuhan Laut	0,00	0,00
Jumlah	0,00	898.858.750,00

- Belanja dibayar dimuka Kantor Pusat per 31 Desember 2017 adalah Rp0,00. Belanja dibayar dimuka pada Kantor Pusat per 31 Desember 2016 sebesar Rp898.858.750,00 yang telah diakui sebagai beban pemeliharaan garansi server di PDSI pada Tahun 2017 a.n. PT. OES Pratama Indonesia (B/K 2016/12/3770) sehingga saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

*Pendapatan
Yang Masih
Harus
Diterima*

D.1.3. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp28.046.814.084,00 dan Rp37.043.398.377,00 terdiri dari:



Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
BUBU Hang Nadim	9.786.409.939,00	8.217.159.015,00
RSBP	15.129.837.597,00	27.738.048.755,00
Kantor Pelabuhan Laut	3.130.566.548,00	1.088.190.607,00
Jumlah	28.046.814.084,00	37.043.398.377,00

- Pendapatan yang Masih Harus Diterima **BUBU Hang Nadim** per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.786.409.939,00 merupakan pendapatan pelayanan jasa pada kantor Bandara yang belum disetorkan oleh pihak ketiga yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Hasil KSO atas Parkir dengan PT. Adhil Sukses Pratama	51.558.060,00
2	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam Negeri:	3.427.280.000,00
	a. Garuda Indonesia	308.040.000,00
	b. Citilink	1.341.300.000,00
	c. Batik Air	64.020.000,00
	d. Wings Air	47.760.000,00
	e. Sriwijaya Air	70.260.000,00
	f. Lion Air	1.436.520.000,00
	g. Malindo	53.000.000,00
	h. Lion Internasional	105.000.000,0
	i. Charter	1.380.000,00
	Jumlah (1+2)	3.478.838.060,00
3	Pendapatan atas Piutang Denda pada BUBU Hang Nadim yang belum diterbitkan fakturnya per 31 Desember 2017	6.307.571.879,00
	Jumlah (1+2+3+4)	9.786.409.939,00

- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima **Rumah Sakit BP Batam** Per 31 Desember 2017 sebesar Rp15.129.837.597,00 merupakan Pendapatan atas BPJS Tahun 2015 dan 2016 yang belum dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan.
- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima **Kantor Pelabuhan Laut** Per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.130.566.548,00 merupakan pendapatan atas piutang denda yang belum diterbitkan fakturnya per 31 Desember 2017.



Piutang Bukan Pajak **D.1.4. Piutang Bukan Pajak**

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp2.031.729.289,00 dan Rp5.468.098.090,00 merupakan piutang sisa pekerjaan akhir tahun yang belum selesai dengan jaminan Garansi Bank yang terdiri dari :

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
BUBU Hang Nadim	417.882.189,00	0,00
Kantor Pelabuhan Laut	1.613.847.100,00	5.468.098.090,00
Jumlah	2.031.729.289,00	5.468.098.090,00

- Saldo Piutang Bukan Pajak BUBU Hang Nadim Per 31 Desember 2017 sebesar Rp417.882.189,00 terdiri dari Piutang Bukan Pajak sebesar Rp380.050.476,00 merupakan pencatatan garansi bank atas kontrak belanja modal Pengadaan *Acces Control* di BUBU Hang Nadim yang putus kontrak dengan Surat Perjanjian Nomor SP-31/PPK.PNBP-BU/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp37.831.713,00 merupakan pencatatan garansi bank atas kontrak belanja modal Pembangunan Garasi Kendaraan A2B di BUBU Hang Nadim yang putus kontrak Surat Perjanjian Nomor SP-30/PPK.PNBP-BU/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

Jumlah pencairan garansi bank untuk pembangunan *Acces Control* pada PT. Panamo Indonesia dan pembangunan Garasi Kendaraan A2B pada CV. Bumi Putra Utama masing-masing sebesar Rp380.050.476,00 dan Rp37.831.713,00 telah dikembalikan ke rekening Badan Pengusahaan Batam Nomor Rekening Bank (109.000091001370) pada tanggal 12 Januari 2018 dan 16 Januari 2018.

- Saldo Piutang Bukan Pajak Kantor Pelabuhan Laut Per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.613.847.100,00 merupakan kelebihan bayar atas pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Nomor Kontrak 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/11/2015.

Adapun Piutang yang telah diselesaikan (**lunas**) Per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.854.250.990,00 dilakukan pada periode Januari 2017 dengan

penjelasan sebagai berikut:

- Piutang Bukan Pajak Kantor Pelabuhan Laut sebesar Rp5.468.098.090,00 per 31 Desember 2016 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pencatatan garansi bank untuk pembangunan Terminal Domestik Sekupang atas nama PT. Waskita Karya dengan nomor jaminan Bank BNI (Bank Garansi) 16/OJR/078/7956/RABU tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp1.890.469.262,00	1.890.469.262,00
2	Pencatatan garansi bank untuk pembangunan Terminal Domestik Telaga Punggur atas nama PT. Utama Karya dengan nomor jaminan Bank BNI 16/OJR/089/7792/KAMIS tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp1.963.781.728,00	1.963.781.728,00
3	Pencatatan kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengerukan kolam dermaga utara Batu Ampar dengan nomor kontrak 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/11 /2015 tanggal 24 November 2015 atas nama PT. Sumber Alam Sejahtera sebesar Rp1.613.847.100,00.	1.613.847.100,00
Total		5.468.098.090,00

Jumlah pencairan garansi bank untuk pembangunan Terminal Domestik Sekupang PT. Waskita Karya dan PT. Utama Karya masing-masing sebesar Rp1.890.469.262,00 dan Rp1.963.781.728,00 telah dikembalikan ke rekening Badan Pengusahaan Batam Nomor Rekening Bank (109.0004600177) pada tanggal 27 Januari 2017 Nomor BKS 2017/01/0406.

Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU

D.1.5. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp368.498.898.367,00 dan Rp369.477.744.235,00 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kantor Pusat	157.399.666.834,00	220.027.401.219,00
Kantor Air dan Limbah	349.635.991,00	240.119.919,00
BUBU Hang Nadim	24.420.614.561,00	14.047.479.611,00
Kantor Pelabuhan Laut	143.141.917.411,00	118.105.910.023,00
Rumah Sakit BP Batam	43.187.063.570,00	17.056.833.463,00



Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Jumlah Piutang (I)	368.498.898.367,00	369.477.744.235,00
Eliminasi Piutang Usaha (II)	0,00	0,00
Jumlah Piutang Usaha Setelah Eliminasi(III)= (I. II)	368.498.898.367,00	369.477.744.235,00
Akumulasi Penyisihan :		
Kantor Pusat	(2.468.981.015,00)	(12.943.967.822,00)
Kantor Air dan Limbah	(10.345.000,00)	(0,00)
BUBU Hang Nadim	(4.518.829.718,00)	(6.445.767.782,00)
Kantor Pelabuhan Laut	(65.141.572.421,00)	(32.091.922.786,00)
Rumah Sakit BP Batam	(8.876.843.765,00)	(6.870.051.959,00)
Jumlah Akum. Penyisihan (IV)	(81.016.571.919,00)	(58.351.710.349,00)
Nilai Buku Piutang Usaha :		
Kantor Pusat	154.930.685.819,00	207.083.433.397,00
Kantor Air dan Limbah	339.290.991,00	240.119.919,00
BUBU Hang Nadim	19.901.784.843,00	7.601.711.829,00
Kantor Pelabuhan Laut	78.000.344.990,00	86.013.987.237,00
Rumah Sakit BP Batam	34.310.219.805,00	10.186.781.505,00
Nilai Buku Piutang Usaha (V) = (III-IV)	287.482.326.448,00	311.126.033.886,00

Rincian Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.1.5.1 Kantor Pusat

Piutang usaha Kantor Pusat per 31 Desember 2017 sebesar Rp157.399.666.834,00 terdiri dari:

No	Unit Kantor Pusat	Jumlah
1	Kantor Pengelolaan Lahan	153.971.253.758,00
2	Direktorat Pemanfaatan Aset	1.017.680.276,00
3	Direktorat Pembangunan Prasarana & Sarana	2.023.182.400,00
4	Kantor Pusat Data & Sistem Informasi (PDSI)	387.550.400,00
	Total	157.399.666.834,00

D.1.5.1.a. Kantor Pengelolaan Lahan

Piutang Usaha Kantor Pengelolaan Lahan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp153.971.253.758,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)	144.394.947.511,00
2.	Biaya Pengukuran dan Penetapan Lokasi (Pengukuran)	861.197.946,00
3.	Biaya Adminisitrasi Peralihan (BAP)	231.795.234,00
4.	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	400.000,00

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
5.	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah (Rekomendasi HAT)	7.000.000,00
6.	Pendapatan Pengantian Dokumen	1.800.000,00
7.	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi (Pecah dan Gabung PL)	314.200.000,00
8.	Bida Ayu (KSB Plus)	5.959.352.500,00
9.	Pendapatan Denda	2.200.560.567,00
	Total	153.971.253.758,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 3)

D.1.5.1.b. Direktorat Pemanfaatan Aset

Piutang usaha Direktorat Pemanfaatan Aset Per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.017.680.276,00 merupakan atas piutang sewa gedung, listrik dan bangunan lainnya. Telah dilakukan pemindahan saldo piutang Direktorat Pemanfaatan Aset untuk piutang KSB dan KSB Plus (Bida Ayu) ke Kantor Pengelolaan Lahan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 28/A1.2/08/2017 dan berdasarkan Nota Dinas Nomor 358/A4.2/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Nota Dinas Nomor 217/A1.2/09/2017 Tanggal 12 September 2017. (Rincian dapat dilihat pada Lampiran 4)

D.1.5.1.c. Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana

Piutang Usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.023.182.400,00 merupakan piutang atas sewa lahan reklame.

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Sewa Lahan Reklame	1.856.520.000,00
2.	Pertamanan dan Penghijauan	45.753.000,00
3.	Pemakaian Lahan ROW	120.909.400,00
	Total	2.023.182.400,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 5)

D.1.5.1.d. Kantor Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI)

Piutang Usaha Kantor Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) per 31 Desember 2017 sebesar Rp387.550.400,00 merupakan piutang atas Pendapatan *Data Centre IT Centre*. (Rincian dapat dilihat pada Lampiran 6)

D.1.5.2 Kantor Air dan Pengelolaan Limbah

Piutang Usaha Kantor Air dan Pengelolaan Limbah per 31 Desember 2017 sebesar Rp349.635.991,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Air Baku	225.507.458,00
2.	Pengolahan Air Limbah	47.880.000,00
3.	Sewa Lahan KPLI B3	40.560.000,00
4.	Jasa Pengelolaan Kawasan KPLI B3	22.000.000,00
5.	Sewa Ruangan Kantor	9.011.200,00
6.	Denda Pengelolaan Kawasan KPLI B3	144.000,00
7.	Denda Pengolahan Limbah	766.000,00
8.	Denda Sewa Lahan	3.761.333,00
9.	Loading Bay	6.000,00
	Total	349.635.991,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 7)

D.1.5.3 BUBU Hang Nadim

Piutang Usaha BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2017 sebesar Rp24.420.614.561,00 yang terdiri dari Piutang Usaha Perusahaan sebesar Rp24.238.599.118,00 dan Piutang Usaha Perorangan sebesar Rp182.015.443,00. Piutang dimaksud terbagi atas 2 (dua) mata uang yaitu Indonesia Rupiah dan Dollar Amerika, masing-masing sebesar Rp24.133.813.291,00 dan USD21.169,27 atau Equivalen Rp286.801.270,00.

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 8)

D.1.5.4 Kantor Pelabuhan Laut

Piutang Usaha Kantor Pelabuhan Laut per 31 Desember 2017 sebesar Rp143.141.917.411,00 merupakan Piutang Perusahaan atas jasa antara lain labuh, tambat, bongkar muat, tunda, sewa dan lain-lain yang terdiri dari Piutang Usaha Perusahaan sebesar Rp143.011.839.632,00 dan Piutang Usaha Perorangan sebesar Rp130.077.779,00. (Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9).

D.1.5.5 Rumah Sakit BP Batam

Piutang Usaha Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2017 sebesar Rp43.187.063.570,00 terdiri dari :



No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Piutang Usaha Perusahaan (Pelanggan)	37.107.402.257,00
2.	Piutang Usaha Perorangan (Kredit Umum)	6.079.661.313,00
3.	BP Batam	0,00
	Total (I)	43.187.063.570,00
	Eliminasi Piutang Karyawan (II)	0,00
	Total Piutang Setelah Eliminasi (I - II)	43.187.063.570,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 10).

Dari saldo Piutang Usaha Perusahaan RSOB-BP Batam sebesar Rp43.187.063.570,00, dari piutang tersebut terdapat:

1. Piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp34.472.786.968,00
2. Piutang PT. Jamsostek sebesar Rp664.562.452,00
3. Piutang Dinas Kesehatan Kota Batam sebesar Rp411.135.064,00
4. Piutang PT. Panasonic Industrial Devices Batam sebesar Rp259.801.110,00
5. Piutang PT. Ciba Vision Batam sebesar Rp146.654.150,00

Mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Usaha sampai dengan 31 Desember 2017 pada Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

A. Kantor Pusat.

Mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Usaha sampai dengan 31 Desember 2017 pada Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Kantor Pengelolaan Lahan	203.958.207.564,00	184.270.693.056,00	234.257.646.862,00	153.971.253.758,00
Direktorat Pemanfaatan Aset	8.782.832.920,00	5.949.869.019,00	13.715.021.663,00	1.017.680.276,00
Biro Keuangan (Royalti Pasir)	4.708.427.335,00	304.250.366,00	5.012.677.701,00	0,00
Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana	2.342.865.000,00	2.004.124.330,00	2.323.806.930,00	2.023.182.400,00
PDSI	235.068.400,00	7.632.873.600,00	7.480.391.600,00	387.550.400,00
Akumulasi penyisihan Piutang	(12.943.967.823,00)	21.813.819.109,90	11.338.832.302,00	(2.468.981.015,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	207.083.433.396,00			154.930.685.819,00

A.1. Mutasi Piutang Usaha Kantor Pengelolaan Lahan:

- Penambahan Piutang Usaha Kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp184.270.693.056,00 terdiri dari penerbitan faktur sampai dengan

31 Desember 2017 sebesar Rp176.547.587.621,00, koreksi atas pelunasan piutang menjadi pendapatan atas faktur yang telah dibatalkan pada 31 Desember 2016 sebesar Rp129.536.000,00, koreksi atas pelunasan piutang karena double pencatatan sebesar Rp743.400,00 serta Pemindahan saldo piutang dari Direktorat Pemanfaatan Aset sebesar Rp7.592.826.036,00 berdasarkan Nota Dinas Nomor 358/A.4.2/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan Nota Dinas Nomor 217/A1.2/09/2017 tanggal 12 September 2017.

- Pengurangan Piutang Usaha Kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp174.276.986.229,00 berasal dari pelunasan faktur sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp140.819.983.407,00, koreksi faktur tahun berjalan sebesar Rp19.830.329.636,00, koreksi faktur BAP tahun lalu sebesar Rp0,50, koreksi atas pelunasan piutang menjadi pendapatan atas faktur yang telah dibatalkan pada 31 Desember 2016 sebesar Rp129.536.000,00, koreksi atas pelunasan piutang karena double catat sebesar Rp743.400,00, koreksi kesalahan pencatatan faktur tahun tahun berjalan sebesar Rp152.821.175,00 serta koreksi faktur berdasarkan hasil reviu SPI No Nota Dinas 450/SPI/11/2017 sebesar Rp13.343.572.611,00, serta koreksi atas faktur piutang yang telah dilakukan evaluasi dan verifikasi yang telah ditetapkan pembatalannya oleh Kantor pengelolaan Lahan sebesar Rp59.980.660.633,00.

A.2. Mutasi Piutang Usaha **Direktorat Pemanfaatan Aset:**

- Penambahan Piutang Usaha Direktorat Pemanfaatan Aset sebesar Rp5.949.869.019,00 berasal dari penerbitan faktur sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.911.732.439,00 dan koreksi kesalahan tipe jurnal atas pelunasan faktur sebesar Rp15.346.980,00 serta reklasifikasi departemen atas kurang catat saldo piutang dari Kantor Pengelolaan Lahan ke Pemanfaatan Aset sebesar Rp22.789.600,00.
- Pengurangan Piutang Usaha Direktorat Pemanfaatan Aset sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp13.715.021.663,00 berasal dari pelunasan faktur sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.995.884.380,00, pelunasan atas faktur sewa gedung, listrik dan lainnya tahun 2016 sebesar Rp15.346.980,00, koreksi pelunasan faktur karena salah type jurnal

sebesar Rp15.346.980,00, koreksi faktur tahun 2016 dikarenakan double penerbitan sebesar Rp95.617.287,00, reklasifikasi saldo piutang usaha ke kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp7.592.826.036,00 berdasarkan Nota Dinas Nomor 358/A.4.2/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan Nota Dinas Nomor 217/A1.2/09/2017 tanggal 12 September 2017.

A.3. Mutasi Piutang Usaha Biro Keuangan:

- Penambahan Piutang Usaha Biro Keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp304.250.366,00 merupakan jumlah pendapatan yang berasal dari selisih kurs piutang royalti pasir.
- Pengurangan Piutang Usaha Biro Keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.012.677.701,00 terdiri dari biaya yang berasal dari selisih kurs piutang royalti pasir sebesar Rp11.240.777,00 dan reklasifikasi piutang usaha ke piutang tidak tertagih berdasarkan Surat SKPBN-09/PUPNC.04/2017 tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp5.001.436.924,00.

A.4. Mutasi Piutang usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana:

- Penambahan Piutang Usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana sebesar Rp2.004.124.330,00 berasal dari penerbitan faktur sewa lahan reklame sebesar Rp1.134.022.570,00 dan Pertamanan dan Penghijauan sebesar Rp870.101.760,00.
- Pengurangan Piutang Usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana sebesar Rp2.323.806.930,00 terdiri dari pelunasan faktur lahan reklame sebesar Rp2.320.386.930,00, dan koreksi faktur sewa lahan reklame sebesar Rp3.420.000,00 periode 1 sampai dengan 31 Desember 2017.

A.5. Mutasi Piutang Kantor Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi:

- Penambahan Piutang Usaha PDSI sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.632.873.600,00 merupakan penerbitan faktur pendapatan training centre.
- Pengurangan Piutang Usaha PDSI sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.480.391.600,00 merupakan pelunasan atas faktur pendapatan data centre.

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang Kantor Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penurunan akumulasi penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 sebesar Rp10.474.986.807,00 (Rp2.468.981.015,00-Rp12.943.967.822,00) terdiri dari beban penyisihan piutang sebesar Rp615.390.548,00, dikurang Cadangan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp274.882.570,00, hasil reklasifikasi piutang usaha ke piutang tidak tertagih sebesar Rp4.856.142.284,00 dan koreksi akumulasi penyisihan piutang Bida Ayu sebesar Rp5.959.352.500,00.

Terhadap piutang Kantor Pengelolaan Lahan tidak dilakukan penyisihan piutang dan seluruhnya diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Hal ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan. Pada butir 6 (4) peraturan dimaksud disebutkan bahwa oleh karena sifatnya. Piutang UWTO tidak diakui penyisihan kerugiannya karena tidak tertagih. Terhadap Piutang UWTO yang tidak tertagih akan dilakukan penarikan terhadap lahan yang dialokasikan dan penyesuaian/koreksi terhadap Piutang UWTO. Selanjutnya terhadap lahan yang ditarik dapat dialokasikan kepada pihak lain.

B. Kantor Air dan Limbah.

Mutasi Piutang Usaha sampai dengan 31 Desember 2017 pada Kantor Air dan Limbah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Kantor Air dan Limbah	240.119.919,00	28.121.008.866,00	28.011.492.794,00	349.635.991,00
Jumlah	240.119.919,00	28.121.008.866,00	28.011.492.794,00	349.635.991,00
Akumulasi penyisihan Piutang	0,00	0,00	10.345.000,00	(10.345.000,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	240.119.919,00			339.290.991,00

- Penambahan Piutang Usaha Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sebesar Rp28.121.008.866,00 berasal dari penerbitan faktur sampai dengan 31 Desember 2017.

- Pengurangan Piutang Usaha Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sebesar Rp28.011.492.794,00 terdiri dari pelunasan faktur sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp27.998.292.793,40 dan koreksi pembatalan faktur pengelolaan KPLI B3 sebesar Rp13.200.000,00.

Koreksi/batal faktur sebesar Rp13.200.000,00 adalah pembatalan faktur tagihan pengelolaan Kawasan KPLI B3 bulan Juni 2017 a.n PT. Greenindo Tritama faktur No. F/000221/AIR/KPLI B3-PK/06/2017 tanggal faktur 9 Juni 2017 dengan luas lahan 50.032 m², karena lahan tersebut ternyata sudah dipecah menjadi beberapa persil dan masing-masing telah ditagih, antara lain:

1. PT. Mega Green seluas 15.753,76 m²
2. PT. Greenindo Tritama seluas 14.382,93 m²
3. PT. Greenindo Tritama seluas 9.200,50 m²
4. PT. Tritunggal Berkah Utama seluas 10.433,90 m²

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang Kantor Air dan Limbah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Akumulasi penyisihan Piutang Usaha per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.345.000,00 adalah akumulasi penyisihan piutang PT. Semesta Citra Alam dan PT. Mitra Harindo, dengan klasifikasi penyisihan Umur piutang 6 s.d 12 Bulan sebesar Rp10.345.000,00

C. BUBU Hang Nadim.

Mutasi Piutang Usaha pada BUBU Hang Nadim sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Kantor Bandara	14.047.479.611,00	100.205.240.583,00	89.832.105.633,00	24.420.614.561,00
Jumlah	14.047.479.611,00	100.205.240.583,00	89.832.105.633,00	24.420.614.561,00
Akumulasi penyisihan Piutang	(6.445.767.782,00)	2.411.214.654,00	484.276.590,00	(4.518.829.718,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	7.601.711.829,00			19.901.784.843,00

- Penambahan Piutang Usaha BUBU Hang Nadim sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp100.205.240.583,00 berasal dari Penerbitan Faktur sebesar Rp98.539.766.917,00, selisih kurs piutang usaha sebesar Rp47.170.556,00

dan Koreksi BK karena salah input sebesar Rp43.467.176,00, Jurnal koreksi nilai piutang usd yang dicatat secara equivalen sebesar Rp 1.365.285.627,00 dan Reklas nilai USD Piutang tidak tertagih sebesar Rp209.550.307,00.

- Pengurangan Piutang Usaha BUBU Hang Nadim sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp89.832.105.633,00 berasal dari pembatalan Faktur sebesar Rp2.910.510.026,00, pelunasan faktur sebesar Rp85.360.030.015,00 dan selisih kurs Piutang sebesar Rp16.324.989,00, Jurnal koreksi nilai piutang usd yang dicatat secara equivalen sebesar Rp 1.317.203.040,00 dan Reklas nilai USD Piutang tidak tertagih sebesar Rp228.037.563,00.

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang BUBU Hang Nadim dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang sebesar Rp1.926.938.064,00 (Rp2.411.214.655,00–Rp484.276.590.083,00) dibandingkan dengan Biaya Penyisihan Piutang Rp107.362.997,00 terdapat selisih yang dikarenakan adanya surplus/defisit tahun lalu akibat Penyisihan Piutang sebesar Rp2.032.414.435,00, dan biaya surplus/defisit tahun lalu pembentukan Cadangan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp1.886.627,00.

D. Kantor Pelabuhan Laut.

Mutasi Piutang Usaha pada Kantor Pelabuhan Laut sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Kantor Pelabuhan Laut	118.105.910.024,00	553.560.411.278,00	528.524.403.891,00	143.141.917.411,00
Jumlah	118.105.910.024,00	553.560.411.278,00	528.524.403.891,00	143.141.917.411,00
Akumulasi penyisihan Piutang	(32.091.922.787,00)	85.490.239,00	33.135.139.874,00	(65.141.572.421,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	86.013.987.23,00			78.000.344.991,00

- Penambahan Piutang Usaha Kantor Pelabuhan Laut sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp553.560.411.278,00 berasal dari penerbitan faktur sebesar Rp446.401.456.967,00, pencatatan hold dana manual sebesar Rp44.647.109.327,00 adalah pencatatan dana yang ditahan di rekening pengguna jasa atas kegiatan jasa kepelabuhananan, pencatatan pendapatan

sebesar Rp26.295.949.042,00 adalah pencatatan atas jasa kepelabuhanan yang belum masuk kedalam sistem, pencatatan pendapatan piutang denda sebesar Rp1.088.358.257,00 adalah normalisasi akun piutang untuk pencatatan denda tahun lalu, piutang KSO sebesar Rp28.303.371.704,00, pencatatan jurnal manual atas pencatatan selisih kurs sebesar Rp6.584.013.345,00, reklas piutang usaha ke penerimaan sementara sebesar Rp1.971.138,00, pencatatan jurnal pembalik untuk koreksi atas kesalahan posisi debit dan kredit sebesar Rp193.976.966,00, dan jurnal pembalik atas pelunasan faktur yang diserahkan ke KPKNL sebesar Rp44.204.532,00.

- Pengurangan Piutang Usaha Kantor Pelabuhan Laut sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp528.524.403.891,00 berasal dari pelunasan faktur sebesar Rp380.033.067.958,00, koreksi faktur sebesar Rp37.171.278.939,00, reklas pencatatan dana yang ditahan di rekening pengguna jasa atas kegiatan jasa kepelabuhanan sebesar Rp44.647.109.327,00, jurnal balik pencatatan denda sebesar Rp928.301.066,00, jurnal balik pencatatan piutang KSO sebesar Rp27.016.267.854,00, jurnal balik pencatatan piutang atas jasa kepelabuhanan yang belum masuk kedalam sistem sebesar Rp26.295.949.042,00, jurnal balik pencatatan piutang tak tertagih sebesar Rp39.141.168,00, pelunasan menggunakan penerimaan sementara Rp4.564.675.772,00, pencatatan selisih kurs sebesar Rp3.797.215.688,00, pencatatan koreksi kelebihan tagih sebesar Rp3.906.902.542,00, jurnal manual pelunasan piutang yang sudah diserahkan ke KPKNL sebesar Rp8.715.465,00, koreksi nilai piutang PT. Indo Dharma Corpora sesuai Berita Acara 01/A3.2/03/2017 sebesar Rp113.941.598,00, dan jurnal pengganti untuk pemakaian penerimaan sementara PT. Pasada Artha Cargo sesuai EV 020170502709 sebesar Rp1.837.470,00.

Dari saldo Piutang Usaha Kantor Pelabuhan Laut tersebut, termasuk piutang KSO sebesar Rp3.005.737.150,00 terdiri dari nilai IDR sebesar Rp1.942.529.637,00 dan USD78.802,81 (Ekuivalen USD = Rp1.063.207.513,00) dan tagihan kepada PT. Indodharma Corpora sebesar Rp63.823.138.109,00 yang merupakan tagihan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Tagihan kepada PT. Indodharma Corpora merupakan hak Kantor Pelabuhan Laut atas kerjasama pengoperasian Terminal Pelabuhan Internasional Sekupang sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor12/PERJ-KA/VIII/2004 dan 111/DC-OB/SP/BOT-SKP/VIII/2004 tanggal

20 Agustus 2004 diadendum Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 tanggal 11 Januari 2010. Adendum dilakukan sehubungan dengan kesulitan PT. Indodharma Corpora mengembalikan investasi sehingga masa kontrak diperpanjang dari 15 tahun menjadi 28 tahun. Akibat ketidakseriusan PT. Indodharma Corpora dalam penyelesaian kewajibannya, Anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha menerbitkan Surat Perintah Nomor 133/A3/5/2016 tanggal 24 Mei 2016 untuk mengevaluasi perjanjian kerjasama dengan PT. Indodharma Corpora.

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang Kantor Pelabuhan Laut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp65.141.572.420,81 Pengurangan nilai Akumulasi Penyisihan Piutang karena ada pembayaran piutang dari PT. Sumatera Bukit Mas dan PT. Dahlia Bina Utama sebesar Rp85.490.239,25, dan Penambahan nilai Akumulasi Penyisihan Piutang karena Penambahan pencatatan biaya penyisihan sebesar Rp33.135.139.873,54.

E. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.

Mutasi Piutang Usaha pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
RSBP	17.056.833.463,00	79.898.713.464,00	53.768.483.357,00	43.187.063.570,00
Jumlah	17.056.833.463,00	79.898.713.464,00	53.768.357,00	43.187.063.570,00
Akumulasi penyisihan Piutang	(6.870.051.958,00)	4.208.553.630,00	6.215.345.437,00	(8.876.843.765,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	10.186.781.505,00			34.310.219.805,00

- Penambahan Piutang Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sebesar Rp79.898.713.464,00 terdiri dari penambahan Piutang Perusahaan sebesar Rp77.173.392.463,00 dan Piutang Usaha Perorangan sebesar Rp293.614.644,00, koreksi piutang usaha perusahaan sebesar Rp2.313.825.675,00 dan pendapatan denda sebesar Rp117.880.682,00



- Pengurangan Piutang Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sebesar Rp53.768.483.357,00 terdiri dari pelunasan Piutang Usaha Perusahaan sebesar Rp45.410.143.222,00, pelunasan Piutang Usaha Perorangan sebesar Rp136.959.727, koreksi faktur terbit piutang perusahaan sebesar Rp8.105.136.000,00 dan reklas pendapatan denda sebesar Rp116.244.408,00.

Eliminasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dikarenakan sudah tidak ada saldo piutang karyawan Badan Pengusahaan Batam yang merupakan biaya pengobatan karyawan yang masih harus dibayar pada Kantor Pusat yang dieliminasi terhadap Piutang Usaha pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang RSOB dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Akumulasi Penyisihan Piutang 31 Desember 2017 sebesar Rp6.215.345.437,00 berasal dari bertambahnya jumlah piutang dengan peningkatan umur piutang yang dihitung berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan sebesar Rp3.629.768.487,00 dan biaya penyisihan setelah koreksi BPK atas piutang BPJS sebesar Rp2.585.576.950,00.

Pengurangan Akumulasi Penyisihan Piutang Tahun 2017 sebesar Rp4.208.553.630,00 merupakan koreksi biaya penyisihan per 31 Desember 2017.

Kualitas Piutang Usaha

Kualitas Piutang Usaha Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)	Umur Piutang (Bulan) (Rp)				
		0 - 6	6 - 12	12 - 18	18 - 24	>24
Kantor Pusat	3.428.413.076,00	600.023.339,00	266.799.280,00	251.118.524,00	135.000.000,00	2.175.471.933,00
Kantor Air dan Limbah	349.635.991,00	308.255.991,00	41.380.000,00	0,00	0,00	0,00



Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)	Umur Piutang (Bulan) (Rp)				
		0 - 6	6 - 12	12 - 18	18 - 24	>24
BUBU Hang Nadim	24.420.614.561,00	17.683.629.994,00	1.871.625.743,00	631.502.028,00	1.994.738.113,00	2.239.118.683,00
Kantor Pelabuhan Laut	143.141.917.411,00	45.039.216.026,00	24.245.021.633,00	1.425.308.890,00	56.258.832.958,00	16.173.537.904,00
Rumah Sakit BP	43.187.063.570,00	28.950.383.096,00	6.907.322.941,00	249.965.818,00	217.446.374,00	6.861.945.341,00
Jumlah	214.527.644.609,00	92.581.508.446,00	33.332.149.597,00	2.557.895.260,00	58.606.017.445,00	27.450.073.861,00

Terhadap piutang Kantor Pengelolaan Lahan dan Direktorat Pemanfaatan Aset (Piutang UWTO KSB) tidak dilakukan penyisihan piutang dan seluruhnya diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Hal ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan. Pada butir 6 (4) peraturan dimaksud disebutkan bahwa oleh karena sifatnya. Piutang UWTO tidak diakui penyisihan kerugiannya karena tidak tertagih. Terhadap Piutang UWTO yang tidak tertagih akan dilakukan penarikan terhadap lahan yang dialokasikan dan penyesuaian/koreksi terhadap Piutang UWTO. Selanjutnya terhadap lahan yang ditarik dapat dialokasikan kepada pihak lain.

*Penyisihan
Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU*

D.1.6. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp81.016.571.919,00 dan Rp58.351.710.348,00 yang terdiri dari :

Uraian	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
Kantor Pusat	2.468.981.015,00	12.943.967.822,00
Kantor Air dan Limbah	10.345.000,00	0,00
BUBU Hang Nadim	4.518.829.718,00	6.445.767.782,00
Kantor Pelabuhan Laut	65.141.572.421,00	32.091.922.786,00
Rumah Sakit BP Batam	8.876.843.765,00	6.870.051.958,00
Jumlah	81.016.571.919,00	58.351.710.348,00

Persediaan

D.1.7. Persediaan

Persediaan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp16.260.345.536,00 dan Rp13.613.091.866,00 terdiri dari:



Jenis Persediaan	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)	31 Desember 2016 (Rp) (Audited)
Barang Konsumsi	2.398.287.356,00	0,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	30.473.800,00	0,00
Suku Cadang	2.316.152.720,00	1.685.407.260,00
Pita Cukai, Materai dan Legas	278.000,00	0,00
Bahan Baku	734.077.289,00	460.172.175,00
Persediaan Lainnya	10.781.076.371,00	32.664.370,00
Alat Tulis Kantor	0,00	1.420.401.565,00
Bahan Cetakan	0,00	413.154.391,00
Barang Kelontong	0,00	16.265.428,00
Bahan Untuk Operasional Lainnya	0,00	15.630.000,00
Obat	0,00	9.248.410.127,00
Bahan Bangunan dan Alat Listrik	0,00	320.986.550,00
JUMLAH	16.260.345.536,00	13.613.091.866,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 11).

Rincian Persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.260.3445.536,00 berdasarkan unit terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	1.513.994.991,00
2	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	49.093.580,00
3	BUBU Hang Nadim	1.338.417.611,00
4	Kantor Pelabuhan Laut	69.843.175,00
5	Rumah Sakit BP Batam	13.241.678.729,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	47.317.450,00
	Jumlah	16.260.345.536,00

Saldo Laporan Persediaan Rumah Sakit BP Batam sebesar Rp13.241.678.729,00 tersebut diatas merupakan saldo Persediaan berdasarkan Aplikasi Persediaan sampai dengan 31 Desember 2017 yang belum termasuk dengan Persediaan Obat Kadaluarsa sebesar Rp395.816.275,00 dalam kondisi rusak.

Mutasi penambahan dan pengurangan Persediaan sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	2.144.699.413,00	13.682.556.236,00	13.428.968.293,00	2.398.287.356,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	52.426.470,00	962.203.490,00	984.156.160,00	30.473.800,00
Suku Cadang	1.685.612.760,00	1.603.283.500,00	972.743.540,00	2.316.152.720,00



Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Pita Cukai, Materai dan Legas	942.500,00	3.992.000,00	4.656.500,00	278.000,00
Bahan Baku	480.877.603,00	1.326.952.575,00	1.073.752.889,00	734.077.289,00
Persediaan Lainnya	9.248.533.120,00	124.930.595.365,00	123.398.052.114,00	10.781.076.371,00
Jumlah	13.613.091.866,00	142.509.583.166,00	139.862.329.496,00	16.260.345.536,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan Barang Konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp13.682.556.236,00 terdiri dari pembelian barang konsumsi sebesar Rp13.541.525.952,00, koreksi penyesuaian persediaan sebesar Rp105.315.343,00, serta hasil opname fisik sebesar Rp35.729.941,00.
- Pengurangan Barang Konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp13.428.968.239,00 terdiri dari pemakaian Barang Konsumsi sebesar Rp2.663.026.362,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp10.765.941.931,00.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan Bahan untuk Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp962.203.490,00 terdiri dari pembelian Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp948.351.475,00 dan koreksi penyesuaian persediaan sebesar Rp9.532.015,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp4.320.000,00.
- Pengurangan Bahan untuk Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp984.156.160,00 terdiri dari pemakaian Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp367.378.205,00, dan Hasil Opname Fisik sebesar Rp616.777.955,00.

c. Suku Cadang

- Penambahan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.603.283.500,00 merupakan pembelian suku cadang .
- Pengurangan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar



Rp972.743.540,00 terdiri dari pemakaian suku cadang sebesar Rp501.010.040,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp471.733.500,00.

d. Pita Cukai, Materai dan Legas

- Penambahan pita cukai, materai dan legas sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.992.000,00 terdiri dari pembelian sebesar Rp3.950.000,00 dan hasil opname fisk sebesar Rp42.000,00.
- Pengurangan pita cukai, materai dan legas sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.656.500,00 terdiri dari pemakaian pita cukai, materai dan legas sebesar Rp3.187.500,00, koreksi penyesuaian persediaan sebesar Rp1.309.000,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp160.000,00.

e. Bahan Baku

- Penambahan Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.326.952.575,00 merupakan pembelian Bahan Baku.
- Pengurangan Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.0373.752.889,00 terdiri dari pemakaian persediaan Bahan Baku sebesar Rp767.534.467,00, koreksi penyesuaian persediaan sebesar Rp10.049.475,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp296.168.947,00.

f. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp124.930.595.365,00 terdiri dari pembelian persediaan lainnya sebesar Rp117.896.031.055,00, dan koreksi penyesuaian persediaan sebesar Rp7.034.564.310,00.
- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp123.398.052.114,00 terdiri dari pemakaian persediaan persediaan lainnya sebesar Rp28.310.843.311,00, hasil opname fisik sebesar Rp95.029.367.004,00 dan barang rusak sebesar Rp57.841.799,00.



D.1.7.1 Kantor Pusat

Persediaan Kantor Pusat per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.513.994.991,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	1.397.402.891,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	7.742.000,00
4	Pita Cukai, Materai dan Legas	182.000,00
5	Bahan Baku	108.668.100,00
6	Persediaan Lainnya	0,00
	Jumlah	1.513.994.991,00

Mutasi penambahan dan pengurangan Persediaan sampai dengan 31 Desember 2017 pada Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	1.620.117.548,00	7.480.698.046,00	7.703.412.703,00	1.397.402.891,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	1.392.550,00	456.374.415,00	450.024.965,00	7.742.000,00
Suku Cadang	918.000,00	34.783.500,00	35.701.500,00	0,00
Pita Cukai, Materai dan Legas	942.500,00	3.596.000,00	4.356.500,00	182.000,00
Bahan Baku	1.008.500,00	600.161.500,00	492.501.900,00	108.668.100,00
Persediaan Lainnya	0,00	98.689.000,00	98.689.000,00	0,00
Jumlah	1.624.379.098,00	8.674.302.461,00	8.784.686.568,00	1.513.994.991,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan Barang Konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.480.698.046,00 terdiri dari pembelian barang konsumsi sebesar Rp7.342.576.002,00, koreksi otomatis sebesar Rp105.315.343,00, serta hasil opname fisik sebesar Rp32.806.701,00.
- Pengurangan Barang Konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.703.412.703,00 terdiri dari pemakaian Barang Konsumsi sebesar Rp7.405.336.765,00, koreksi kurang sebesar Rp15.000,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp298.062.945,00.



b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan Bahan untuk Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp456.807.400,00 terdiri dari pembelian Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp446.807.400,00 dan koreksi otomatis sebesar Rp9.567.015,00.
- Pengurangan Bahan untuk Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp450.024.965,00 terdiri dari pemakaian Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp448.639.965,00, koreksi kurang sebesar Rp35.000,00 dan Hasil Opname Fisik sebesar Rp1.350.000,00.

c. Suku Cadang

- Penambahan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp34.783.500,00 merupakan pembelian suku cadang .
- Pengurangan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp35.701.500,00 merupakan pemakaian suku cadang.

d. Pita Cukai, Materai dan Legas

- Penambahan pita cukai, materai dan legas sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.596.000,00 terdiri dari pembelian sebesar Rp3.554.000 dan hasil opname fisk sebesar Rp42.000,00
- Pengurangan pita cukai, materai dan legas sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.356.500,00 terdiri dari pemakaian pita cukai, materai dan legas sebesar Rp3.005.500,00 koreksi otomatis sebesar Rp1.309.000,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp42.000,00.

e. Bahan Baku

- Penambahan Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp600.161.500,00 merupakan pembelian Bahan Baku.
- Pengurangan Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp492.501.900,00 terdiri dari pemakaian persediaan Bahan Baku sebesar Rp457.857.080,00 koreksi otomatis sebesar Rp10.049.475,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp24.595.345,00.



f. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp98.689.000,00 terdiri dari pembelian persediaan lainnya sebesar Rp98.689.000,00.
- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp98.689.000,00 terdiri dari pemakaian persediaan persediaan lainnya.

D.1.7.2 Kantor Air dan Pengelolaan Limbah

Persediaan Kantor Air dan Pengelolaan Limbah per 31 Desember 2017 sebesar R49.093.580,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	49.061.980,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	31.600,00
	Jumlah	49.093.580,00

Mutasi penambahan dan pengurangan Persediaan sampai dengan 31 Desember 2017 pada Kantor Air dan Limbah adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	30.093.500,00	152.732.900,00	133.764.420,00	49.061.980,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00	2.342.800,00	2.311.200,00	31.600,00
Jumlah	30.093.500,00	155.075.700,00	136.075.620,00	49.093.580,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sebesar Rp152.732.900,00 merupakan pembelian barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan barang konsumsi sebesar Rp133.764.420,00 merupakan pemakaian barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan barang untuk pemeliharaan sebesar Rp2.342.800,00



merupakan pembelian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2017.

- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp2.311.200,00 merupakan pemakaian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2017.

D.1.7.3 BUBU Hang Nadim

Persediaan BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.338.417.611,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)
1	Konsumsi	721.373.890,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	6.200.200,00
3	Suku Cadang	10.348.000,00
4	Bahan Baku	600.495.521,00
	Jumlah	1.338.417.611,00

Mutasi penambahan dan pengurangan Persediaan sampai dengan 31 Desember 2017 pada BUBU Hang Nadim adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited)
		Penambahan	Pengurangan	
Konsumsi	307.617.600,00	2.821.673.800,00	2.407.917.510,00	721.373.890,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	2.658.920,00	11.596.700,00	8.055.420,00	6.200.200,00
Suku Cadang	12.736.000,00	138.526.250,00	140.914.250,00	10.348.000,00
Bahan Baku	460.172.175,00	619.927.500,00	479.604.154,00	600.495.21,00
Jumlah	783.184.695,00	3.591.724.250,00	3.036.491.334,00	1.338.417.611,00

a. Konsumsi

- Penambahan konsumsi sebesar Rp2.821.673.800,00 merupakan pembelian konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan konsumsi sebesar Rp2.407.917.510,00 merupakan pemakaian konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp11.596.700,00 merupakan pembelian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2017.



- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp8.055.420,00 merupakan pemakaian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2017.

c. Suku Cadang

- Penambahan suku cadang sebesar Rp138.526.250,00 merupakan pembelian persediaan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan suku cadang sebesar Rp140.914.250,00 merupakan pemakaian persediaan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2017.

d. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sebesar Rp619.927.500,00 merupakan pembelian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan bahan baku sebesar Rp479.604.154,00 merupakan pemakaian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2017.

D.1.7.4 Kantor Pelabuhan Laut

Persediaan pelabuhan Laut per 31 Desember 2017 sebesar Rp69.843.175,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)
1	Konsumsi	69.843.175,00
2	Bahan Baku	0,00
	Jumlah	69.843.175,00

Mutasi penambahan dan pengurangan Persediaan sampai dengan 31 Desember 2017 pada Kantor Pelabuhan Laut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited)
		Penambahan	Pengurangan	
Konsumsi	47.249.675,00	1.742.791.750,00	1.720.198.250,00	69.843.175,00
Bahan Baku	4.806.000,00	0,00	4.806.000,00	0,00
Jumlah	52.055.675,00	1.742.791.750,00	1.725.004.250,00	69.843.175,00

a. Konsumsi

- Penambahan konsumsi sebesar Rp1.742.791.750,00 merupakan pembelian konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan konsumsi sebesar Rp1.720.198.250,00 merupakan



pemakaian konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017.

b. Bahan Baku

- Pengurangan bahan baku sebesar Rp4.806.000,00 merupakan pemakaian konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017.

D.1.7.5 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Persediaan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.241.678.730,00, terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)
1	Konsumsi	113.633.970,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	16.500.000,00
3	Suku Cadang	2.305.554.720,00
4	Bahan Baku	24.913.668,00
5	Persediaan Lainnya	11.176.892.647,00
6	Jumlah	13.637.495.005,00
7	Persediaan Obat yang sudah kadaluarsa	395.816.275,00
8	Jumlah (6 - 7)	13.241.678.730,00

Total nilai Barang Persediaan dalam kondisi Usang dan Rusak pada Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp395.816.275,00 yang merupakan Barang Rusak berupa Obat-Obat an yang telah kadaluarsa (*Expired*) pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam.

Mutasi penambahan dan pengurangan Persediaan sampai dengan 31 Desember 2017 pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited)
		Penambahan	Pengurangan	
Konsumsi	100.752.140,00	1.361.428.140,00	1.348.546.310,00	113.633.970,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	48.000.000,00	489.514.575,00	521.014.575,00	16.500.000,00
Suku Cadang	1.671.771.260,00	1.429.723.750,00	795.940.290,00	2.305.554.720,00
Bahan Baku	14.890.928,00	106.863.575,00	96.840.835,00	24.913.668,00
Persediaan Lainnya	9.586.382.597,00	124.824.271.365,00	123.233.761.315,00	11.176.892.647,00
Obat Kadaluarsa	(337.974.477,00)	0,00	57.841.799,00	(395.816.276,00)
Nilai Bersih Persediaan Lainnya	9.248.408.120,00	124.824.271.365,00	123.291.603.114,00	10.781.076.371,00
Jumlah	11.083.822.448,00	128.211.801.405,00	126.053.945.124,00	13.241.678.729,00



a. Konsumsi

- Penambahan konsumsi sebesar Rp1.361.428.140,00 terdiri dari pembelian konsumsi sebesar Rp1.359.854.900,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp1.573.240,00 samapai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan konsumsi sebesar Rp1.348.546.310,00 merupakan pemakaian konsumsi dan hasil opname fisik sebesar Rp1.573.240,00 sampai dengan 31 Desember 2017.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp489.514.575,00 terdiri sebesar Rp485.194.575 merupakan pembelian bahan untuk pemeliharaan dan hasil opname fisik sebesar Rp4.320.000,00 sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp521.014.575,00 merupakan pemakaian bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp438.153.595 dan Hasil Opname Fisik sebesar Rp82.860.980,00.

c. Suku cadang

- Penambahan suku cadang sebesar Rp1.429.723.750,00 merupakan pembelian suku cadang sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan suku cadang sebesar Rp795.940.290,00 merupakan pemakaian suku cadang sampai dengan 31 Desember 2017.

d. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sebesar Rp106.863.575,00 merupakan pembelian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan bahan baku sebesar Rp96.840.835,00 merupakan pemakaian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2017.

e. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sebesar Rp124.824.271.365,00 terdiri dari pembelian obat dan obat/material habis pakai sebesar Rp117.789.707.055,00 dan koreksi otomatis sebesar Rp7.034.564.310,00 sampai dengan 31 Desember 2017.



- Pengurangan persediaan lainnya sebesar Rp123.291.603.114,00 terdiri dari pemakaian persediaan lainnya sebesar Rp13.426.860,00, barang rusak sebesar Rp57.841.799,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp123.220.334.455,00.

D.1.7.6 Kantor Perwakilan Jakarta

Persediaan Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2017 sebesar Rp47.317.450,00 terdiri dari:

NO	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)
1	Konsumsi	46.971.450,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00
3	Suku Cadang	250.000,00
4	Pita Cukai. Materai dan Legas	96.000,00
5	Persediaan Lainnya	0,00
	Jumlah	47.317.450,00

Mutasi penambahan dan pengurangan Persediaan sampai dengan 31 Desember 2017 pada Kantor Perwakilan Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2017 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2017 (Audited)
		Penambahan	Pengurangan	
Konsumsi	38.868.950,00	123.246.600,00	115.144.100,00	46.971.450,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	375.000,00	2.410.000,00	2.785.000,00	0,00
Suku Cadang	187.500,00	250.000,00	187.500,00	250.000,00
Pita Cukai. Materai dan Legas	0,00	396.000,00	300.000,00	96.000,00
Persediaan Lainnya	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Jumlah	39.556.450,00	126.302.600,00	118.541.600,00	47.317.450,00

a. Konsumsi

- Penambahan konsumsi sebesar Rp123.246.600,00 merupakan pembelian konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan konsumsi sebesar Rp115.144.100,00 merupakan pemakaian konsumsi sampai dengan 31 Desember 2017.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp2.410.000,00 merupakan pembelian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2017.



- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp2.785.000,00 merupakan pemakaian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2017.

c. Suku cadang

- Pengurangan suku cadang sebesar Rp250.000,00 merupakan pemakaian suku cadang sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan suku cadang sebesar Rp187.500,00 merupakan pemakaian suku cadang sampai dengan 31 Desember 2017.

d. Pita Cukai, Materai dan Legas

- Penambahan pita cukai, materai dan legas sebesar Rp396.000,00 merupakan pembelian sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pengurangan pita cukai, materai dan legas sebesar Rp300.000,00 merupakan pemakaian sampai dengan 31 Desember 2017.

d. Persediaan Lainnya

- Pengurangan persediaan Lainnya sebesar Rp125.000,00 merupakan pemakaian persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2017.

Aset Tetap D.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp27.114.042.260.710,00 dan Rp26.871.330.169.176,00 terdiri dari:

Uraian Aktiva Tetap	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Tanah	21.830.341.424.135,00	21.691.054.309.935,00
Peralatan dan Mesin	1.063.527.969.569,00	904.983.356.437,00
Gedung dan bangunan	1.062.442.964.853,00	897.784.488.377,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.405.404.216.665,00	7.566.635.441.272,00
Aset tetap lainnya	14.901.552.509,00	14.848.929.309,00
Konstruksi dalam pengerjaan	426.717.114.669,00	179.767.524.217,00
Jumlah Aset Tetap	31.803.335.242.400,00	31.255.074.049.547,00
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	743.101.607.819,00	640.058.739.989,00
Gedung dan bangunan	171.837.704.041,00	155.586.685.668,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.751.983.407.915,00	3.587.751.256.964,00
Aset tetap lainnya	473.027.250,00	347.197.750,00
Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan	4.667.395.747.025,00	4.383.743.880.371,00
Tanah	21.830.341.424.135,00	21.691.054.309.935,00



Uraian Aktiva Tetap	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Peralatan dan Mesin	320.426.361.750,00	264.924.616.448,00
Gedung dan bangunan	890.605.260.812,00	742.197.802.709,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.653.420.808.750,00	3.978.884.184.308,00
Aset tetap lainnya	14.428.525.259,00	14.501.731.559,00
Aset dalam pengerjaan	426.717.114.669,00	179.767.524.217,00
Nilai Buku Aset tetap	27.135.939.495.375,00	26.871.330.169.176,00

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tanah

D.2.1. Tanah

Saldo Tanah Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017 sebesar Rp21.830.341.424.135,00 (Rincian Tanah dapat dilihat pada lampiran 12).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 114.559.181m² dengan nilai sebesar Rp21.691.054.309.935,00. dengan mutasi tambah sebesar Rp142.293.179.768,00 dan mutasi kurang Rp3.006.065.568,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	21.691.054.309.935,00
Mutasi Tambah	
- Saldo Awal	141.893.049.000,00
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	203.559.768,00
- Pengembangan Nilai Aset	196.571.000,00
Total Mutasi Tambah	142.293.179.768,00
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi Keluar	203.559.768,00
- Koreksi Pencatatan	2.802.505.800,00
Total Mutasi Kurang	3.006.065.568,00
Total Saldo Akhir	21.830.341.424.135,00

Mutasi Tambah:

- Saldo Awal sebesar Rp141.893.049.000,00 merupakan hasil penilaian dari KPKNL Batam;
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp203.559.768,00 merupakan rekalsifikasi KDP ke Tanah (UPKPB Lahan/HPL Selesai);
- Pengembangan Nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp196.571.000,00 merupakan transaksi belanja modal yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap nilai aset yang sudah tercatat sebelumnya;



Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp203.559.768,00 merupakan koreksi perubahan kode barang pada UPKPB Kantor Pengelolaan Lahan menjadi Aset lainnya (HPL).
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp2.802.505.800,00 merupakan koreksi Pencatatan (*double* Catat) atas BMN Tidak Ditemukan dari hasil Revaluasi BMN 2017.

Peralatan dan Mesin **D.2.2. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.063.527.969.569,00 ([Rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada lampiran 13](#)).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp904.983.356.437,00 dengan mutasi tambah sebesar Rp194.311.711.413,00 dan mutasi kurang Rp35.767.098.281,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		904.983.356.437,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	40.669.047.211,00
-	Transfer Masuk	4.490.200.000,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	80.341.883.400,00
-	Reklasifikasi Masuk	50.475.309.843,00
-	Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan	9.369.835.000,00
-	Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	179.270.000,00
-	Pengembangan Nilai Aset	1.098.641.518,00
-	Pengembangan Melalui KDP	3.090.842.000,00
-	Hibah Tidak Terikat	4.596.682.441,00
Total Mutasi Tambah		194.311.711.413,00
Mutasi Kurang		
-	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	29.655.300.287,00
-	Reklasifikasi Keluar	62.391.300,00
-	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.049.406.694,00
Total Mutasi Kurang		35.767.098.281,00
Total Saldo Akhir		1.063.527.969.569,00



Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp40.669.047.211,00 merupakan pembelian Aset yang berasal dari sumber dana PNBPN;
- Transfer Masuk sebesar Rp4.490.200.000,00 merupakan Alih Status dari Kementerian Perindustrian RI ke Biro Umum sesuai dengan BA nomor 659/ILMATE/11/2016;
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp80.341.883.400,00 merupakan transaksi belanja modal reklasifikasi dari KDP ke Peralatan dan Mesin;
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp50.475.309.843,00 merupakan reklasifikasi dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas yang masuk ke Peralatan dan Mesin;
- Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan sebesar Rp9.369.835.000,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga ke Peralatan dan Mesin.
- Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp179.270.000,00 pada UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta terdapat penggunaan kembali BMN yang dihentikan, yang merupakan reklasifikasi dari Aset yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah ke Peralatan dan Mesin.
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.098.641.518,00 merupakan transaksi belanja modal yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap nilai aset yang sudah tercatat sebelumnya.
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp3.090.842.000,00 merupakan transaksi belanja modal yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap nilai aset KDP yang sudah tercatat sebelumnya.
- Hibah Tidak Terikat sebesar Rp4.596.682.441,00 terdiri dari Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.986.447.441,00 pada RSBP Batam dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Kesehatan) Nomor 37/NPHD/II/2016 dan hibah atas trolley sebesar Rp610.235.000,00 pada BUBU Hang Nadim dari PT. Bank Negara Indonesia sebanyak 100 unit Surat Perjanjian Kerjasama Nomor BTM/5/1083-2017 tanggal 18 Mei 2017 dan dari PT. Bank Mandiri



sebanyak 100 unit Surat Perjanjian Hibah Nomor 877/A3/4/2017 tanggal 4 April 2017.

Mutasi Kurang:

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp29.655.300.287,00 merupakan koreksi terhadap nilai aset yang berasal dari penyelesaian Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp62.391.300,00 merupakan Merupakan Koreksi Perubahan Kode Barang Pada UPKPB Direktorat Pengamanan sesuai dengan BA Koreksi Perubahan Nomor: 003/A5.4/10/2017;
- Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset yang dihentikan sebesar Rp6.049.406.694,00 terdiri dari:
 - a. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) Pada UPKPB Biro Umum sesuai dengan BA nomor 01/ASET/2/2017 sebesar Rp2.522.485.980,00 dan BA nomor 02/A1.1/7/2017 sebesar Rp 1.280.040.000,00;
 - b. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) Pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai dengan BA nomor BA/7/A4.3/5/17 sebesar Rp641.867.458,00;
 - c. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) Pada UPKPB Bandar Udara sesuai dengan BA nomor 01/PKBMN-BHN/7/2017 sebesar Rp123.635.000,00;
 - d. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) Pada UPKPB Kantor Pelabuhan Laut sesuai dengan BA nomor BA/09/A3.24/8/2017 sebesar Rp1.128.527.256,00, dan BA nomor BA/10/A3.24/10/17 sebesar Rp352.851.000,00.

*Gedung dan
Bangunan*

D.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.062.442.964.853,00. (Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada lampiran 14).

Terdapat aset tetap pada Biro Umum yang masih dalam sengketa dengan pihak lain senilai Rp378.000.000,00 berupa Bangunan Lantai Jemur Permanen di



Lokasi Pantai Melur-Galang. Kondisi bangunan tersebut telah dihancurkan oleh Pihak Ketiga dalam hal ini PT. Glory Point, sehingga kondisi aset tersebut dalam keadaan rusak berat. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Aset Bangunan Lantai Jemur permanen akan diusulkan penghapusannya dikarenakan sudah tidak memiliki masa manfaat dan nilai ekonomis sesuai dengan penjelasan Kepala Biro Umum dan sesuai dengan surat atas nama Kepala BP Batam Anggota 4/Deputi Bidang Sarana Lainnya nomor B/273/A4/5/2017 perihal laporan tanggal 10 Mei 2017.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp897.784.488.377,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp252.225.147.199,00 dan mutasi kurang sebesar Rp87.566.670.723,00.

Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	897.784.488.377,00
Mutasi Tambah	
- Pembelian	1.246.648.580,00
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	121.768.354.651,00
- Reklasifikasi Masuk	66.429.342.278,00
- Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan	407.564.240,00
- Pengembangan Nilai Aset	3.243.604.690,00
- Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	24.231.162.000,00
- Pengembangan Melalui KDP	18.353.178.779,00
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	16.545.291.981,00
Total Mutasi Tambah	252.225.147.199,00
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	27,118,733,955,00
- Koreksi Pencatatan	18.666.028.924,00
- Penghapusan	2.133.243.758,00
- Reklasifikasi Keluar	39.648.664.086,00
Total Mutasi Kurang	87.566.670.723,00
Saldo Akhir	1.062.442.964.853,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp1.246.648.580,00 terdiri dari pembelian aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari sumber dana PNBPN;
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp121.768.354.651,00 merupakan transaksi belanja modal reklasifikasi dari KDP ke Gedung dan



Bangunan;

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp66.429.342.278,00 merupakan reklasifikasi dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas dan koreksi pencatatan;
- Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan sebesar Rp407.564.240,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga ke Gedung dan Bangunan;
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp3.243.604.690,00 merupakan transaksi belanja modal yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap nilai aset yang sudah tercatat sebelumnya.
- Barang berlebih hasil Inventarisasi sebesar Rp24.231.162.000,00 merupakan hasil revaluasi yang terdiri dari:
 - a. Hasil revaluasi sebesar Rp1.298.364.000,00 sesuai dengan BAR IP nomor: UPKPB BIRO UMUM BAR-IP-126/WKN.03/KNL.04/2017;
 - b. Hasil revaluasi sebesar Rp22.932.798.000,00 UPKPB BANDARA BAR - IP-113/WKN.03/KNL.04/2017.
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp18.353.178.779,00 merupakan transaksi belanja modal reklasifikasi dari KDP ke Gedung dan bangunan yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap Nilai Aset yang sudah tercatat sebelumnya.
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp16.545.291.981,00 merupakan koreksi terhadap nilai Aset yang berasal dari KDP.

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp27.118.733.955,00 terdiri dari:
 - a. Penghentian aset (aset yang tidak digunakan) sebesar Rp851.363.500,00 pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai Surat Keputusan (SK) nomor: 299 Tahun 2016;
 - b. Penghentian aset (aset yang tidak digunakan) sebesar Rp1.748.106.555,00 merupakan penghentian aset dan akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Biro Umum;



- c. Penghentian aset (aset yang tidak digunakan) sebesar Rp19.631.231,00 merupakan penghentian aset dan akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Dir. Pembangunan Sarana dan Prasarana;
- d. Penghentian aset (aset yang tidak digunakan) sebesar Rp269.390.000,00 merupakan penghentian aset dan akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB RSBP Batam
- e. Penghentian aset (aset yang tidak digunakan) sebesar Rp35.74.000,00 merupakan penghentian aset dan akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB BUBU Hang Nadim;
- f. Penghentian aset (aset yang tidak digunakan) sebesar Rp18.758.596.000,00 merupakan penghentian aset dan akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah;
- g. Penghentian aset (aset yang tidak digunakan) sebesar Rp5.435.972.669,00 merupakan penghentian aset dan akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Kantor Pelabuhan Laut;
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp18.666.028.924,00 merupakan koreksi perubahan kodefikasi barang .
- Penghapusan sebesar Rp2.133.243.758,00 yang terdiri dari:
 - a. Penghapusan Aset pada UPKPB Rumah sebesar Rp1.986.243.758,00 Rumah Sakit sesuai dengan SK Kepala BP Batam nomor 453 Tahun 2017;
 - b. Penghapusan Aset pada UPKPB Direktorat Pengamanan sebesar Rp147.000.000,00 sesuai dengan SK Kepala BP Batam nomor 299 Tahun 2017.
- Reklasifikasi keluar merupakan koreksi perubahan kodefikasi sebesar Rp39.648.664.086 terdiri dari:
 - a. Koreksi perubahan kodefikasi sebesar Rp605.997.476,00 pada UPKPB RSBP Batam;
 - b. Koreksi perubahan kodefikasi sebesar Rp39.019.033.610,00 terdiri dari koreksi perubahan kodefikasi ke gedung dan bangunan Rp38.270.233.034,00 dan ke peralatan dan mesin sebesar Rp748.800.576,00 pada UPKPB BUBU Hang Nadim;



- c. Koreksi perubahan kodefikasi sebesar Rp23.633.000,00 merupakan pada UPKPB Kantor Pelabuhan Laut

Jalan, Irigasi dan Jaringan

D.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 7.405.404.216.665,00 ([Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada lampiran 15](#)).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp7.566.592.635.272,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp29.065.529.590,00 dan mutasi kurang sebesar Rp190.296.754.197,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		7.566.635.441.272,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	732.479.000,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	10.332.138.735,00
-	Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan	1.986.007.697,00
-	Pengembangan Nilai Aset	391.118.000,00
-	Pengembangan Melalui KDP	14.564.420.603,00
-	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.059.365.555,00
Total Mutasi Tambah		29.065.529.590,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	154.362.674.124,00
-	Reklasifikasi Keluar	20.804.796.699,00
-	Koreksi Pencatatan	15.051.978.374,00
-	Perolehan Aset Kemitraan dari Reklasifikasi Aset Tetap	77.305.000,00
Total Mutasi Kurang		190.296.754.197,00
Saldo Akhir		7.405.404.216.665,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp732.479.000,00 terdiri dari pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari sumber dana PNBPNP;
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp10.332.138.735,00 merupakan reklasifikasi dari KDP ke Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan sebesar Rp1.986.007.697,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga ke Jalan, Irigasi dan Jaringan ;



- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp391.118.000,00 merupakan transaksi belanja modal yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap nilai aset yang sudah tercatat sebelumnya.
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp14.564.420.603,00 merupakan reklasifikasi dari KDP ke Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap Nilai Aset yang sudah tercatat sebelumnya.
- Koreksi Pencatatan Nilai/kuantitas sebesar Rp1.059.365.555,00 terdiri dari:
 - a. Koreksi kapitalisasi ke aset induk Jalan & Jembatan sebesar Rp133.882.518,00 pada UPKPB Biro Umum;
 - b. Koreksi kapitalisasi ke aset induk Irigasi sebesar Rp857.349.895,00 pada UPKPB BUBU Hang Nadim;
 - c. Koreksi kapitalisasi ke aset induk Irigasi sebesar Rp68.133.142,00 pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah.

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp154.362.674.124,00 terdiri dari :
 - a. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) sebesar Rp3.360.00,00 Pada UPKPB Biro Umum sesuai dengan BA nomor 01/ASET/2/2017;
 - b. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) sebesar Rp39.446.000,00 Pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai dengan BA nomor BA/7/A4.3/5/17;
 - c. Penghentian aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp2.515.481.000,00 yang akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Biro Umum;
 - d. Penghentian aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp45.591.248.324,00 yang akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Dir. Pembangunan sarana dan prasarana;
 - e. Penghentian aset Irigasi sebesar Rp48.356.000,00 yang akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Biro Umum;
 - f. Penghentian aset Irigasi Sebesar Rp87.193.161.896,00 yang akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Dir. Pembangunan sarana



- dan prasarana;
- g. Penghentian aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp24.293.450,00 yang akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB RSBP Batam;
 - h. Penghentian aset Irigasi sebesar Rp6.120.000,00 merupakan dan akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB RSBP Batam;
 - i. Penghentian aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp22.826.000,00 yang akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Kantor pengelolaan air dan limbah;
 - j. Penghentian aset irigasi sebesar Rp9.875.169.454,00 yang akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Kantor pengelolaan air dan limbah;
 - k. Penghentian aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp9.043.212.000,00 yang akan diusulkan penghapusannya pada UPKPB Kantor pelabuhan laut.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp20.804.796.699,00 merupakan koreksi perubahan kode barang;
 - Koreksi Pencatatan sebesar Rp15.051.978.374,00 terdiri dari:
 - a. Koreksi pencatatan sebesar Rp4.946.846.000,00 merupakan koreksi perubahan kode barang;
 - b. Koreksi kapitalisasi ke aset induk Jalan dan Jembatan sebesar Rp292.903.334,00 pada UPKPB Biro Umum;
 - c. Koreksi kapitalisasi ke aset induk Irigasi sebesar Rp2.751.329.171,00 pada UPKPB Biro Umum;
 - d. Koreksi kapitalisasi ke aset induk Irigasi sebesar Rp991.616.000,00 pada UPKPB BUBU Hang Nadim;
 - e. Koreksi kapitalisasi ke aset induk irigasi sebesar Rp100.143.970,00 pada UPKPB Kantor pengelolaan air dan limbah;
 - f. Koreksi kapitalisasi ke aset induk Jalan dan Jembatan sebesar Rp301.742.600,00 merupakan pada UPKPB kantor pelabuhan laut.
 - g. Koreksi pencatatan sebesar Rp5.667.397.299,00 merupakan koreksi kesalahan pencatatan.



- Perolehan aset kemitraan dari reklasifikasi Aset tetap sebesar Rp77.305.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap Irigasi ke Kemitraan pada UPKPB Kantor pengelolaan air dan limbah.

Aset Tetap Lainnya

D.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.901.552.509,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Satuan	Jumlah (Rp)	
			Kuantitas	Nilai
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	Buah	5	936.770.000,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	Buah	1	1.975.000,00
3	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	Buah	8	18.114.200,00
4	Barang Bercorak Kesenian	Buah	141	1.104.056.000,00
5	Alat Bercorak Kebudayaan	Buah	67	2.072.842.000,00
6	Tanaman	Buah	11.586	10.767.795.309,00
Total			11.808	14.901.552.509,00

(Rincian Aset tetap Lainnya dapat dilihat pada lampiran 16)

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp14.848.929.309,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp52.623.200,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		14.848.929.309,00
-	Pembelian	28.094.200,00
-	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	24.529.000,00
Total Mutasi Tambah		52.623.200,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		14.901.552.509,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp28.094.200,00 terdiri dari pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari sumber dana PNBK;
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp24.529.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset yang tidak digunakan ke aset tetap



Pada UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta (terdapat penggunaan kembali BMN yang dihentikan).

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan*

D.2.6. Konstruksi Dalam pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp426.717.114.669,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Jumlah (Rp)
1	Tanah Dalam Pengerjaan	3.987.497.636,00
2	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	23.143.324,00
3	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	159.767.043.468,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	262.939.430.241,00
	Jumlah	426.717.114.669,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 17)

Tanah Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.987.497.636,00 merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Dalam hal sertifikat HPL telah diterbitkan, biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai Aset Lainnya.

Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan sebesar Rp23.143.324,00, Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp159.767.043.468,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan sebesar Rp262.939.430.241,00 merupakan pekerjaan pengadaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2017.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp179.767.524.217,00, terdapat mutasi tambah sebesar Rp495.820.026.142,00 dan mutasi kurang sebesar Rp248.870.435.690,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	179.767.524.217,00
Mutasi Tambah	
- Perolehan/Penambahan KDP	55.942.896.588,00
- Pengembangan KDP	439.877.129.554,00
Total Mutasi Tambah	495.820.026.142,00
Mutasi Kurang	
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	212.861.994.308,00
- Pengembangan Melalui KDP	36.008.441.382,00
Total Mutasi Kurang	248.870.435.690,00
Saldo Akhir	426.717.114.669,00



Mutasi Tambah:

- Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp55.942.896.588,00 merupakan perolehan atau pembelian yang bersumber dari PNBPN;
- Pengembangan KDP sebesar Rp439.877.129.554,00 merupakan transaksi belanja modal yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap nilai aset KDP yang sudah tercatat sebelumnya (perolehan KDP yang bersumber dari PNBPN sebesar Rp60.683.493.093,00 dan RM sebesar Rp379.193.636.461,00).

Mutasi Kurang:

- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp212.861.994.308,00 merupakan reklasifikasi KDP ke Aset Tetap.
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp36.008.441.382,00 merupakan transaksi belanja modal yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap nilai aset KDP yang sudah tercatat sebelumnya.

Aset Lainnya

D.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp215.746.120.664,00 dan Rp137.407.679.240,00 dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	167.065.369.296,00	178.751.471.233,00
	Akumulasi Penyusutan	(91.826.936.885,00)	(92.471.772.532,00)
	Nilai Buku (1)	75.238.432.411,00	86.279.698.701,00
2	Aset Tak Berwujud	66.148.324.196,00	57.097.001.849,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(17.457.399.673,00)	(13.855.498.199,00)
	Nilai Buku (2)	48.690.924.523,00	43.241.503.650,00
3	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	3.302.885.193,00	3.302.885.193,00
4	Aset Lain-lain		
	a. Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	186.221.520.488,00	29.964.969.878,00
	b. Piutang Tidak Lancar	9.816.645.228,00	4.760.067.971,00
	c. Panjar Tidak Lancar	2.961.573.242,00	2.961.573.241,00
	d. Piutang Pegawai Tidak Lancar	153.327.225,00	153.327.225,00
	e. Piutang TGR	1.506.032.334,00	1.506.032.334,00
	Jumlah	200.659.098.517,00	39.345.970.649,00
	Akumulasi Peyusutan Dan Cadangan Aset Lain-lain		
	a. Akum. Peny. Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	(99.213.674.287,00)	(26.887.410.516,00)
	b. Cadangan Piutang Tidak Lancar	(9.816.645.227,00)	(4.760.067.971,00)
	c. Cadangan Panjar Tidak Lancar	(2.961.573.241,00)	(2.961.573.241,00)



No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
d.	Cadangan Piutang Pegawai Tidak Lancar	(153.327.225,00)	(153.327.225,00)
	Jumlah	(112.145.219.980,00)	(34.762.378.953,00)
	Nilai Buku (4)	88.513.878.537,00	4.583.591.697,00
	Total Nilai Buku (1+2+3+4)	215.746.120.664,00	137.407.679.240,00

Penjelasan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

*Kemitraan
Dengan Pihak
Ketiga*

D.3.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2017 sebesar Rp167.065.369.296,00, terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Satuan	Jumlah (Rp)	
			Kuantitas	Nilai
1	Alat Besar Darat	Unit	2	6.700.000.000,00
2	Alat Bantu	Unit	2	324.051.000,00
3	Alat Bengkel Bermesin	Buah	5	14.057.000,00
4	Alat Rumah Tangga	Buah	30	9.956.000,00
5	Unit Alat Laboratorium	Buah	19	835.350.000,00
6	Alat Eksplorasi Topografi	Buah	1	4.895.000,00
7	Unit Peralatan Proses/Produksi	Buah	110	779.988.000,00
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Unit	9	29.700.901.152,00
9	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Unit	2	14.675.000,00
10	Jembatan	M2	2	4.631.973.144,00
11	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Unit	74	42.741.241.000,00
12	Instalasi Gardu Listrik	Unit	13	1.714.221.000,00
13	Jaringan Air Minum	Unit	161	79.345.664.000,00
14	Jaringan Listrik	Unit	1	248.397.000,00
	Total		431	167.065.369.296,00

D.3.1.1 Kantor Pelabuhan Laut

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp40.121.852.086,00 terdiri dari :

No	Uraian Akun	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	6.700.000.000,00	1. Kerjasama dengan PT. Synergy Tharada berupa Dermaga dan Gedung Terminal Batam Centre; 2. Kerjasama dengan PT. Tuah Selimangkarang berupa pengelolaan Tower Crane.



No	Uraian Akun	Jumlah	Keterangan
2	Gedung dan Bangunan	28.789.878.942,00	
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.631.973.144,00	
	Jumlah	40.121.852.086,00	
	Akumulasi Penyusutan	12.961.466.078,00	
	Nilai Buku	27.160.386.008,00	

D.3.1.2 Kantor Air dan Limbah

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp126.943.517.210,00, terdiri dari :

No	Uraian Akun	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	1.968.297.000,00	Kerjasama dengan PT. Adhya Tirta Batam sesuai dengan Perjanjian Konsesi Nomor: 009/UM.PERJ/IV/1995 tanggal 17 April 1995 tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Konsorsium yang terdiri dari Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang yang akan berakhir pada tanggal 14 November 2020.
2	Gedung dan Bangunan	925.697.210,00	
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.049.523.000,00	
	Jumlah	126.943.517.210,00	
	Akumulasi Penyusutan	78.865.470.807,00	
	Nilai Buku	48.078.046.403,00	

Aset Tak Berwujud

D.3.2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp66.148.324.196,00 dan Rp57.097.001.849,00 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Software	37.150.444.483,00	32.855.483.358,00
Lisensi	7.665.060.420,00	7.169.600.300,00
Hasil Kajian/Penelitian	13.432.207.884,00	9.374.866.550,00
Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	7.617.119.609,00	7.413.559.841,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	283.491.800,00	283.491.800,00
Jumlah Aset Tak Berwujud	66.148.324.196,00	57.097.001.849,00
Software	(16.456.411.169,00)	(13.269.768.900,00)
Lisensi	(1.000.988.504,00)	(585.729.299,00)
Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00
Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Amortisasi	(17.457.399.673,00)	(13.855.498.199,00)
Software	20.694.033.314,00	19.585.714.458,00
Lisensi	6.664.071.916,00	6.583.871.001,00



Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Hasil Kajian/ Penelitian	13.432.207.884,00	9.374.866.550,00
Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	7.617.119.609,00	7.413.559.841,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	283.491.800,00	283.491.800,00
Nilai Buku Aset Tak Berwujud	48.690.924.523,00	43.241.503.650,00

(Rincian Software, Lisensi dan Hasil Kajian dapat dilihat pada lampiran 18)

D.3.2.1 Software

Saldo Software per 31 Desember 2017 sebesar Rp37.150.444.483,00 merupakan perangkat lunak (*software*) yang dimiliki Badan Pengusahaan Batam, yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	32.199.277.115,00
2	Kantor Bandara	4.471.877.368,00
3	Kantor Air dan Limbah	49.050.000,00
4	Kantor Pelabuhan Laut	430.240.000,00
	Jumlah	37.150.444.483,00

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp32.855.483.358,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp4.294.961.125,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	32.855.483.358,00
Mutasi Tambah	
- Pembelian	2.289.321.125,00
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.811.840.000,00
- Pengembangan Nilai Aset	193.800.000,00
Total Mutasi Tambah	4.294.961.125,00
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Saldo Akhir	37.150.444.483,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp2.289.321.125,00 terdiri dari pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari sumber dana PNBPN;
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.811.840.000,00 merupakan rekalsifikasi KDP ke *Software*;



- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp193.800.000,00 merupakan transaksi belanja modal yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap nilai aset yang sudah tercatat sebelumnya.

D.3.2.2 Lisensi

Saldo Lisensi per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.665.060.420,00 merupakan lisensi atas perangkat lunak (*software*) yang dimiliki Badan Pengusahaan Batam pada unit Kantor Pusat.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp7.169.600.300,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp495.460.120,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		7.169.600.300,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	495.460.120,00
Total Mutasi Tambah		495.460.120,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		7.665.060.420,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp495.460.120,00 terdiri dari pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari sumber dana PNBPN;

D.3.2.3 Hasil Kajian/Penelitian

Saldo hasil Kajian/Penelitian per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.432.207.884,00 merupakan hasil pekerjaan darikonsultan perencanaan detail bangunan sipil berupa Gedung, Jalan, dan Jembatan dan sebagainya atau disebut *Detailed Engineering Design (DED)* yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	10.115.747.884,00
2	Kantor Bandara	2.614.810.000,00
3	Kantor Air dan Limbah	701.650.000,00
	Jumlah	13.432.207.884,00



Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp9.374.866.550,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp4.057.341.334,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		9.374.866.550,00
Mutasi Tambah		
-	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.969.025.000,00
-	Reklasifikasi Masuk	2.088.316.334,00
Total Mutasi Tambah		4.057.341.334,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		13.432.207.884,00

Mutasi Tambah:

- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp1.969.025.000,00 merupakan reklasifikasi Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan ke Hasil Kajian/Penelitian;
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.088.316.334,00 merupakan reklasifikasi dari Jalan dan Jembatan pada UPKPB Direktorat Pembangunan.

D.3.2.4 Hak Pengelolaan Lahan

Saldo Hak Pengelolaan Lahan per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.617.119.609,00 merupakan hak pengelolaan lahan yang diberikan Pemerintah kepada Badan Pengusahaan Batam. yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional. Nilai Hak Pengelolaan yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam dalam rangka mengurus penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Biaya yang dikeluarkan dalam hal sertifikat HPL belum terbit/selesai, biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai Tanah Dalam Pengerjaan - lihat catatan C.2.6.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp7.413.559.841,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp203.559.768,00 dan mutasi kurang Rp0,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



Uraian Jenis Transaksi		Jumlah
		(Rp)
Saldo Awal		7.413.559.841,00
Mutasi Tambah		
-	Reklasifikasi Masuk	203.559.768,00
Total Mutasi Tambah		203.559.768,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		7.617.119.609,00

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp203.559.768,00 Merupakan HPL Selesai Reklasifikasi dari Tanah pada UPKPB Kantor Pengelolaan Lahan;

Perlu kami jelaskan bahwa luasan tanah di pulau batam dan Hak Pengalokasian lahannya adalah sebagai berikut:

1. Luas Lahan Pulau Batam menurut Peraturan Presiden Batam Bintang Karimun (BBK) 87/2011 adalah 457.788.953,44 m². dan yang telah ditetapkan oleh BP Batam Penetapan lokasinya seluas 377.101.725,87 m². Rincian Penentuan Pola Ruang disajikan pada table berikut:

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Total Luas Batam (M ²)	
		Perpres BBK 87/2012	Penetapan Lokasi BP Batam
1	Kawasan Permukiman (B1)	136.405.872,00	101.267.406,79
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	17.490.475,67	17.627.001,44
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	9.859.986,13	3.658.515,80
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan. Kesehatan. Sosial Budaya, Riset dan Teknologi (B6.3)	16.735.415,65	12.798.858,36
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	68.814,31	1.146.083,50
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	27.596.029,41	16.375.077,37
7	Kawasan Industri (B4)	75.226.874,30	57.463.461,21
8	Kawasan Pariwisata (B5)	29.444.022,41	21.809.580,66
9	Budidaya Lain (B6)	5.722,82	0,00
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	75.537.528,65	75.537.528,65
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	32.138.752,68	32.138.752,68
12	Danau	26.270.713,55	26.270.713,55
13	Kawasan Suaka Alam. Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya (L3)	10.615.587,33	10.615.587,33
14	Sungai	393.158,53	393.158,53
TOTAL LUAS KESELURUHAN		457.788.953,44	377.101.725,87



2. Berdasarkan Penetapan Wilayah di Pulau Batam, luas lahan sebesar 377.101.725,87 m² terdiri dari 3 penetapan Wilayah yaitu Wilayah 1 meliputi sub wilayah Sekupang dan Tanjung Uncang. Wilayah II meliputi sub wilayah Duriangkang/Tanjung Piayu. Kabil dan Nongsa dan wilayah III meliputi sub wilayah Batam Centre. Batu Ampar dan Mukakuning. Rincian peruntukan masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

a. Wilayah I

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Wilayah I			
		Sub Wilayah Sekupang		Sub Wilayah Tanjung Uncang	
		Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)
1	Kawasan Permukiman (B1)	17.430.768,72	12.119.859,02	30.339.496,35	23.295.529,25
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	-	-	-	-
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	407.073,74	528.921,32	-	-
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan. Kesehatan. Sosial Budaya. Riset dan Teknologi (B6.3)	1.873.035,85	1.993.038,70	3.692.687,58	3.282.002,90
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	-	-	-	-
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	1.730.080,44	826.040,52	1.917.677,94	2.101.000,27
7	Kawasan Industri (B4)	6.057.658,67	3.713.396,31	34.507.318,51	24.163.735,98
8	Kawasan Pariwisata (B5)	9.834.978,84	5.325.159,89	5.289.501,70	4.012.508,99
9	Budidaya Lain (B6)	1.007,84	-	641,35	-
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	8.875.428,99	-	1.456.349,49	-
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	644.708,56	-	1.083.367,17	-
12	Danau	293.286,55	-	-	-
13	Kawasan Suaka Alam. Pelestarian Alam. dan Cagar Budaya (L3)	-	-	-	-
14	Sungai	-	-	224.277,61	-
TOTAL LUAS KESELURUHAN		47.148.028,20	24.506.415,76	78.511.317,70	56.854.777,39

b. Wilayah II

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Wilayah II					
		Sub Wilayah Duriangkang / Tanjung Piayu		Sub Wilayah Kabil		Sub Wilayah Nongsa	
		Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)
1	Kawasan Permukiman (B1)	9.905.185,99	3.980.274,00	12.307.836,30	12.070.705,53	6.881.959,85	5.227.169,46



2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	-	-	17.490.475,67	17.627.001,44	--	-
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	-	-	6.227.933,27	2.470.000,33	27.783,94	31.583,00
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan. Kesehatan. Sosial Budaya. Riset dan Teknologi (B6.3)	2.572.772,44	1.814.556,77	2.265.022,20	1.226.160,35	1.292.888,06	813.970,14
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	-	-	-	-	-	-
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	661.104,32	513.073,01	1.182.609,08	1.085.193,50	756.670,93	547.100,81
7	Kawasan Industri (B4)	224.789,42	154.786,00	19.707.823,99	16.999.903,19	.	.
8	Kawasan Pariwisata (B5)	1.468.338,73	618.485,50	467.484,62	61.509,00	11.274.404,90	11.032.249,13
9	Budidaya Lain (B6)	3.192,66	-	507,44	-	14,10	-
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	38.300.252,95	-	824.232,26	-	6.940.790,19	-
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	13.044.633,85	-	164.431,98	-	1.381.702,62	-
12	Danau	21.061.732,03	-	135.912,08	-	557.687,39	-
13	Kawasan Suaka Alam. Pelestarian Alam. dan Cagar Budaya (L3)	-	-	-	-	-	-
14	Sungai	-	-	-	-	168.880,91	-
TOTAL LUAS KESELURUHAN		87.242.002,39	7.081.175,28	60.774.268,89	51.540.473,34	29.282.782,89	17.652.072,54

c. Wilayah III

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Wilayah II					
		Sub Wilayah Batam Centre		Sub Wilayah Batu Ampar		Sub Wilayah Mukakuning	
		Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)
1	Kawasan Permukiman (B1)	17.728.159,56	15.802.490,00	24.648.615,18	17.828.761,19	17.163.850,05	10.942.617,65
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	-	-	-	-	-	-
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	-	-	3.196.346,97	628.011,15	848,21	-
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan. Kesehatan, Sosial Budaya. Riset	1.149.771,42	1.047.603,50	2.359.736,05	1.600.232,00	1.529.502,06	1.021.294,00



	dan Teknologi (B6.3)						
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	-	-	68.814,31	1.146.083,50	-	-
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	7.166.934,19	2.504.619,78	11.496.630,06	7.113.501,58	2.684.322,45	1.684.547,89
7	Kawasan Industri (B4)	2.942.877,73	2.845.945,11	6.954.612,34	5.238.617,62	4.831.793,64	4.347.077,00
8	Kawasan Pariwisata (B5)	25.462,00	-	34.182,00	330.399,83	1.049.669,62	429.268,32
9	Budidaya Lain (B6)	148,00	-	211,43	-	-	-
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	-	-	767.860,67	-	18.372.614,10	-
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	31.908,44	-	208.899,81	-	15.579.100,25	-
12	Danau	-	-	173.694,16	-	4.048.401,33	-
13	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya (L3)	-	-	-	-	10.615.587,33	-
14	Sungai	-	-	-	-	-	-
TOTAL LUAS KESELURUHAN		29.045.261,35	22.200.659,08	49.909.602,98	33.885.606,87	75.875.689,04	18.424.804,86

3. Berdasarkan penetapan lokasi BP Batam atas Lahan di pulau Batam seluas 377.101.725,87 m². yang telah teralokasi seluas 232.145.985,13 m² dan belum teralokasi 144.955.740,74 m².

Untuk Hak Pengelolaan Lahan yang pengadaannya dibawah tahun 2014 (1987 s.d 2013) seluas 184.799.294,00 m² sebanyak 196 HPL yang berasal dari pengadaan barang dan jasa.

(Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam yang telah diterbit dapat dilihat pada [Lampiran 19](#))

D.3.2.5 Aset Tidak Berwujud Lainnya

Saldo Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp283.491.800,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp283.491.800,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp3.085.234.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp3.085.234.000,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		283.491.800,00
Mutasi Tambah		
-	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.085.234.000,00
Total Mutasi Tambah		3.085.234.000,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi Keluar	3.085.234.000,00
Total Mutasi Kurang		3.085.234.000,00
Saldo Akhir		283.491.800,00

Mutasi Tambah :

- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp3.085.234.000,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan ke Aset Tak Berwujud Lainnya.

Mutasi Kurang :

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.085.234.000,00 merupakan Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada UPKPB Biro Umum.

*Aset Tak
Berwujud Dalam
Pengerjaan*

D.3.3 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp3.302.885.193,00. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan dimaksud merupakan pekerjaan penyiapan kavling siap bangun pekerja sesuai Kontrak No: 5133.002.012.03/D.01.17.18/PPK/PNBP/ 10/2015 dengan PT. Putra Nusa Perkasa pada tahun 2015 dan penyelesaian pekerjaan tersebut yang berakhir di tahun 2016.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp3.302.885.193,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.866.099.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp6.866.099.000,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		3.302.885.193,00
Mutasi Tambah		
-	Perolehan/Penambahan KDP	1.373.219.800,00
-	Pengembangan KDP	5.492.879.200,00
Total Mutasi Tambah		6.866.099.000,00
Mutasi Kurang		
-	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6.866.099.000,00
Total Mutasi Kurang		6.866.099.000,00
Saldo Akhir		3.302.885.193,00



Mutasi Tambah :

- Perolehan/Penambahn KDP sebesar Rp1.373.219.800,00 merupakan perolehan atau pembelian yang berasal dari sumber PNBPN;
- Pengembangan KDP sebesar Rp5.492.879.200,00 merupakan transaksi belanja modal yang mengembangkan/kapitalisasi terhadap nilai aset KDP yang sudah tercatat sebelumnya.

Mutasi Kurang :

- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp6.866.099.000,00 merupakan klasifikasi dari Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan ke Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain **D.3.4 Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp200.659.098.517,00 dan Rp39.345.970.649,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	186.221.520.488,00	29.964.969.878,00
2	Piutang Tidak Lancar	9.816.645.228,00	4.760.067.971,00
3	Panjar Tidak Lancar	2.961.573.242,00	2.961.573.241,00
4	Piutang pegawai tidak lancar	153.327.225,00	153.327.225,00
5	Piutang TGR	1.506.032.334,00	1.506.032.334,00
	Total	200.659.098.517,00	39.345.970.649,00

Penjelasan Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Aset Tetap
Yang Tidak
Dapat
Digunakan*

D.3.4.1 Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan

Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan per 31 Desember 2017 sebesar Rp186.221.520.488,00 merupakan aset tetap yang sudah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp29.964.969.878.00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp187.530.814.773,00 dan mutasi kurang sebesar Rp31.274.264.163,00. Penjelasan Mutasi Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:



Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	29.964.969.878,00
Mutasi Tambah	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	187.530.814.773,00
Total Mutasi Tambah	187.530.814.773,00
Mutasi Kurang	
- Penghapusan	9.874.557.875,00
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	203.799.000,00
- Koreksi Pencatatan BMN (BMN yang Dihentikan)	21.195.907.288,00
Total Mutasi Kurang	31.274.264.163,00
Saldo Akhir	186.221.520.488,00

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp187.530.814.773,00 merupakan pemindahan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah rusak/tidak dapat dimanfaatkan yang terdiri dari:
 - a. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) Pada UPKPB Biro Umum sesuai dengan BA No 01/ASET/2/2017 sebesar Rp2.525.845.980,00 dan BA No 02/A1.1/7/2017 sebesar Rp1.280.040.000,00;
 - b. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai dengan BA nomor BA/7/A4.3/5/17 sebesar Rp681.313.458,00 dan SK nomor 299 sebesar Rp851.363.500,00;
 - c. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) Pada UPKPB Bandar Udara sesuai dengan BA nomor 01/PKBMN-BHN/7/2017 sebesar Rp123.635.000,00;
 - d. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) Pada UPKPB Kantor Pelabuhan Laut sesuai dengan BA nomor BA/09/A3.24/8/2017 sebesar Rp1.111.634.756,00 dan BA nomor BA/10/A3.24/10/17 sebesar Rp369.743.500,00.
 - e. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) sebesar Rp4.311.943.555,00 Pada UPKPB Biro Umum yang akan diusulkan penghapusan.
 - f. Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) sebesar Rp132.804.041.451,00 Pada UPKPB Dir pembangunan sarana dan prasarana yang akan diusulkan penghapusan.

Mutasi Kurang:

- Penghapusan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp9.874.557.875,00 terdiri dari:



- a. Pada UPKPB Biro Umum sesuai dengan SK nomor 496 Tahun 2017 sebesar 157.080.667,00 dan SK nomor 689 Tahun 2017 sebesar Rp3.622.222.313,00;
 - b. Pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai dengan SK nomor 452 Tahun 2017 sebesar Rp2.448.294.000,00 dan SK nomor 299 sebesar Rp851.363.500,00;
 - c. Pada UPKPB Kantor Pelabuhan Laut sesuai dengan SK nomor 475 Tahun 2017 sebesar Rp373.936.500,00 dan dan SK nomor 702 Tahun 2017 sebesar Rp499.632.170,00;
 - d. Pada UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan SK nomor 719 Tahun 2017 sebesar Rp206.106.000,00;
 - e. Pada UPKPB Rumah Sakit BP Batam sebesar Rp1.715.922.7254,00 sesuai dengan SK Nomor 702 Tahun 2017.
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp203.799.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset yang tidak digunakan dalam operasi ke aset tetap Pada UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta (penggunaan kembali BMN yang dihentikan).
 - Koreksi pencatatan sebesar Rp21.195.907.288,00 merupakan koreksi perubahan kode barang.

Rincian Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp186.221.520.488,00 ([Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dapat dilihat pada lampiran 20](#)).

Piutang Tidak Lancar

D.3.4.2. Piutang Tidak lancar

Piutang Tidak Lancar Per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.816.645.227,00 merupakan piutang dengan umur lebih dari dua tahun yang diperkirakan tidak dapat ditagih atau macet. Piutang Tidak Lancar tersebut adalah piutang yang telah diusulkan kepada KPKNL untuk ditindaklanjuti penagihannya maupun penghapusannya berdasarkan Surat Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum nomor: B/2507/A4/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Adapun Piutang tidak lancar terdiri dari:



No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	5.311.545.855,00
2	Kantor Air dan Limbah	32.030.810,00
3	BUBU Hang Nadim	1.176.796.023,00
4	Kantor Pelabuhan Laut	3.296.272.539,00
5	Jumlah	9.816.645.227,00
6	Cadangan piutang tidak lancar	(9.816.645.227,00)
7	Nilai Buku	0,00

Rincian Piutang Tidak Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.311.545.855,00 terdiri dari:

D.3.4.2.a Kantor Pusat

I. Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana				
No	Nomor Faktur	Nama Pelanggan	Tahun Terbit	Jumlah
1.	320/FT.SLR/12/2012	PT. Arzaqi Mekkah Persada	2012	5.600.000,00
2.	319/FT.SLR/12/2012	PT. Arzaqi Mekkah Persada	2012	5.600.000,00
3.	318/FT.SLR/12/2012	PT. Arzaqi Mekkah Persada	2012	7.700.000,00
4.	290/FT.SLR/12/2012	PT. Arzaqi Mekkah Persada	2012	4.200.000,00
5.	325/FT.SLR/12/2012	PT. Narita Citra Dinamika	2012	7.700.000,00
6.	324/FT.SLR/12/2012	PT. Narita Citra Dinamika	2012	4.200.000,00
7.	323/FT.SLR/12/2012	PT. Narita Citra Dinamika	2012	7.700.000,00
8.	158/FT.SLR/08/2012	PT. Multi Idea Advertising	2012	5.600.000,00
Jumlah (I)				48.300.000,00
II. Direktorat Pemanfaatan Aset				
1	F/000026/UMUM/AH/10/2003	Panitia Festival & Musda Orari	2003	5.944.000,00
2	F/000011/UMUM/AH/10/2003	Ka. Kanwil Depag Riau	2003	16.402.000,00
3	F/000012/UMUM/AH/9/2004	Pelatihan Petugas Haji	2004	40.865.000,00
4	F/000023/UMUM/AH/3/2004	Pengurus GP. Ansor	2004	15.535.000,00
5	F/000027/UMUM/AH/12/2004	Panitia Halal Bihalal Paguyuban Warga Pasundan	2004	3.820.000,00
6	F/000013/UMUM/AH/7/2006	Ketua Himpunan Mahasiswa Islam	2006	15.220.000,00
7	F/000024/UMUM/AH/7/2006	Pengurus GP. Ansor	2006	22.075.000,00
8	F/000007/UMUM/AH/7/2010	Tim Kesenian Flora Kota Batam	2010	8.280.000,00
9	F/000009/UMUM/SEWA/02/2012	Jamaris. SE	2012	200.000,00
10	F/000017/UMUM/SEWA/03/2012	Panitia Asosiasi Sekolah Sepak Bola Indonesia Kota	2012	3.880.000,00
Jumlah (II)				132.221.000,00
III. Biro Keuangan				
9	ROYALTI PASIR	PT. Bumi Samudra Argomegah (SGD 506.341,31)	2010	5.131.024.855,00
Jumlah (III)				5.131.024.855,00
Total (I+II+III)				5.311.545.855,00



Piutang tidak lancar atas royalti pasir laut sebesar USD 506.341,31 (equivalen Rp5.131.024.885,00) merupakan piutang yg belum dibayar oleh PT. Bumi Samudra Agromegah berdasarkan Surat SKPBN-09/PUPNC.04/2017 tanggal 7 Juni 2017. Piutang dimaksud timbul berdasarkan Surat Perjanjian Nomor:003/UM/Perj/I/1998 Tanggal 26 Januari 1998. Terhadap piutang ini telah dilayangkan surat konfirmasi Nomor:115/A.2/5/2016 tanggal 30 Juni 2016. Kronologis dapat dilihat pada [Lampiran 21](#))

D.3.4.2.b Kantor Air dan Limbah

NO	Jenis Jasa Piutang	Jumlah (Rp)
1	Pengolahan Limbah Cair	9.356.000,00
2	Sewa Gudang TDLI - B3	22.217.500,00
3	Denda Sewa Gudang TDLI.B3	213.150,00
4	Denda Jasa Pengolahan Limbah Cair Domestik	244.160,00
	Total	32.030.810,00

(Rincian masing-masing debitur dapat dilihat pada lampiran 22)

D.3.4.2.c BUBU Hang Nadim

NO	Nama Debitur	Jumlah (Rp)
1	Prodexim BUMD (USD 16.844.88. Kurs 13.436)	228.214.435,00
2	PT. Mandala Airline	138.824.300,00
3	PT. Gading Aerindo Satia	57.527.800,00
4	Batavia Air	429.134.200,00
5	Thomas Cook Airlines Ltd	83.556.000,00
6	PT. Kartika Air	178.453.259,00
7	Paparons Pizza	11.078.900,00
8	Good Way Hotel	50.007.129,00
	Total	1.176.796.023,00

D.3.4.2.d Kantor Pelabuhan Laut

Piutang Tidak Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.296.272.539,00 Piutang yang telah berumur di atas 2 Tahun yang telah diserahkan pengurusannya ke KPKNL. ([Rincian dapat dilihat pada lampiran 23](#)).



Panjar Tidak Lancar

D.3.4.3. Panjar Tidak Lancar

Panjar Tidak Lancar Per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.961.573.242,00 merupakan panjar yang belum dipertanggungjawabkan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2011. Upaya penagihan telah dilakukan kepada para pengambil panjar yang belum dipertanggungjawabkan akan panjar tersebut di atas, tetapi kondisi penerima panjar saat ini banyak yang telah pensiun, pindah instansi, alamat tidak jelas sampai dengan telah meninggal dunia. Upaya terus dilakukan guna menyelesaikan panjar tersebut dengan telah dibuatnya Tim Penyelesaian Panjar Tidak Lancar tersebut dengan kemajuan sampai dengan sekarang. Mengingat panjar tersebut terjadi pada tahun 2011 dan sebelumnya serta menjadi beban tahun yang bersangkutan, agar tidak membebani tahun anggaran berikutnya maka terhadap saldo panjar tersebut dibentuk penyisihannya. Atas nilai sisa panjar sebesar Rp2.961.573.242,00 yang telah didukung dengan surat pernyataan kesanggupan menindaklanjuti yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan dan Inspektorat (Satuan Pemeriksa Internal sekarang) serta mengetahui Anggota 1/Deputi Administrasi dan Umum.

Rincian dan mutasi penambahan dan pengurangan panjar per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian		Jumlah
Saldo Awal 01 Januari 2017 (Audited)		2.961.573.242,00
Mutasi Tambah:		
a.	Penambahan Panjar Tidak Lancar	0,00
Mutasi Kurang:		
b.	Pertanggungjawaban Panjar Tidak Lancar	0,00
Saldo Akhir 31 Desember 2017 (Audited)		2.961.573.242,00

(Rincian berdasarkan nama dapat dilihat pada lampiran 24)

Rincian Panjar Tidak Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.961.573.242,00 berdasarkan tahun pengambilan panjar terdiri dari:

Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	01 Jan 2017 (Audited)			31 Desember 2017 (Audited)
1993	5.370.000,00	-	-	5.370.000,00
1994	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
1995	98.481.500,00	-	-	98.481.500,00
1996	5.575.000,00	-	-	5.575.000,00
1997	12.228.175,00	-	-	12.228.175,00
1998	30.595.000,00	-	-	30.595.000,00
1999	34.600.000,00	-	-	34.600.000,00
2000	28.048.000,00	-	-	28.048.000,00



Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	01 Jan 2017 (Audited)			31 Desember 2017 (Audited)
2001	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
2002	348.984.000,00	-	-	348.984.000,00
2003	450.905.830,00	-	-	450.905.830,00
2004	543.674.500,00	-	-	543.674.500,00
2005	134.984.148,00	-	-	134.984.148,00
2006	259.176.289,00	-	-	259.176.289,00
2007	224.500.000,00	-	-	224.500.000,00
2008	230.597.350,00	-	-	230.597.350,00
2009	346.834.950,00	-	-	346.834.950,00
2010	57.263.550,00	-	-	57.263.500,00
2011	140.705.000,00	-	-	140.705.000,00
	2.961.573.242,00	0,00	0,00	2.961.573.242,00

*Piutang
Pegawai Tidak
Lancar*

D.3.4.4. Piutang Pegawai Tidak Lancar

Piutang Pegawai Tidak Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp153.327.225,00 merupakan kelebihan biaya pengobatan pegawai yang ditanggung oleh Badan Pengusahaan Batam namun belum dibayar ke Badan Pengusahaan Batam/Biro Sumber Daya Manusia. Piutang Pegawai Tidak Lancar per 31 Desember 2017 terdiri dari Piutang Pegawai Tidak Lancar Kantor Pusat sebesar Rp153.327.225,00. (Rincian dilihat pada Lampiran 25).

Piutang TGR

D.3.4.5. Piutang TGR

Piutang TGR per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.506.032.334,00 merupakan piutang pada Karyawan Kuningan *Guest House* berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat (sekarang Satuan Pemeriksa Internal) Tahun 2012. Piutang dimaksud telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (KPKNL) Batam sesuai surat Nomor:SP3N.02/PUPNC.04/2015 tanggal 11 Maret 2015.

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya
(Cadangan Aset
Lain-lain)*

D.3.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain)

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp221.429.556.538,00 dan Rp141.089.649.684,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Akumulasi penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	91.826.936.885,00	92.471.772.532,00



Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Akumulasi penyusutan Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	99.213.674.287,00	26.887.410.516,00
Cadangan Piutang Tidak Lancar	9.816.645.227,00	4.760.067.971,00
Cadangan Panjar Tidak Lancar	2.961.573.241,00	2.961.573.241,00
Cadangan Piutang Pegawai	153.327.225,00	153.327.225,00
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	16.456.411.169,00	13.269.768.900,00
Akumulasi Amortisasi Lisensi	1.000.988.504,00	585.729.299,00
Total	221.429.556.538,00	141.089.649.684,00

Kewajiban

D.4 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.297.667.507.378,00 dan Rp1.360.981.297.066,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
A. Kewajiban Jangka Pendek			
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	127.672.110.075,00	264.122.791.968,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.384.500,00	5.824.500,00
3	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima Dimuka	1.169.990.012.803,00	1.096.852.680.598,00
4	Jumlah	1.297.667.507.378,00	1.360.981.297.066,00
B. Kewajiban Jangka Panjang			
5	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah (4+5)	1.297.667.507.378,00	1.360.981.297.066,00

Utang Kepada Pihak Ketiga BLU

D.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga BLU

Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2017 sebesar Rp127.672.110.075,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Usaha	2.079.981.529,00
2	Beban yang Masih Harus Dibayar	4.497.377.767,00
3	Titipan Pihak Ketiga	64.333.031.424,00
4	Dana Pihak Ketiga	56.761.719.355,00
	Jumlah	127.672.110.075,00

Penjelasan Utang kepada Pihak Ketiga BLU per 31 Desember 2017 sebesar Rp127.672.110.075,00 adalah sebagai berikut:



Utang Usaha **D.4.1.1. Utang Usaha**

Utang Usaha Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.079.981.529,00 merupakan utang usaha atas kegiatan operasional Badan Pengusahaan Batam yang terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Kantor Pusat	536.382.025,00
2.	BUBU Hang Nadim	299.739.326,00
3.	Kantor Pelabuhan Laut	949.041.028,00
4.	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	294.819.150,00
	Jumlah	2.079.981.529,00

Utang Usaha per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.079.981.529,00 dapat dijelaskan per unit sebagai berikut:

D.4.1.1.a Kantor Pusat

Utang Usaha Kantor Pusat per 31 Desember 2017 sebesar Rp536.382.025,00.

Utang Usaha Per 31 Desember 2017 sebesar Rp536.382.025,00 terdiri dari :

- a. Utang atas Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Proyek Penyusunan DES Jalan dari Tembesi ke Kawasan Industri Dapur 12 (Nota Dinas Biro Perencanaan Teknik No.06/A2.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018) sebesar Rp1.860.000,00;
- b. Utang atas Pekerjaan Pendalaman Embung di Kawasan Agrowisata Marina CV.Aza Sukses (Nota Dinas Direktorat Pemanfaatan Aset No.12/A4.2/1/2018 tanggal 12 Januari 2018) sebesar Rp188.134.000,00;
- c. Utang atas Pekerjaan Penempatan Server (Sewa Colocation Server) pada PT.Medianusa Permana (Nota Dinas No.8/A5.1/01/2018 tanggal 12 Januari 2018) sebesar Rp190.350.000,00;
- d. Utang atas biaya sewa peralatan dan mesin, telepon, biaya konsumsi dan biaya obat Biro Umum Tahun 2017 sesuai Nota Dinas No.41/A1.1/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp93.939.661,00;
- e. Utang atas pembelian persediaan ATK Biro Umum Tahun 2017 sesuai Nota Dinas No.41/A1.1/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp57.663.000,00;
- f. Utang atas biaya pemeliharaan gedung-Biro Umum dan Sekretariat sesuai Nota Dinas No 41/A1.1/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 sebesar



Rp1.373.000,00;

- g. Utang atas biaya panitia pengukuran Kantor Pengelolaan Lahan sesuai Nota Dinas No 17/A3.4/01/2018 Tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp3.062.364,00.

D.4.1.2 BUBU Hang Nadim

Utang usaha BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2017 sebesar Rp299.739.326,00 merupakan Utang Usaha kepada **CV. Minang Batuah** berupa utang perbaikan atap gedung terminal Bandara sesuai Nomor Kontrak 22/PPK.PNBP.BU/9/2015 dan Adendum SP.22.1/PPK.PNBP.BU/11/2015 dan SP.22.2/PPK.PNBP.BU/11/2015. Utang tersebut belum dibayarkan karena pihak kontraktor tidak menyetujui besaran yang akan dibayar sesuai perhitungan BAP dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mencakup kelebihan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atas pekerjaan perbaikan atap gedung terminal bandara sebesar Rp43.184.675,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp23.001.000,00. Jumlah utang tersebut telah dikoreksi kurang berdasarkan usulan BPK RI Tahun 2016 sebesar Rp34.185.674,00 (sesuai temuan dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam buku Kepatuhan Tahun 2015) sehingga jumlah utang usaha kepada CV. Minang Batuah adalah sebesar Rp299.739.326,00.

D.4.1.1.b Kantor Pelabuhan Laut

Utang Usaha Kantor Pelabuhan Laut Per 31 Desember 2017 sebesar Rp949.041.028,00 merupakan utang atas pekerjaan selasar bagian depan gedung terminal penumpang domestik sekupang 82,40% (CV. Mahardhika Perdana). [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 26a\).](#)

D.4.1.1.e. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP)

Utang Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2017 sebesar Rp294.819.150,00 merupakan utang atas pengadaan obat dan alat kesehatan kepada pihak ketiga yang belum dilunasi. [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 26b\).](#)



*Biaya Yang
masih Harus
Dibayar*

D.4.1.2. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya Yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.497.377.767,00 merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Pegawai yang Masih Harus Dibayar	10.376.000,00
2	Biaya Barang & Jasa yang Masih Harus Dibayar	4.487.001.767,00
	Jumlah	4.497.377.767,00

Biaya yang masih harus dibayar yaitu biaya-biaya yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian biaya/bunga yang telah diakui. sampai tanggal Laporan Posisi Keuangan tetapi biaya secara keseluruhan belum jatuh tempo.

D.4.1.2.1 Biaya Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Biaya Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.376.000,00 terdiri dari biaya honor dokter sebesar Rp7.726.000,00 dan biaya pegawai lainnya Rp2.650.000,00 yang masih harus dibayar.

D.4.1.2.2 Biaya Barang dan Jasa Yang Masih Harus Dibayar

Biaya Barang dan Jasa Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.487.001.767,00 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Jasa Medik	801.486.932,00
2	Biaya Keperluan Perkantoran	114.400,00
3	Biaya listrik	3.006.826.254,00
4	Biaya Telepon	64.543.297,00
5	Biaya air bulan	480.386.865,00
6	Biaya Surat Kabar	182.000,00
7	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	720.000,00
8	Biaya Perjalanan Dalam Negeri	132.742.019,00
	Jumlah	4.487.001.767,00

*Titipan Pihak
Ketiga*

D.4.1.3. Titipan Pihak Ketiga

Titipan Pihak Ketiga Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017 sebesar Rp64.333.031.424,00 merupakan uang jaminan pelanggan pada Badan



Pengusahaan Batam atas penggunaan jasa yang diberikan dan perkiraan yang menampung transaksi penerimaan yang belum dicatat sebagai pendapatan karena bukti penyeteroran belum diperoleh. Rincian Titipan Pihak Ketiga Badan Pengusahaan Batam terdiri dari:

Unit	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	58.069.027.187,00
2	Kantor Air dan Limbah	135.257.040,00
3	BUBU Hang Nadim	2.640.512.077,00
4	Kantor Pelabuhan Laut	2.831.103.544,00
5	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	645.452.446,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	11.679.130,00
	Jumlah	64.333.031.424,00

Rincian Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 menurut jenis titipannya pada masing-masing unit di BP Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.4.1.3.a. Kantor Pusat

Titipan Pihak Ketiga pada Kantor Pusat Per 31 Desember 2017 sebesar Rp58.069.027.187,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Titipan dana rusun Batu Ampar	82.642.500,00
2	Titipan dana rusun Sekupang	8.386.000,00
3	Titipan Dana Rusun Muka Kuning	191.632.675,30
4	Titipan Dana Rusun Kabil	84.272.500,00
	Jumlah Titipan Dana Rusun (1 s.d 4)	366.933.675,00
5	Penerimaan sementara	1.594.972.529,16
6	Titipan Penerimaan Pihak Ketiga Lainnya	9.142.762.987,00
7	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP)	21.689.291.172,00
8	Titipan Uang Muka UWTO	23.613.500.250,00
9	Titipan Jaminan Lainnya	1.661.566.573,00
	Jumlah (1 s.d 9)	58.069.027.187,00

Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp78.021.243.305,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Titipan Dana Rusun sebesar Rp366.933.675,00 adalah perkiraan yang menampung uang Deposit para penyewa rusun di Batu Ampar, Sekupang, Muka Kuning dan Kabil.
- Penerimaan sementara sebesar Rp1.594.972.529,00 berasal dari titipan rusun Kemenpera sebesar Rp625.529.461,00 dan perkiraan yang menampung transaksi penerimaan yang belum dapat dicatat sebagai



- pendapatan karena bukti penyeteroran belum diperoleh sebesar Rp969.443.068,00
- Titipan Penerimaan Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp9.142.762.987,00 terdiri dari:
 - penerimaan yang dilakukan berdasarkan faktur yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp533.018.000,00 (sesuai Nota Dinas Direktur Lahan Nomor 209/A1.1/LHN/12/2015 tanggal 18 Desember 2015)
 - penerimaan atas pembayaran UWTO PT. Pertamina pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp7.083.589.587,00 atas faktur yang diterbitkan atas UWTO tersebut adalah sebesar Rp10.475.128.090,00 (Nomor Faktur C.0045041304 tanggal 9 April 2014). Atas alokasi lahan yang diberikan kepada PT. Pertamina mengalami perubahan-perubahan yang belum memperoleh kesepakatan. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2015. Deputi Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha menerbitkan surat Nomor B/86/KA.A3/1/2015 yang menyatakan pembatalan sebagian alokasi lahan PT. Pertamina dan agar UWTO yang telah dibayarkan (Rp7.083.589.587,00) agar ditagih kembali ke Badan pengusahaan Batam, namun sampai dengan 31 Desember 2017 belum direalisasikan.
 - penerimaan atas pembayaran UWTO sebesar Rp245.016.200,00 pada tanggal 23 Desember 2014 yang tidak dapat diidentifikasi baik faktur maupun penyeter (sampai dengan berakhirnya periode Laporan Keuangan. Direktorat Lahan belum memberikan klarifikasi yang memadai).
 - penerimaan atas pembayaran UWTO sebesar Rp1.281.139.200,00 (penyeteroran pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp213.523.200,00 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp213.523.200,00 tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp213.523.200,00 tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp213.523.200,00 tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp213.523.200,00 dan tanggal 12 Oktober sebesar Rp213.523.200,00) yang tidak dapat diidentifikasi baik faktur maupun penyeter (sampai dengan berakhirnya periode Laporan Keuangan. Direktorat Lahan belum memberikan klarifikasi yang memadai).
 - Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp21.689.291.173,00 dan Rp41.641.507.291,00



merupakan jaminan yang harus diberikan oleh pihak investor sebagai pelaksanaan pembangunan di atas lahan yang telah dialokasikan. Setiap penerima alokasi Lahan diwajibkan mengurus dokumen administrasi ke BP Batam dan Pemerintah Kota dan segera memulai kegiatan pembangunan fisik secara kontinyu dengan tidak menelantarkan lahan yang telah dialokasikan dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkan izin prinsip pengalokasian lahan. Jika dalam waktu yang tercantum telah terlampaui, ternyata penerima alokasi lahan belum melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, maka JPP tersebut akan menjadi milik BP Batam dan pengalokasian lahannya dapat dibatalkan (Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 74 Tahun 2014). Mulai Tahun 2017 tidak terdapat lagi penyetoran JPP ke dalam rekening Dana Kelolaan (Titipan) BP Batam, berdasarkan Perka 10 Tahun 2017 mekanisme JPP dilakukan dengan cara memberikan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Pembangunan, Garansi Bank per 31 Desember 2017 sebesar Rp494.935.750,00 merupakan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan dari PT. Chye Joo Sukses Indonesia dengan Nomor Garansi Bank MBG666110538417N pada Bank Mandiri (Rincian JPP dan Garansi Bank dapat dilihat pada lampiran 27).

Dari Jumlah Nilai JPP per 31 Desember 2016 sebesar Rp41.641.507.291,00, dapat dirinci sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah	Total
a.	JPP diakui sebagai pendapatan BP Batam		Rp19.952.216.118,00
b.	Sudah Evaluasi		Rp7.276.090.513,00
	1). JPP diakui sebagai pendapatan BP Batam (dikoreksi pada Tahun 2018)	Rp1.802.650.079,00	
	2). JPP yang telah dievaluasi namun dalam proses verifikasi administrasi	Rp5.315.558.761,00	
	3). JPP dapat dikembalikan	Rp157.881.673,00	
c.	c. Belum Evaluasi		Rp14.413.200.660,00
	1). Kurang dari 3 Tahun	Rp12.989.629.678,00	
	2). Lebih dari 3 Tahun	Rp1.423.570.982,00	



- Pengakuan Pendapatan atas JPP sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp19.952.216.118,00 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Unit Kantor Pengelolaan Lahan, Kepala Satuan Pemeriksa Internal dan Kepala Biro Keuangan dengan No JV-UJK-021-12-02-2017 tanggal 31 Desember 2017.
- Pengakuan Pendapatan atas JPP yang telah dilakukan proses evaluasi dan telah ditetapkan sebagai Pendapatan sebesar Rp1.802.650.079,00 pada Bukti Kas No DK/2018/02/0003 sd 0050 tanggal 27 Februari 2018 dan BK/2018/02/4272 tanggal 28 Februari 2018.
- Titipan Uang Muka UWTO per 31 Desember 2017 sebesar Rp23.613.500.250,00 adalah perkiraan yang menampung uang Muka UWTO yang belum diakui sebagai pendapatan UWTO. [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 28\)](#)
- Titipan Jaminan Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.661.566.573,00 merupakan jaminan yang harus diberikan oleh pihak investor sebagai pelaksanaan pembangunan di atas lahan yang telah dialokasikan, jika pembangunan dilaksanakan sesuai perjanjian maka jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Badan Pengusahaan Batam. Sebaliknya jika pemohon tidak melaksanakan pembangunan sesuai perencanaan dan waktu yang telah ditentukan maka Badan perusahaan Batam memberikan surat peringatan hingga mencabut alokasi lahan yang telah diterbitkan dan jaminan tersebut akan diakui sebagai pendapatan Badan Pengusahaan Batam. [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 29\).](#)

D.4.1.3.b. Kantor Air dan Limbah

Titipan Pihak Ketiga pada Kantor Air dan Limbah Per per 31 Desember 2017 sebesar Rp135.257.040,00 merupakan Deposit pada Kantor Air dan Limbah adalah Pencatatan atas uang jaminan Pelanggan Kantor Air dan Limbah yaitu pelanggan KPLI B3 dan apabila perjanjian berakhir dan Pelanggan mengundurkan diri maka pelanggan dapat meminta kembali uang jaminan tersebut. [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 30\).](#)



D.4.1.3.c. Kantor BUBU Hang Nadim

Titipan Pihak Ketiga pada BUBU Hang Nadim Per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.640.512.077,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Titipan Pemabayaran pada Kantor Bandara	1.342.886.960,00
2	Penerimaan Sementara	521.975.932,00
3	Titipan Pembayaran Pihak Ketiga Lainnya	775.649.185,00
	Jumlah	2.640.512.077,00

- Titipan Pembayaran pada Kantor Bandara sebesar Rp1.342.886.960,00 adalah titipan pihak ketiga akibat salah transfer dari pihak Debitur (PT. Malindo) dan saat ini dalam proses permohonan pengembalian dana ke Biro Keuangan Batam Center.
- Penerimaan sementara sebesar Rp521.975.932,00 yang terdiri dari :
 - penerimaan yang tidak diketahui debiturnya sebesar Rp189.438.605,00;
 - penerimaan yang telah diketahui debiturnya tetapi tidak diketahui peruntukan pembayarannya sebesar Rp272.811.640,00;
 - kelebihan pembayaran dengan nominal diatas Rp1.000,00 sebesar Rp59.725.687,00.
- Titipan pembayaran pihak ketiga lainnya sebesar Rp775.649.185,00 merupakan Titipan Jaminan Jasa Layanan Kebandarudaraan yang belum diakui sebagai pendapatan.

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 31).

D.4.1.3.d. Kantor Pelabuhan Laut

Titipan Pihak Ketiga Kantor Pelabuhan Laut per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.831.103.544,00 merupakan sisa penerimaan di Bank yang belum diketahui peruntukannya. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 32).

D.4.1.3.e. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP)

Titipan Pihak Ketiga pada Rumah Sakit BP Batam Per 31 Desember 2017 sebesar Rp645.452.446,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Deposit/simpanan Pelanggan RSBP	81.750.000,00
2	Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya	555.577.446,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
3	Penerimaan Sementara	8.125.000,00
	Jumlah	645.452.446,00

Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp645.452.446,00 dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Deposit sebesar Rp81.750.000,00 merupakan jaminan pasien dalam perawatan yang belum diselesaikan pada saat pasien pulang.
- Titipan Dana Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp555.577.446,00 merupakan jaminan perusahaan sebesar Rp555.000.000,00 dan pendapatan bunga bersih sebesar Rp577.446,00. (Rincian dilihat pada lampiran 33)
- Penerimaan sementara sebesar Rp8.125.000,00 merupakan kelebihan bayar para pasien maupun pelanggan lainnya. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 34)

D.4.1.3.e. Kantor Perwakilan Jakarta

Titipan Pihak Ketiga pada Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.679.127,00 terdiri dari *Service Charge* KGH pegawai yang belum dibayarkan/disetorkan kepada pegawai.

Dana Pihak Ketiga

D.4.1.4. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2017 sebesar Rp56.761.719.355,00 merupakan selisih pencatatan Kas dan Bank BLU dengan saldo rekening koran bank yang teridentifikasi sebagai *outstanding check*. Rincian Dana Pihak Ketiga Badan Pengusahaan Batam terdiri dari:

Unit	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	51.221.760.197,00
2	Kantor Pelabuhan Laut	5.539.959.158,00
	Jumlah	56.761.719.355,00

- Dana Pihak Ketiga pada Kantor Pusat per 31 Desember 2017 sebesar Rp51.221.760.197,00 merupakan hasil rekonsiliasi Kas dan Bank BLU terdapat giro *Check* yang beredar (*outstanding check*) dan belum dicairkan oleh supplier (pihak ketiga) pada Bank Mandiri 109. 000091001370.
- Dana Pihak Ketiga Kantor Pelabuhan Laut per 31 Desember 2017 sebesar



Rp5.539.959.158,00 merupakan hasil rekonsiliasi Kas dan Bank BLU terdapat giro *Check* yang beredar (*outstanding check*) dan belum dicairkan oleh supplier (pihak ketiga) pada Bank BNI 4505050506.

*Utang Lancar
Uang
Penghargaan
Pengabdian
(UPP)*

D.4.1.5. Utang Lancar Uang Penghargaan Pengabdian (UPP)

Utang Lancar UPP Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp165.509.372.789,00 merupakan kewajiban Badan Pengusahaan Batam kepada pegawai yang telah diputus hubungan kerjanya untuk memberikan uang penghargaan masa kerja yang jatuh tempo pada tahun 2016. Kewajiban dimaksud dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 140/KPTS.UM/XII/1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Peraturan Kepegawaian Otorita Batam Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 89/KPTS.PEG/KA/VIII/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang penyempurnaan pasal 79 Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 140/KPTS.UM/XII/1994 tanggal 28 Desember 1994. Peraturan ini kemudian diubah dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010. serta perubahan terakhir dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 02 Mei 2014 tentang Uang Penghargaan Pengabdian Pegawai Badan Pengusahaan Batam (UPP).

Pembayaran premi per 31 Desember 2017 sebesar Rp248.264.059.184,00 terdiri dari pembayaran premi Tahap I sebesar 5% kepada PT. Asuransi Jiwasraya pada bulan Januari 2016 sebesar Rp20.688.671.599,00 sesuai Bukti Kas Pembayaran 2016/02/0527 tanggal 17 Februari 2015. Pembayaran premi tahap ke II sebesar Rp227.575.387.585,00 sesuai Nomor BKS 2016/06/1333 tanggal 29 April 2016 sesuai skema pembayaran pada perjanjian Kerjasama Nomor: 129/SPJ/KA/12/2015 dan Nomor:212.SJ.U.1215 tanggal 30 Juni 2017. Pada Pasal 6 perjanjian dimaksud disepakati bahwa pembayaran premi oleh Badan pengusahaan Batam adalah sebesar Rp413.773.431.972,00.

Utang Lancar UPP sebesar nihil dikarenakan telah dibayarkan premi tahap ke III sebesar Rp163.981.515.419,00 Nomor B/K 2017/08/3906 tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Dana Uang Penghargaan Pengabdian Badan Pengusahaan Batam



Nomor 1153/KA/8/2017 dan 127.SJ.U.0817 tanggal 14 Agustus 2017, dan atas sisa saldo UPP sebesar Rp1.527.857.370,00 telah dilakukan reklasifikasi ke pendapatan, dengan Skema Pembayaran dibawah ini:

No	Tahapan ke	Prosentase Pembayaran Premi	Besar Pembayaran (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
1	I	5%	20.688.671.599,00	30 Januari 2016
2	II	55%	227.575.387.585,00	10 April 2016
3	III	40%	165.509.372.789,00	10 April 2017

Pendapatan Diterima Dimuka

D.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp1.169.990.012.803,00 dan Rp1.096.852.680.598,00 pendapatan yang diperoleh dari hak atas pengalokasian lahan selama 30 (tiga puluh) tahun pada unit Kantor Pengelolaan Lahan yang terdiri dari:

No	Unit	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Kantor Pengelolaan Lahan	1.169.990.012.803,00	1.091.058.863.190,00
2	Direktorat Pemanfaatan Aset	0.00	5.793.817.408,00
	Total	1.169.990.012.803,00	1.096.852.680.598,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 35)

Mutasi penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 31 Desember 2017 pada Kantor Pusat:

Unit	Saldo Awal Per 31 Desember 2017 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2017 (Audited)
		Debet	Kredit	
Kantor Pengelolaan Lahan	1.091.058.863.190,00	82.249.833.212,00	161.180.982.825,00	1.169.990.012.803,00
Direktorat Pemanfaatan Aset	5.793.817.408,00	5.793.817.408,00		0,00
Jumlah	1.096.852.680.598,00	88.043.650.620,00	161.180.982.825,00	1.169.990.012.803,00

Penjelasan Mutasi Penambahan dan Pengurangan Pendapatan diterima dimuka sebagai berikut:

Kantor Pengelolaan Lahan

- Penambahan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar



Rp161.180.982.825,00 pada Kantor Pengelolaan Lahan terdiri dari:

- Pendapatan UWTO Yang Ditangguhkan tahun berjalan sebesar Rp95.754.930.721,00,
 - Penyesuaian pemindahan saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan ke Direktorat Pemanfaatan Aset sesuai Berita Acara Nomor 28/A1.2/8/2017 sebesar Rp5.542.522.958,00
 - Penyesuaian karena adanya migrasi piutang UWTO dari sistem LMS (Land Management System) ke FBMS (Finance Billing Management System) sebesar Rp59.883.529.146,00.
- Pengurangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp82.249.833.212,00 pada Kantor Pengelolaan Lahan terdiri dari:
 - Koreksi pendapatan yang ditangguhkan atas koreksi faktur yang dilakukan pada 31 Desember 2016 dengan nomor faktur 1043/F/PL/IV/2005 sebesar Rp1.330.000,00;
 - Koreksi pembatalan faktur sebesar Rp19.294.797.227,00 terdiri dari faktur nomor C.0047041701 dan C.0137101701 atas nama PT. Sijora Artha Sukses, faktur nomor C.0096061703 atas nama Perkumpulan Usaha Kecil Pribumi;
 - Penyesuaian saldo pendapatan yang ditangguhkan berdasarkan Nota Dinas Satuan Pemeriksa Internal Nomor 450/SPI/11/2017 dan Nota Dinas Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Nomor 494/A3.4/11/2017 tanggal 20 November 2017 sebesar Rp48.599.490,00;
 - Pendapatan UWTO yang ditangguhkan yang diakui menjadi pendapatan UWTO sebesar Rp43.617.802.479,00;
 - Penyesuaian saldo pendapatan yang ditangguhkan atas koreksi pembatalan faktur piutang Lahan UWTO yang telah dievaluasi dan diverifikasi sebesar Rp19.287.304.017,00.

Direktorat Pemanfaatan Aset

- Pengurangan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.793.817.407,81 terdiri dari pendapatan UWTO yang ditangguhkan yang telah diakui menjadi pendapatan UWTO sebesar Rp251.294.449,54 dan pemindahan saldo pendapatan yang ditangguhkan Direktorat Pemanfaatan Aset ke Kantor Pengelolaan Lahan sesuai Berita Acara Nomor 28/A1.2/8/2017 sebesar Rp5.542.522.958,27.



Utang Jangka
Pendek
Lainnya

D.4.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp5.384.500,00 dan Rp5.824.500,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	PP1 KGH	5.384.500,00	5.824.500,00
Jumlah		5.384.500,00	5.824.500,00

Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.384.500,00 merupakan utang pajak daerah (PB1) atas penerimaan dari kegiatan operasional Kuningan *Guest Hosue* Jakarta yang belum disetorkan.

Ekuitas

D.5 Ekuitas

Jumlah Ekuitas Per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp26.951.507.926.788,00 dan Rp26.724.968.288.234,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2017 terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp26.724.968.288.234,00 dikurang Defisit Tahun Berjalan Rp251.176.325.475,00 ditambah koreksi nilai aset non revaluasi sebesar Rp150.863.528.172,00 dikurangi koreksi lain-lain Rp54.893.219.065,00, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp381.745.654.922,00 sehingga saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp26.951.507.926.789,00.



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

E.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan negara bukan pajak lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp953.631.494.983,00 dan Rp771.995.101.348,00 dan Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional yang diperoleh dari penerimaan atas jasa pada unit-unit usaha Badan Pengusahaan Batam. Pendapatan negara bukan pajak lainnya periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 terdiri dari Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan sebesar Rp810.042.519.915,00, Pendapatan Usaha Lainnya sebesar Rp142.967.783.402,00 dan Retur Pendapatan sebesar Rp24.508.500,00, keuntungan lainnya sebesar Rp725,00 serta Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-lembaga/Badan Usaha-Barang/Jasa sebesar Rp4.596.682.441,00 Rincian Pendapatan negara bukan pajak lainnya sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
A. Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan			
1	Pendapatan Kantor Pusat	67.669.145.758,00	81.632.448.336,00
2	Pendapatan Usaha Kantor Air dan Limbah	18.393.797.355,00	17.665.106.241,00
3	Pendapatan Usaha BUBU Hang Nadim	241.022.139.454,00	179.136.722.711,00
4	Pendapatan Usaha Kantor Pelabuhan Laut	404.312.833.387,00	204.653.675.639,00
5	Pendapatan Usaha Kantor Perwakilan Jakarta	626.460.000,00	941.427.000,00
6	Pendapatan Usaha Rumah Sakit BP Batam	78.018.143.961,00	71.923.920.866,00
7	Eliminasi Pendapatan RSOB	0,00	(6.684.899.484,00)
8	Pendapatan Usaha RSBP setelah eliminasi (8=6-7)	78.018.143.961,00	65.239.021.382,00
	Jumlah A = (1+2+3+4+5+8)	810.042.519.915,00	549.268.401.309,00
B. Pendapatan Usaha Lainnya			
1	Pendapatan Kantor Pusat	87.936.505.249,00	67.755.797.380,00
2	Pendapatan Usaha Kantor Air dan Limbah	9.938.382.643,00	13.335.422.516,00
3	Pendapatan Usaha BUBU Hang Nadim	8.603.759.846,00	14.226.807.337,00
4	Pendapatan Usaha Kantor Pelabuhan Laut	35.905.931.359,00	126.916.484.781,00
5	Pendapatan Usaha Kantor Perwakilan Jakarta	11.287.835,00	436.344.112,00



No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
6	Pendapatan Usaha Rumah Sakit BP Batam	571.916.469,00	55.843.913,00
	Jumlah (B)	142.967.783.402,00	222.726.700.039,00
C. Retur Pendapatan & Keuntungan Lainnya			
1	Retur Pendapatan Rumah Sakit BP Batam	24.508.500,00	0,00
2	BUBU Hang Nadim	725,00	0,00
	Jumlah (C)	24.509.225,00	0,00
D. Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan			
1	Rumah Sakit BP Batam	3.986.447.441,00	0,00
2	BUBU Hang Nadim	610.235.000,00	0,00
	Jumlah (D)	4.596.682.441,00	0,00
	Jumlah (A+B+C+D)	957.631.494.983,00	771.995.101.348,00

*Pendapatan
Usaha dari Jasa
Layanan*

E.1.1. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan usaha dari Jasa Layanan periode sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp810.042.519.915,00 berdasarkan unit terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	67.669.145.758,00
2	Kantor Air dan Limbah	18.393.797.355,00
3	BUBU Hang Nadim	241.022.139.454,00
4	Kantor Pelabuhan Laut	404.312.833.387,00
5	Pendapatan Usaha Rumah Sakit	78.018.143.961,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	626.460.000,00
7	Jumlah Pendapatan Usaha	810.042.519.915,00

E.1.1.1. Kantor Pusat

Pendapatan Usaha Kantor Pusat sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp67.669.145.758,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pengelolaan Lahan	
	Pendapatan UWTO	38.881.662.964,00
	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	178.287.104,00
	Pendapatan Adminstrasi Peralihan	5.976.726.206,00
	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	2.900.000,00
	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	54.400.000,00
	Pendapatan Penggantian Dokumen	22.200.000,00
	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	1.214.600.000,00
	Jumlah (1)	46.330.776.274,00



No	Keterangan	Jumlah (Rp)
2	Direktorat Pemanfaatan Aset:	
	Pendapatan Retribusi Tiket	1.035.790.000,00
	Pendapatan dari Bida Sekupang	811.812.293,00
	Pendapatan dari Bida Ampar	1.847.311.471,00
	Pendapatan dari Bida Kuning	3.749.030.380,00
	Pendapatan dari Bida Kabil	2.110.077.051,00
	Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	329.392.900,00
	Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan	24.575.400,00
	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	45.343.500,00
	Pendapatan Sewa Kandang Ternak	90.000.000,00
	Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	313.900.000,00
	Pendapatan Jasa Pemotongan Ternak	19.950.000,00
	Pendapatan Jasa Kunjungan Wisata	6.340.000,00
	Pendapatan Hasil Produksi Agribisnis	2.205.000,00
	Pendapatan agribisnis lainnya	750.000,00
	Jumlah (2)	10.386.477.995,00
3	PDSI	
	Pendapatan Data Center IT Center (detail)	7.632.873.600,00
	Jumlah (3)	7.632.873.600,00
4	Direktorat Prasarana dan Sarana	
	Perijinan Pematangan Lahan	1.061.000.000,00
	Perijinan Pembersihan Lahan	9.000.000,00
	Pendapatan pemakaian lahan ROW untuk utilitas	178.093.560,00
	Pendapatan penghijauan / show room bunga / tanaman	332.058.440,00
	Pendapatan pemakaian Lahan ROW untuk jasa lainnya	538.043.320,00
	Pendapatan dari sewa lahan reklame	1.130.602.570,00
	Jumlah (4)	3.248.797.890,00
5	Direktorat Lalu Lintas Barang	
	Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang	70.220.000,00
	Jumlah (5)	70.220.000,00
	Total (1+2+3+4+5)	67.669.145.759,00

Pendapatan usaha dari jasa layanan terdiri dari Pendapatan Faktur dan Penerimaan langsung Tunai/kas. Pendapatan Faktur adalah pendapatan yang penerimaannya menggunakan faktur dan penyeterannya langsung dilakukan oleh pihak ketiga ke rekening Badan Pengusahaan Batam, sedangkan Pendapatan Non Faktur adalah pendapatan yang penerimaannya disetorkan langsung oleh pihak ketiga ke rekening Badan Pengusahaan Batam tanpa menjadi Piutang terlebih dahulu. Pendapatan usaha berdasarkan metode penerimaan (Faktur dan Non Faktur) adalah sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan dari Faktur		
Pendapatan UWTO	38.881.662.963,00	59.278.129.912,00
Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	178.287.104,00	426.500.000,00
Pendapatan Adminstrasi Peralihan	5.976.726.206,00	2.806.388.640,00
Pendapatan revisi Gambar Penetapan Lokasi	2.900.000,00	-
Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	54.400.000,00	2.700.000,00
Pendapatan Penggantian Dokumen	22.200.000,00	-
Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	1.214.600.000,00	-
Pendapatan Penghijauan / show room bunga / tanaman	332.058.440,00	-
Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya	538.043.320,00	-
Pendapatan dari Sewa Lahan Reklame	1.130.602.570,00	1.591.111.000,00
Pendapatan Data Center IT Center (detail)	7.632.873.600,00	9.868.394.450,00
Jumlah (I)	55.964.354.203,00	73.973.224.002,00
Penerimaan Non Faktur		
Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang	70.220.000,00	89.620.000,00
Pendapatan Perijinan Lainnya	-	555.052.000,00
Pendapatan Retribusi Tiket	1.035.790.000,00	373.070.000,00
Pendapatan dari Bida Ayu	-	233.449.050,00
Pendapatan dari Bida Sekupang	811.812.293,00	831.579.521,00
Pendapatan dari Bida Ampar	1.847.311.471,00	1.498.660.742,00
Pendapatan dari Bida Kuning	3.749.030.380,00	3.288.736.724,00
Pendapatan dari Bida Kabil	2.110.077.051,00	301.308.847,00
Pendapatan Agribisnis	-	31.992.000,00
Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	329.392.900,00	155.253.950,00
Pendapatan Sewa Lokasi Perternakan	24.575.400,00	-
Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	45.343.500,00	6.000.000,00
Pendapatan Sewa Kandang Ternak	90.000.000,00	43.495.000,00
Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	313.900.000,00	85.000.000,00
Pendapatan Jasa Pematangan Ternak	19.950.000,00	6.870.000,00
Pendapatan Jasa Kunjungan Wisata	6.340.000,00	-
Pendapatan Hasil Produksi Agribisnis	2.205.000,00	-
Pendapatan Agribisnis lainnya	750.000,00	5.120.000,00
Perizinan Pematangan Lahan	1.061.000.000,00	134.000.000,00
Perizinan Pembersihan Lahan	9.000.000,00	-
Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	178.093.560,00	20.016.500,00
Jumlah (II)	11.704.791.555,00	7.659.224.334,00
Total (I) + (II)	67.669.145.758,00	81.632.448.336,00



E.1.1.2. Kantor Air dan Limbah.

Pendapatan Usaha Kantor Air dan Limbah sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp18.393.797.355,00 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjualan Air Baku	16.959.432.047,00
Pengolahan Air Limbah	408.140.000,00
Pendapatan Penyedotan Air Limbah	2.750.000,00
Sewa Lahan KPLI B3	1.023.475.308,00
Jumlah	18.393.797.355,00

Pendapatan Kantor Air dan Limbah sampai dengan 31 Desember 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penjualan Air Baku sebesar Rp16.959.432.047,00 adalah penjualan air baku kepada PT. Adhya Tirta Batam dan PT. Batamindo Investment Cakrawala masing-masing sebesar Rp14.500.438.500,00 dan Rp2.458.993.547,00 Pendapatan Air Baku adalah Pendapatan atas penjualan Air Baku kepada PT. Adhya Tirta Batam berdasarkan Surat Kepala BP Batam Nomor 114 Tahun 2010 tentang perubahan pertama atas Keputusan Kepala BP Batam Nomor 108 tahun 2010 tentang Tarif Air Baku di pulau Batam, kemudian berdasarkan PMK RI Nomor 148/PMK.05/2016 dan kepada PT. Batamindo Investment Cakrawala berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 21 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Kantor Pengelolaan air dan Limbah BP Batam.
- b. Pendapatan Pengolahan Air Limbah sebesar Rp408.140.000,00 adalah pendapatan dari pengolahan air limbah cair domestik berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 21 tahun 2016.
- c. Penyedotan air limbah sebesar Rp2.750.000,00 adalah pendapatan dari pengurusan sumur tinja berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 21 tahun 2016.
- d. Pendapatan Sewa sebesar Rp1.023.475.308,00 adalah pendapatan dari tenant di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 Kabil, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pendapatan sewa lahan KPLI B3 sebesar Rp780.455.308,00



- Jasa Pengelolaan Kawasan KPLI B3 sebesar Rp221.000.000,00
- Pendapatan sewa Forklif sebesar Rp560.000,00
- Pendapatan Loading Bay sebesar Rp2.100.000,00
- Sewa ruangan kantor sebesar Rp19.360.000,00

Dengan tarif berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 21 tahun 2016 yang mulai diberlakukan terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2016.

E.1.1.3. BUBU Hang Nadim.

Pendapatan Usaha BUBU Hang Nadim sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp241.022.139.454,00 terdiri dari Pendapatan Aeronautika dan Non Aeronautika masing-masing sebesar Rp169.183.875.279,00 dan Rp71.838.264.175,00.

Pendapatan Aeronautika sebesar Rp169.183.875.279,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendaratan Dalam Negeri	8.300.119.950,00
2	Penempatan Dalam Negeri	1.323.828.515,00
3	Pendaratan Luar Negeri	2.854.296.025,00
4	Penempatan Luar Negeri	527.932.015,00
5	PSC Dalam Negeri	140.872.520.000,00
6	PSC Luar Negeri	6.181.702.740,00
7	Garbarata Dalam Negeri	2.950.230.800,00
8	Counter Dalam Negeri	2.932.462.000,00
9	Garbarata Luar Negeri	600.600.000,00
10	Counter Luar Negeri	122.902.000,00
11	Konsesi Fee Aero	811.322.134,00
12	Pendapatan Aero Lain-lain	1.025.159.100,00
13	Pendapatan Pas Bandara	629.035.000,00
14	GSE/Royalti	51.765.000,00
Jumlah		169.183.875.279,00

Pendapatan Non Aeronautika sebesar Rp71.838.264.175,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Sewa	16.974.480.762,00
2	Pendapatan Reklame	2.711.767.124,00
3	Pendapatan Air	329.669.880,00
4	Konsesi Fee	33.146.319.177,00
5	Pendapatan Listrik	5.039.013.723,00
6	Non Aeronautica Lainnya	1.299.053.646,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
8	Pendapatan Tanah	796.514.725,00
9	Fasilitas Bus Apron	689.500.000,00
10	Pendapatan FDS	8.896.274.988,00
11	Pendapatan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara	1.955.670.150,00
Jumlah		71.838.264.175,00

Pendapatan Aeronautika dan Non Aeronautika per 31 Desember 2017 meningkat dikarenakan adanya Perubahan Tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, dan adanya Pendapatan baru pada Pendapatan Non Aeronautika Lainnya (Taxi Pangkalan & Porter), Fasilitas bus apron (sebelumnya diakui pendapatan aeronautika), Pendapatan FDS dan Pendapatan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara. Selain akibat dari Perubahan Tarif, peningkatan pada pendapatan Konsesi Fee juga diakibatkan adanya koreksi COA atas PT DBM dan Persero yang sebelumnya diakui pada Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak lain.

E.1.1.4. Kantor Pelabuhan Laut.

Pendapatan Usaha Kantor Pelabuhan Laut sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp404.312.833.387,00 terdiri dari Pendapatan Usaha Jasa Layanan Kapal sebesar Rp319.504.120.969,00, Jasa Layanan Barang sebesar Rp48.291.429.974,00, Jasa Layanan Alat sebesar Rp2.770.017.475,00, dan Jasa Layanan Lainnya sebesar Rp33.747.264.969,00. Pendapatan Usaha Jasa Layanan Kapal sebesar Rp319.504.120.969,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jasa Labuh	115.599.640.846,00
2	Jasa Tambat	201.441.477.082,00
3	Jasa Pemanduan	129.451.838,00
4	Jasa Air	2.333.551.203,00
Jumlah		319.504.120.969,00

Pendapatan Usaha Jasa Layanan Barang sebesar Rp48.291.429.974,00 dapat dirinci sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jasa Dermaga	25.622.468.849,00
2	Jasa Penumpukan	4.749.637.200,00
3	Jasa Bongkar Muat	327.311.430,00
4	Chasis Fee	2.420.100.029,00
5	Troughput Fee	6.741.181.567,00
6	Imbalan Layanan Bongkar Muat	8.430.730.899,00
Jumlah		48.291.429.974,00

Pendapatan Jasa Layanan Alat Kantor Pelabuhan Laut sebesar Rp2.770.017.475,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga atas penyewaan peralatan milik Kantor Pelabuhan Laut.

Pendapatan Jasa Layanan Lainnya Kantor Pelabuhan Laut sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp33.747.264.969,00 terdiri dari pendapatan Retribusi sebesar Rp19.294.577.392,00, Jasa Sewa sebesar Rp14.015.993.634,00, dan Jasa Layanan Lainnya sebesar Rp436.693.943,00.

E.1.1.5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.

Pendapatan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp78.018.143.961,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Rawat Inap	11.646.705.175,00
2	Penghasilan Rawat Jalan	2.873.361.840,00
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	1.010.056.014,00
4	Pendapatan Operasional Tindakan Medis	29.694.233.495,00
5	Pendapatan Operasional Unit Penunjang	32.594.335.136,00
6	Pendapatan Operasional Lain	199.452.301,00
Jumlah Pendapatan Usaha (1)		78.018.143.961,00

E.2.1.6. Kantor Perwakilan Jakarta.

Pendapatan Usaha Kantor Perwakilan Jakarta sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp626.460.000,00 merupakan Pendapatan dari kegiatan Pengelolaan Kuningan Guest House di Jakarta.



Pendapatan
Usaha Lainnya

E.1.2. Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp142.967.783.402,00 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya	48.247.522.932,00
Pendapatan Sewa	6.282.975.196,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	37.681.817.988,00
Lain-lain	50.755.467.286,00
Jumlah	142.967.783.402,00

E.1.2.1. Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp48.247.522.932,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Air dan Air Limbah	9.702.785.435,00
2	BUBU Hang Nadim	6.194.162.725,00
3	Kantor Pelabuhan Laut	32.350.574.772,00
	Total	48.247.522.932,00

(Rincian Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dapat dilihat pada Lampiran 36)

Pendapatan Usaha Lainnya Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya sebesar Rp48.247.522.932,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lainnya pada **Kantor Pengelolaan Air dan Limbah** sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp9.702.785.435,00 merupakan pendapatan hasil kerjasama dengan PT. Adhya Tirta Batam yang terdiri dari dari pendapatan sewa aset sebesar Rp3.012.785.435,00 dan Pendapatan Royalti sebesar Rp6.690.000.000,00.
2. Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lainnya pada **BUBU Hang Nadim** sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.194.162.725,00 merupakan Pendapatan Parkir PT. Adhil Sukses Pratama.
3. Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lainnya pada **Kantor Pelabuhan Laut** sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp32.350.574.772,00 terdiri dari:



No	Unit	Jumlah (Rp)
1	KSO Alat	8,670,450,00
2	KSO Dermaga	414,540,803,00
3	KSO Chasis	796,098,00
4	KSO Iklan	98,801,929,00
5	KSO Pandu	1,061,984,738,00
6	KSO Parkir	393,840,000,00
7	KSO Pelayanan Air Bersih Kapal	19,692,186,00
8	KSO Royalti	1,287,103,850,00
9	KSO Sampah	34,371,784,00
10	KSO Seaport Tax/Pass Orang	19,274,856,625,00
11	KSO Sewa Ruangan / Bangunan	778,626,821,00
12	KSO Tambat	2,385,823,497,00
13	KSO Tunda	6,577,212,699,00
14	KSO Pass Kendaraan	12,982,450,00
15	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya	1,270,842,00
	Jumlah	32.350.574.772,00

Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Kantor Pelabuhan Laut terdiri dari :

1. Pendapatan KSO Alat sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp8.670.450,00 adalah KSO pengelolaan crane dan forklift di pelabuhan Batu Ampar perjanjian antara PT. Tuah Selimangkarang dan Kantor Pelabuhan laut BP Batam.
2. Pendapatan KSO Dermaga sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp414.540.803,00 adalah hasil kerjasama antara PT. Port Sekupang Batam dengan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014. Dan hasil kerjasama Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.
3. Pendapatan KSO Chasis sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp796.098,00 adalah hasil kerjasama antara PT. Port Sekupang Batam dengan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014.
4. Pendapatan KSO Iklan sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp98.801.929,33 adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan



- perjanjian Nomor 04/PERJ-KA/VII/2002-110/OB ST/SPCB/VII/2002. Kemudian dilakukan perubahan perjanjian nomor 04/PERJ-KA/XII/2005-258/OB-ST/SPAD/XII/2005 dan perubahan kedua dengan nomor 118/SPJ/KA/12/2011 - 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/ IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010.
5. Pendapatan KSO Pandu sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp1.061.984.738,00 adalah KSO Pemanduan di perairan Tanjung Uncang Batam antara lain PT. Bias Delta Pratama dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian Nomor 213/SPJ/A1/10/2012 & 012/DIR-BDP/X/2012. Kemudian dilakukan perubahan perjanjian dengan nomor 1262/SPJ/A3/9/2017 & 0068/BDP-DIR/X/2017. Selanjutnya dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 1747/SPJ/A3/12/2017.
 6. Pendapatan KSO Parkir sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp393.840.000,00 adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian Nomor 118/SPJ/KA/12/2011-014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT.Indodharma Corpora dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010.
 7. Pendapatan KSO Pelayanan Air Bersih 31 Desember 2017 sebesar Rp19.692.186,00 adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.
 8. Pendapatan KSO Royalti sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp1.287.103.850,00 adalah hasil kerjasama dengan PT. Indodharma Corpora dan PT. Synergy Tharada.
 9. KSO Sampah sebesar Rp34.371.784,00 adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.
 10. Pendapatan KSO Seaport Tax/Pass Orang sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp19.274.856.625,02 terdiri dari KSO Pengelolaan Terminal



- Penumpang Internasional Harbour Bay antara PT. Citra Tri Tunas dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2012 - 156/SPJ/KA/7/2012, dan 015/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2013 - 453/SPJ/KA/7/2013. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT.Indodharma Corpora dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010, KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian Nomor 04/PERJ-KA/VII/2002 - 110/OB-ST/SPCB/VII/2002. Perubahan kedua terhadap perjanjian kerjasama operasi pengelolaan terminal ferry internasional batam centre nomor 118/SPJ/KA/12/2011 - 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011.
11. Pendapatan KSO Sewa Ruang dan Bangunan sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp778.626.820,37 adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian Nomor 04/PERJ-KA/VII/2002-110/OB-ST/SPCB/VII/2002. Kemudian dilakukan perubahan perjanjian nomor 04/PERJ-KA/XII/2005-258/OB-ST/SPAD/XII/2005 dan perubahan kedua dengan nomor 118/SPJ/KA/12/2011 - 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011. Dan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010-010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010.
 12. Pendapatan KSO Tambat sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp2.385.823.497,00 diantaranya adalah pendapatan KSO Tambat hasil kerjasama dengan beberapa mitra diantaranya PT. Sarana Citra Nusa kabil dengan nomor perjanjian 05/PERJ-KA/IV/2004 & 002/SC/IV/2004 dan PT. Port Sekupang Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014.
 13. Pendapatan KSO Tunda sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp6.577.212.699,00 adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO



Pengelolaan Kapal Tunda Teluk Jodoh antara PT. Gemalindo dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian sebagai berikut:

- Pengelolaan kapal tunda TB. Gema I Perjanjian Nomor 40/SPJ/A3/9/2015- 02/GS-Dir/IX/2015 Tanggal 9 Juli 2015 jangka waktu 6 tahun dari tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021. Dengan perubahan kedua perjanjian kerjasama dan perubahan nama kapal dari TB. Gema I menjadi TB. Gema 5 dengan nomor perjanjian 552/SPJ/A3/4/2017.
- Pengelolaan kapal tunda TB. Gema II Perjanjian Nomor 141/SPJ/A1.2/07/2014 - 007/GS-OPS/VIII/2014 tanggal 23 Juli 2014 jangka waktu 2 tahun dari tanggal 23 juni 2014 sampai dengan 22 juni 2016. Perubahan kedua perjanjian dengan nomor 552/SPJ/A3/4/2017 tanggal 13 April 2017 jangka waktu perjanjian 6 tahun dari tanggal 3 mei 2015 sampai dengan 2 mei 2021. Masa berlaku perjanjian disesuaikan dengan perjanjian 78/SPJ/A3.2/05/2015 & 20/GS-Dir/V/2015 karena adanya penyatuan perjanjian.

KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT. Kurnia Samudra dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian sebagai berikut:

- Pengolaan Kapal Tunda TB. PATIH II Perjanjian Nomor:45/SPJ/A1.2/04/2013-039/PKS/ADM/IV/2013 tanggal 25 April 2013, jangka waktu perjanjian 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Diperpanjang dengan addendum Perjanjian Nomor:42/SPJ/A3/2015-066/PKS-PP/BTM/IX/2015 tanggal 7 September 2015, jangka waktu perjanjian sampai 26 April 2018.
- Pengolaan Kapal Tunda TB. FRANSISCUS 01 & TB.PATIH II Perjanjian Nomor:2011 846 / SPJ / A3/5/ 2017 tanggal 03 Mei 2017, jangka waktu sampai dengan s/d 23 April 2021.
- Pengolaan Kapal Tunda TB. PUTRA I Perjanjian Nomor:04/PER-PL/04/2010-068/KS/ADM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 jangka waktu 2 tahun sampai dengan 26 April 2012. Diperpanjang dengan addendum terakhir 44/SPJ/A3/2015-065/PKS-PP/BTM/IX/2015 tanggal 7 September 2015 berlaku sampai dengan 23 April 2021.
- Pengoperasian Kapal Tunda TB. Sukses 1200 Perjanjian



Nomor:101/SPJ/A3.2/09/2015-075/PKS/ADM/IX/2015 tanggal 21 September 2015 berlaku 3 tahun sampai dengan 27 September 2018.

14. Pendapatan KSO Pass Kendaraan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.982.450,00 adalah KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010-010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010.
15. Pendapatan KSO Lainnya sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp1.270.842,00 adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.

E.1.2.2. Pendapatan Sewa

Pendapatan Sewa sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.282.975.196,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	5.816.115.152,00
2	Kantor Pelabuhan Laut	178.125.545,00
3	Rumah Sakit BP Batam	288.734.499,00
	Jumlah	6.282.975.196,00

(Rincian Pendapatan Sewa dapat dilihat pada Lampiran 37)

Pendapatan Sewa sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.282.975.196,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa **Kantor Pusat** sebesar Rp5.816.115.152,00 terdiri dari:
 - Pendapatan Sewa gedung sebesar Rp4.611.940.613,00 merupakan pendapatan yang timbul dari sewa gedung asrama haji Batam Center, guest house Sekupang, Kios gedung annex 2 lantai 4, gedung indoor sporthall Temenggung Abdul Jamal.
 - Pendapatan Sewa Listrik sebesar Rp100.009.039,00 merupakan pendapatan dari sewa pemakaian listrik gedung Bida Batam Centre oleh PT. Bank Mandiri sebesar Rp47.983.819,00 dan PT. Telkomsel sebesar Rp52.025.220,00.
 - Pendapatan Sewa Lainnya sebesar Rp1.104.165.500,00 merupakan pendapatan yang timbul dari penyewaan perlengkapan pendukung gedung dan ruangan.



2. Pendapatan Sewa **Kantor Pelabuhan Laut** sebesar Rp178.125.545,00 merupakan pendapatan sewa listrik atas ruangan yang disewakan.
3. Pendapatan Sewa **Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam** sebesar Rp288.734.499,00 terdiri dari pendapatan sewa kantin yang dikelola KSU Sejahtera Bersama dan sewa ruangan pertemuan.

E.1.2.3. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp37.681.817.988,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	37.098.182.941,00
2	Kantor Air dan Air Limbah	54.795.730,00
3	BUBU Hang Nadim	266.866.387,00
4	Kantor Pelabuhan Laut	128.870.394,00
5	Rumah Sakit BP Batam	121.817.671,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	11.284.865,00
	Jumlah	37.681.817.988,00

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp37.681.817.988,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan **Kantor Pusat** sebesar Rp37.098.182.941,00 terdiri dari pendapatan jasa giro sebesar Rp12.583.065.254,00 pendapatan bunga jangka pendek sebesar Rp24.477.225.556,00 dan pendapatan jasa perbankan lainnya sebesar Rp37.892.131,00 yang merupakan pendapatan atas penutupan rekening 1090004600177 tanggal 9 Maret 2017.
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan **Kantor Air dan Limbah** sebesar Rp54.795.730,00 merupakan pendapatan jasa giro;
3. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan **BUBU Hang Nadim** sebesar Rp266.866.387,00 merupakan Pendapatan dari Jasa Giro.
4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan **Kantor Pelabuhan Laut** Badan Pengusahaan Batam Rp128.870.394,00 merupakan Pendapatan dari Jasa Giro Bank.
5. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan **Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam** Rp121.817.671,00 merupakan Pendapatan dari Jasa Giro Bank.



6. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan **Kantor Perwakilan Jakarta** sebesar Rp11.284.865,00 merupakan Pendapatan dari Jasa Giro Bank.

E.1.2.4. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan jasa lain-lain sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp50.755.467.286,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	45.022.207.157,00
2	Kantor Air dan Air Limbah	180.801.479,00
3	BUBU Hang Nadim	2.142.730.732,00
4	Kantor Pelabuhan Laut	3.248.360.648,00
5	Rumah Sakit BP Batam	161.364.299,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	2.970,00
	Jumlah	50.755.467.286,00

Pendapatan Jasa Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp50.755.467.286,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

E.1.2.4.1. Kantor Pusat

Pendapatan Jasa Lain-lain Kantor Pusat sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp45.022.207.157,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	pendapatan atas sanksi, klaim dan denda lainnya	3.109.316.358,00
2	pendapatan lain-lain	41.912.890.799,00
	Jumlah	45.022.207.157,00

E.1.2.4.2. Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Pendapatan Jasa Lain-lain Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp180.801.479,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Denda	17.509.060,00
2	Kelebihan Bayar	46.501,00
3	Pengembalian Upah Kerja	163.245.918,00
	Jumlah	180.801.479,00

E.1.2.4.3. BUBU Hang Nadim

Pendapatan Jasa Lain-lain BUBU Hang Nadim sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.142.730.732,00 terdiri dari :



No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Denda Jasa Aeronautika	555.761.318,00
2	Pendapatan Denda Jasa Non Aeronautika	774.605.404,00
3	Pendapatan atas sanksi/klaim dan denda lainnya	798.184.282,00
4	Pendapatan Lain-lain	14.179.728,00
	Jumlah	2.142.730.732,00

E.1.2.4.4. Kantor Pelabuhan Laut

Pendapatan Jasa Lain-lain Kantor Pelabuhan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.248.360.648,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas sanksi/klaim/denda	3.125.805.981,00
3	Pendapatan Denda, Jasa dari air bersih untuk property dan kapal dan Pengembalian Perjalanan Dinas	19.704.080,00
4	Pendapatan Lain-lain	102.850.587,00
	Jumlah	3.248.360.648,00

E.1.2.4.5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Pendapatan Jasa Lain-lain Rumah Sakit Badan Pengusahaan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp161.364.299,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian Kelebihan biaya	470.000,00
2	Reklas Penerimaan Sementara	6.060.992,00
3	Lebih bayar	19.185,00
4	Diskon	29.200.000,00
5	Koreksi Utang Obat	5.505.600,00
6	Koreksi Deposit Pasien	7.100.000,00
7	Pelunasan Piutang Haups Buku (Jan-Mar 2014)	113.008.522,00
	Jumlah	161.364.299,00

E.1.2.4.5. Kantor Perwakilan Jakarta

Pendapatan Jasa Lain-lain pada Kantor Perwakilan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.970,00 merupakan pendapatan dari selisih pembulatan uang kas bendahara pengeluaran.



*Retur
Pendapatan &
Keuntungan
Lainnya*

E.1.3. Retur Pendapatan & Keuntungan Lainnya

Retur Pendapatan dan Keuntungan Lainnya sampai dengan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp24.508.500,00 dan Rp725,00. Retur Pendapatan sebesar Rp24.508.500,00 merupakan pengembalian uang atas retur obat dari PT. Kebayoran Pharma pada unit Rumah Sakit BP Batam dan Keuntungan Lainnya sebesar Rp725,00 merupakan kelebihan pembayaran denda pada Kantor Bandara Hang Nadim.

*Pendapatan
Hibah Tidak
Terikat Dalam
Negeri-
Lembaga/
Badan Usaha-
Barang/Jasa*

**E.1.4. Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-
Barang/Jasa**

Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-
Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.596.682.441,00. Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-
Barang/Jasa sebesar Rp4.596.682.441,00 terdiri dari pendapatan hibah atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSBP Batam sebesar Rp3.986.447.441,00 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Kesehatan) Nomor 37/NPHD/II/2016 dan pendapatan hibah trolley sebesar Rp610.235.000,00 pada BUBU Hang Nadim dari PT. Bank Negara Indonesia sebanyak 100 unit Surat Perjanjian Kerjasama Nomor BTM/5/1083-2017 tanggal 18 Mei 2017 dan dari PT. Bank Mandiri sebanyak 100 unit Surat Perjanjian Hibah Nomor 877/A3/4/2017 tanggal 4 April 2017.

Beban Pegawai **E.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp476.796.148.499,00 dan Rp465.070.008.982.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum



berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai terdiri dari:

Uraian		Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
A. Beban Pegawai - Usaha			
1	Biaya Gaji/Upah	126.868.867.666,00	133.443.945.291,00
2	Biaya Gaji/Upah Lainnya	13.875.749.748,00	236.968.075,00
3	Biaya Tunjangan Jabatan	4.061.120.000,00	2.441.410.000,00
A. Beban Pegawai - Usaha			
4	Biaya Tunjangan Kompensasi Cuti	0,00	5.038.868.679,00
5	Biaya Tunjangan Uang Makan	8.567.974.000,00	8.100.953.996,00
6	Biaya Tunjangan Hari Raya	17.290.000,00	0,00
7	Biaya Tunjangan Lainnya	57.167.382.624,00	48.109.805.048,00
8	Biaya Lembur	367.736.450,00	0,00
9	Biaya Astek / Jamsostek	0,00	0,00
10	Biaya Bantuan Uang Duka	37.022.167,00	56.100.473,00
11	Biaya BPJS Kesehatan	110.959.440,00	55.761.736,00
12	Biaya BPJS Tenaga Kerja	325.927.469,00	392.715.593,00
13	Biaya Berobat RSBP	0,00	3.761.945.935,00
14	Biaya Berobat RS Rujukan	0,00	1.074.597.854,00
15	Biaya Berobat RS Non Rujukan	0,00	67.329.275,00
16	Biaya Kacamata	0,00	227.295.000,00
17	Biaya Pegawai Lainnya	7.726.000,00	0,00
	Jumlah (A)	211.407.755.564,00	203.007.696.955,00
B. Beban Pegawai Umum dan Adm.			
1	Biaya Gaji/Upah	159.912.326.406,00	169.514.558.549,00
2	Biaya Gaji/Upah Lainnya	15.627.385.094,00	26.353.968,00
3	Biaya Tunjangan Jabatan	5.469.665.000,00	4.422.340.500,00
4	Biaya Tunj. Kompensasi Cuti	0,00	6.993.952.908,00
5	Biaya Tunjangan Uang Makan	9.831.230.840,00	10.337.932.000,00
6	Biaya Tunjangan Pajak	0,00	5.920.028.996,00
7	Biaya Tunjangan Lainnya	72.328.545.379,00	63.264.654.701,00
8	Biaya Honor Tetap	0,00	0,00
9	Biaya Lembur	613.281.000,00	58.926.100,00
10	Biaya Astek / Jamsostek	0,00	61.980.189,00
11	Biaya Pesangon/Pensiun	0,00	0,00
12	Biaya Uang Duka	47.257.248,00	60.026.717,00
13	Biaya BPJS Tenaga Kerja	1.002.202.490,00	1.065.571.478,00
14	Biaya BPJS Kesehatan	556.499.478,00	1.080.390.300,00
15	Biaya Berobat RSBP	0,00	2.922.953.548,00
16	Biaya Berobat RS Rujukan	0,00	2.451.707.529,00
17	Biaya Berobat RS Non Rujukan	0,00	107.236.028,00
18	Biaya Kacamata	0,00	254.010.000,00
19	Biaya Kesehatan Karyawan Lainnya	0,00	128.140.000,00
20	Biaya Pegawai Lainnya	0,00	76.448.000,00
	Jumlah (B)	265.388.392.935,00	268.747.211.511,00
	Jumlah (A+B)	476.796.148.499,00	471.754.908.466,00
	Eliminasi Biaya RSBP	0,00	(6.684.899.484,00)
	Jumlah Beban Pegawai Setelah Eliminasi	476.796.148.499,00	465.070.008.982,00



*Beban
Persediaan*

E.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp114.751.847.656,00 dan Rp57.789.873.271,00 merupakan beban atas barang-barang persediaan dan habis pakai yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional. Rincian Beban Persediaan, terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
1	Obat	0,00	41.203.885.834,00
2	Alat Tulis Kantor	0,00	7.825.447.891,00
3	Bahan Cetakan	0,00	3.847.677.710,00
4	Bahan Kelontong	0,00	1.374.171.691,00
5	Bahan Bangunan dan Alat Listrik	0,00	720.190.380,00
6	Bahan untuk Operasional Lainnya	0,00	872.150.050,00
7	Suku Cadang	0,00	513.172.240,00
8	Bahan Baku	1.063.703.414,00	313.597.955,00
9	Persediaan lainnya	100.291.600.390,00	1.119.579.520,00
10	Beban Persediaan konsumsi	13.393.238.352,00	0,00
11	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	3.305.500,00	0,00
	Jumlah	114.751.847.656,00	57.789.873.271,00

*Beban Barang
dan Jasa*

E.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp144.354.513.156,00 dan Rp175.985.870.310,00 merupakan biaya barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional. Rincian Beban Jasa terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
1	Beban Bahan	46.651.681.312,00	52.535.828.576,00
2	Beban Adm Perkantoran	23.029.241.194,00	53.212.457.647,00
3	Beban Jasa Layanan	38.691.524.110,00	36.277.646.687,00
4	Beban Daya dan Jasa Usaha	31.436.285.220,00	28.532.325.215,00
5	Beban Daya dan Jasa Umum dan Adm	768.745.877,00	590.928.054,00
6	Beban Bantuan Sosial & lain2	3.476.115.400,00	4.016.802.570,00
7	Beban Lain-lain	0,00	253.000,00
8	Beban Bunga/Kliring	0,00	0,00
9	Beban Adm Bank	76.826.748,00	129.760.312,00
10	Biaya Pengembalian Usaha	224.093.295,00	689.269.230,00
11	Biaya Lain-lain	0,00	599.019,00
	Jumlah	144.354.513.156,00	175.985.870.310,00



Beban
Pemeliharaan

E.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp60.765.719.861,00 dan Rp74.837.254.600,00 merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
A. UNIT UMUM & ADMINISTRASI			
1	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan	489.154.050,00	527.757.550,00
2	Biaya Pemeliharaan Alat Berat	-	183.018.000,00
3	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor & Alat Rumah Tangga	205.325.000,00	249.816.500,00
4	Biaya Pemeliharaan Alat Studio. Komunikasi & Pemancar	-	1.751.000,00
5	Biaya Pemeliharaan Flat/Rumah Susun	3.838.115.070,00	899.210.500,00
6	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.413.609.160,00	769.598.942,00
7	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	4.382.226.875,00	8.069.197.586,00
8	Biaya Pemeliharaan Gedung Olahraga/Sporthall	1.049.065.900,00	336.082.000,00
9	Biaya Pemeliharaan Irigasi	34.116.000,00	251.330.000,00
10	Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	198.485.000,00
11	Biaya Pemeliharaan Jaringan	337.463.000,00	458.203.000,00
12	Biaya Pemeliharaan Kesehatan	0,00	6.500.000,00
13	Biaya Pemeliharaan Komputer	106.716.000,00	151.609.000,00
14	Biaya Pemeliharaan Laboratorium	46.026.000,00	119.000.000,00
15	Biaya Pemeliharaan Lainnya	6.855.569.453,00	4.192.963.937,00
16	Biaya Pemeliharaan Lift	287.079.600,00	183.985.000,00
17	Biaya Pemeliharaan Mess/Wisma/Asrama	1.796.273.500,00	-
18	Biaya Pemeliharaan Mess/Wisma/Asrama	-	957.393.124,00
19	Biaya Pemeliharaan Mobil (R4)	3.328.264.800,00	8.917.487.890,00
20	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.215.019.575,00	4.225.765.840,00
21	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	2.755.775.000,00	1.254.598.000,00
22	Biaya Pemeliharaan Sepeda Motor (R2)	36.848.400,00	432.593.250,00
23	Biaya Pml Jalan & Jembatan	-	-
24	Biaya Pemeliharaan Alat Besar	37.000.000,00	-
25	Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium	86.602.000,00	-
	Jumlah (A)	32.300.249.383,00	32.386.346.119,00



No	Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
B. UNIT USAHA			
1	Biaya Pemeliharaan Alat Berat	44.435.000,00	580.039.000,00
2	Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan	795.577.300,00	1.304.368.000,00
3	Biaya Pemeliharaan Dermaga	154.313.013,00	6.007.019.450,00
4	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.570.396.239,00	8.793.023.017,00
5	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	1.541.767.620,00	4.779.572.880,00
6	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	434.172.300,00	779.883.000,00
7	Biaya Pemeliharaan Irigasi	1.010.338.900,00	2.415.979.197,00
8	Biaya Pemeliharaan Jalan	177.337.000,00	189.000.000,00
9	Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Lainnya	3.119.369.500,00	199.035.000,00
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan	800.410.000,00	1.420.524.673,00
11	Biaya Pemeliharaan Kapal	370.632.000,00	747.678.000,00
12	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor roda 4	358.278.500,00	384.785.800,00
13	Biaya Pemeliharaan Landasan	2.656.032.715,00	1.621.609.800,00
14	Biaya Pemeliharaan Lift	111.750.000,00	-
15	Biaya Pemeliharaan Mesin	45.628.200,00	290.932.000,00
16	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.847.494.291,00	12.384.752.661,00
17	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	221.859.000,00	91.298.000,00
18	Biaya Pemeliharaan Aset Lainnya	1.632.963.560,00	461.408.003,00
19	Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Tangga	189.825.000,00	0,00
	Jumlah (B)	27.082.580.138,00	42.450.908.481,00
1	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	748.517.340,00	0,00
2	Beban Persediaan Suku Cadang	634.373.000,00	0,00
	Jumlah (C)	1.382.890.340,00	0,00
	Jumlah	60.765.719.861,00	74.837.254.600,00

*Beban
Perjalanan
Dinas*

E.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp19.156.966.035,00 dan Rp21.523.793.846,00 merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
1	Biaya Perjalanan Dalam Negeri Lainnya	2.870.432.012,00	4.640.678.210,00
2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.641.080.505,00	2.277.390.819,00



No	Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
3	Biaya Perjalanan Dinas Lainnya	53.843.352,00	2.580.000,00
4	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.674.944,00	21.319.080,00
5	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri lainnya	2.134.818.255,00	608.329.957,00
6	Perjalanan Dinas Batam - Jakarta (PP)	8.383.000,00	11.438.748.050,00
7	Perjalanan Dinas Batam - Japan (PP)	10.179.538.661,00	174.497.660,00
8	Perjalanan Dinas Batam - Pekanbaru (PP)	0,00	88.515.000,00
9	Perjalanan Dinas Batam - Singapore (PP)	111.793.725,00	572.735.127,00
10	Perjalanan Dinas Batam - Tanjung Pinang (PP)	302.120.043,00	551.687.000,00
11	Perjalanan Dinas Jakarta - Batam (PP)	305.342.729,00	1.144.462.943,00
12	Perjalanan Dinas Jakarta - Tanjung Pinang (PP)	1.544.905.809,00	0,00
13	Biaya Transportasi Dalam Kota	1.033.000,00	2.850.000,00
	JUMLAH	19.156.966.035,00	21.523.793.846,00

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi*

E.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp365.893.968.847,00 dan Rp349.845.160.301,00 merupakan beban untuk mencatat nilai penyusutan Aset tetap. Aset Lainnya dan cadangan pada Aset lain-lain dalam suatu periode. Rincian beban penyusutan dan amortisasi terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	88.731.717.442,00	73.452.856.603,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.424.012.029,00	22.324.620.988,00
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	165.429.324.698,00	166.642.622.040,00
4	Beban Penyusutan Irigasi	25.325.776.952,00	26.585.849.688,00
5	Beban Penyusutan Jaringan	42.976.044.811,00	44.344.871.171,00
6	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	125.829.500,00	125.829.500,00
7	Beban Amortisasi Software	3.186.642.269,00	3.544.316.714,00
8	Beban Amortisasi Lisensi	415.259.205,00	390.486.199,00
9	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.155.305.895,00	11.599.423.379,00
10	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	3.124.056.046,00	834.284.019,00
	JUMLAH	365.893.968.847,00	349.845.160.301,00



*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

E.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp35.801.289.780,00 yang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Berdasarkan unit mandiri. Biaya Penyisihan Piutang Tak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	615.390.548,00
2	Kantor Pelabuhan Laut	33.061.399.427,00
3	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	2.006.791.808,00
4	BUBU Hang Nadim	107.362.997,00
5	Kantor Air dan Limbah	10.345.000,00
	JUMLAH	35.801.289.780,00

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar*

E.9 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.333.536.000,00 dan Rp552.395.000,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan penerimaan atas penjualan Barang Milik Negara melalui lelang KPKNL yang terdiri dari SSBP yang disetor ke Kas Negara sebesar Rp644.796.000,00 dan yang disetor ke rekening Kas BLU BP Batam sebesar Rp688.740.000,00.

*Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar*

E.10 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.970.989.499,00 dan Rp3.676.799.885,00 merupakan beban atas penghapusan Aset yang masih memiliki sisa nilai perolehan aset yang terdiri dari Peralatan dan Mesin, Gedung Kantor dan Gedung Terminal serta Rumah Negara, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 299 Tahun 2016, 591 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017, 452 Tahun 2017, dan 453 Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017.



*Pendapatan
dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya*

E.11 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp19.529.568.160,00 dan Rp13.577.812.646,00 terdiri dari:

No	Unit	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
1	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	78.848.039,00	0,00
2	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	12.321.333.431,00	0,00
3	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi BLU	7.129.386.690,00	18.819.899.425,00
JUMLAH		19.529.568.160,00	18.819.899.425,00

- Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp78.848.039,00 yang merupakan Pengembalian atas Denda/Kelebihan Pembayaran atas Proyek tahun 2016; dan
- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp12.321.333.431,00 yang merupakan koreksi/mapping otomatis atas akun penyesuaian nilai persediaan yang dihasilkan dari koreksi otomatis aplikasi SAIBA yang berada pada sisi kredit.
- Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi BLU sebesar Rp7.129.386.690,00 yang merupakan nilai perhitungan laba kurs piutang dan penerimaan sementara.

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya*

E.12 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp9.179.481.307,00 dan Rp18.819.899.425,00 yang terdiri dari :

No	Unit	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
1	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	5.183.295.238,00	0,00
2	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	57.841.799,00	0,00
3	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	3.938.344.270,00	18.819.899.425,00
JUMLAH		9.179.481.307,00	18.819.899.425,00

- Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp57.841.799,00 yang merupakan persediaan berupa obat pada RSOB yang expired selama periode 2017;



- Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp5.183.295.238,00 yang merupakan koreksi/mapping otomatis atas akun penyesuaian nilai persediaan yang dihasilkan dari koreksi otomatis aplikasi SAIBA yang berada pada sisi kredit.
- Beban Kerugian selisih kurs yang belum terealisasi BLU sebesar Rp3.938.344.270,00 yang merupakan nilai perhitungan laba kurs piutang dan penerimaan sementara.



F. PENJELASAN ATAS POS.POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

F.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp26.724.968.288.234,00 dan Rp27.081.463.631.900,00 .

Surplus/ (Defisit LO)

F.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah (Defisit) LO Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp251.176.325.475,00 dan Rp399.445.570.666,00. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

F.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp150.863.528.172,00 dan Rp30.634.142.929,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi tersebut merupakan koreksi perubahan kuantitas dan nilai yang berasal dari hasil reklasifikasi Kontruksi Dalam Pengerjaan, perubahan nilai Akumulasi Penyusutan pada Sistem SIMAK BMN dan perolehan atas hibah yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain

F.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp54.893.219.065,00 dan Rp79.394.657.431,00. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban dan koreksi atas hibah, koreksi pencatatan pendapatan yang ditangguhkan, koreksi piutang dan pendapatan atas denda sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Koreksi Menambah Ekuitas:		
1	Koreksi lebih catat Akum. Penyisihan Piutang pada Kantor Bandara	2.032.481.814,0
2	Koreksi balik atas kesalahan pencatatan penerimaan sementara pada Kantor Pelabuhan Laut	374.927.789,00
3	Reklasifikasi piutang pada Kantor Pelabuhan Laut	113.941.598,00
4	Reklasifikasi BYMHD pada Kantor Pelabuhan Laut	412.300.000,00
5	Koreksi kelebihan pencatatan pendapatan yang ditangguhkan tahun 2016	1.330.000,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
6	Reklasifikasi pendapatan UWTO tahun lalu dari pemanfaatan aset ke Kantor Pengelolaan Lahan	5.793.817.408,00
7	Koreksi PYD atas piutang tahun lalu berdasarkan reuiu SPI NO ND 450/SPI/11/2017	47.003.897,00
8	Koreksi balik pelunasan piutang BUBU Hang Nadim	677.761.857,00
9	Reklasifikasi atas pendapatan denda RSBP	22.784.356,00
	JUMLAH (I)	9.476.348.719,00
Koreksi Mengurangi Ekuitas:		
1	Koreksi kurang catat atas pelunasan piutang tahun lalu	42.840.187,00
2	Reklasifikasi pendapatan UWTO tahun lalu dari pemanfaatan aset ke Kantor Pengelolaan Lahan	5.793.817.408,00
3	Koreksi atas pembatalan faktur pada BUBU Hang Nadim	86.487.565,00
4	Koreksi kurang pencatatan Akum. Penyisihan Piutang bandara	67.380,00
5	Koreksi Sistem HTH atas faktur tahun lalu	1,00
6	Koreksi Kelebihan Pencatatan pendapaatan atas kelebihan nilai Faktur jasa tahun lalu pada kantor laut	998.246.214,00
7	Koreksi kurang catat Faktur pada Kantor Pelabuhan Laut	17.512.854.965,00
8	Koreksi kurang catat pendapatan tahun 2016 pada RSBP	45.568.711,00
9	Koreksi Faktur Bandara	260.000,00
10	Koreksi balik pelunasan piutang BUBU Hang Nadim	694.823.694,00
11	Koreksi atas faktur piutang Kantor Pengelolaan Lahan yang telah dilakukan evaluasi (Koreksi BPK Tahun 2017)	39.194.601.659,00
	JUMLAH (II)	64.369.567.784,00
	JUMLAH KOREKSI LAIN-LAIN (I.II)	(54.893.219.065,00)

Transaksi Antar Entitas

F.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp381.745.654.922,00 dan Rp91.710.741.502,00. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	379.171.636.461,00	12.981.260.454,00
2	Diterima Dari Entitas Lain	(723.644.039,00)	(104.700.600.790,00)
3	Transfer Masuk	3.297.662.500,00	(887.902.989,00)
4	Transfer Keluar	0,00	896.501.823,00
	JUMLAH	381.745.654.922,00	91.710.741.502,00

Transaksi Antar Entitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp379.171.636.461,00 merupakan Pendapatan yang berasal dari Belanja Modal yang bersumber dari



pendanaan Rupiah Murni (RM) pendapatan dari APBN terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017 (Audited) (Rp)
1.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Peralatan dan mesin	0,00
2.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	49.190.000,00
3.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Gedung dan Bangunan	121.259.250.984,00
4.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Gedung dan Bangunan	0,00
5.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Gedung dan Bangunan	70.113.950,00
6.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Jalan & Jembatan	222.687.407,00
7.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan & Jembatan	105.420.000,00
8.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Perjalanan Jalan & Jembatan	134.297.144.150,00
9.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Irigasi	122.565.640.781,00
10.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	540.629.189,00
11.	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Perjalanan Irigasi	61.560.000,00
	JUMLAH	379.171.636.461,00

- Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp723.644.039,00 merupakan Penyetoran PNBPN ke Kas Negara (BUN) yang diperoleh oleh BP Batam antara lain Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN sebesar Rp644.796.000,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp78.848.039,00;
- Transfer Masuk sebesar Rp3.297.662.500,00 merupakan transfer masuk Peralatan dan Mesin dari Kementerian Perindustrian kepada Badan Pengusahaan Batam dengan nilai buku sebesar Rp3.297.662.500,00 sesuai Berita Acara nomor 659/ILMATE/11/2016 dan 303/KA/11/2016 tanggal 4 November 2016.

Ekuitas Akhir F.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp26.951.507.926.788,00 dan Rp26.724.968.288.234,00. Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2017 merupakan penambahan Ekuitas Awal



sebesar Rp26.724.968.288.234,00, Defisit Berjalan sebesar Rp251.176.325.475,00 dan koreksi yang menambah sebesar Rp95.970.309.106,00 (yang terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp150.863.528.172,00, dan dikurang koreksi lain-lain sebesar Rp54.893.219.065,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp381.745.654.922,00.



G. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

G.1 IKATAN DAN KONTIJENSI

- a. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam dan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan perjanjian kerjasama Nomor:129/SPJ/KA/12/2015 dan Nomor: 212.SJ.U.12.15 tentang Pengelolaan Dana Uang Penghargaan Pengabdian Badan Pengusahaan Batam dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan seluruh peserta berakhir masa kepesertaannya.

Program Asuransi ini adalah program manfaat pasti dengan besaran mengacu pada faktor Uang Penghargaan Pengabdian Pegawai Badan Pengusahaan Batam. jika Tertanggung/Peserta hidup pada akhir masa asuransi atau meninggal dunia dalam masa asuransi.

Pada Pasal 6 perjanjian dimaksud disepakati bahwa pembayaran premi oleh Badan Pengusahaan Batam adalah sebesar Rp413.773.431.972,00 dengan skema pembayaran sebagai berikut:

No	Tahapan ke	Prosentase Pembayaran Premi	Besar Pembayaran (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
1	I	5%	20.688.671.599,00	30 Januari 2016
2	II	55%	227.575.387.585,00	10 April 2016
3	III	40%	165.509.372.789,00	10 April 2017

Pada Tahun 2017, telah dibayarkan premi tahap ke III sebesar Rp163.981.515.419,00 Nomor B/K 2017/08/3906 tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Dana Uang Penghargaan Pengabdian Badan Pengusahaan Batam Nomor 1153/KA/8/2017 dan 127.SJ.U.0817 tanggal 14 Agustus 2017.

- b. Perjanjian Sewa Menyewa Tangki Timbun Kabil. Nomor 07/PERJ/KA/IV/2005 tanggal 27 April 2005 antara Otorita Batam dengan PT Patra Niaga. Jangka waktu perjanjian adalah 15 tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut. PT Patra Niaga wajib membayar kepada Otorita Batam Beban sewa sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) per tahun. Apabila terdapat surplus atau peningkatan pemakaian Tangki Timbun sehingga pemakaian Tangki melebihi volume 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) MT per tahun. maka atas kelebihan tersebut



Otorita Batam berhak atas insentif sebesar US 1.20 (USD satu poin dua puluh sen) per MT. Pembayaran sewa akan dibayarkan dimuka setiap 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran atas insentif akan dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah tutup buku dan dilaksanakannya audit oleh Kantor Akuntan Publik.

PT Patra Niaga juga wajib menyerahkan Jaminan Kinerja kepada Otorita Batam sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). yang akan dikembalikan pada saat perjanjian berakhir.

- c. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil. Nomor 05/PERJ.KA/IV/2004 tanggal 22 April 2004 antara Otorita Batam dengan PT Semblog Citranusa. Jangka waktu perjanjian adalah 25 (dua puluh lima tahun).

Berdasarkan perjanjian tersebut PT Semblog Citranusa wajib melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam waktu 2 (dua) tahun. Setelah pembangunan selesai dilaksanakan. PT Semblog Citranusa berhak melaksanakan kegiatan operasional. sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengoperasian Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil
- 2) Pemasaran kegiatan dan jasa Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil
- 3) Penyediaan, pengoperasian, bongkar muat alat-alat penunjang perminyakan
- 4) Bongkar muat
- 5) Kegiatan operasional

PT Semblog Citranusa juga diperkenankan melakukan usaha kegiatan penunjang lainnya. Pembagian pendapatan yang diperoleh selama Penyelenggaraan Pelabuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa Labuh, sepenuhnya menjadi hak Otorita Batam
- 2) Jasa Tambat. masing-masing pihak menerima 50% dari pendapatan
- 3) Jasa Dermaga, Otorita Batam menerima 10% dari pendapatan
- 4) Pendapatan lain-lain, Otorita Batam menerima 10% dari pendapatan

Selama 3 (tiga) tahun sejak perjanjian ditandatangani. PT Semblog Citranusa berhak atas 100% (seratus persen) dari pendapatan Jasa Dermaga dan Pendapatan Lain-lain. sedangkan untuk tahun keempat dan seterusnya berlaku ketentuan seperti tersebut di atas.

- d. Perjanjian Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Centre Nomor



04/PERJ.KA/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002 dan terakhir diperbaharui Nomor 118/SPJ/KA/12/2011.014/BCP.KSO/Add.II/2011 tanggal 30 Desember 2011 antara Otorita Batam dengan PT Sinergy Tharada. Jangka waktu perjanjian 15 tahun sejak perjanjian ditandatangani menjadi 22 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Berdasarkan perjanjian tersebut. Otorita Batam wajib menyerahkan pengelolaan aset.

PT Sinergy Tharada berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan baik dan mengacu kepada standar internasional pengelolaan terminal ferry.

PT Sinergy Tharada juga wajib menyerahkan laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan. Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang ditunjuk bersama.

Badan Pengusahaan Batam berhak memperoleh royalty dari gross revenue yang besarnya ditetapkan secara progressif sebagai berikut:

<u>Gross revenue per tahun</u>	<u>%</u>
a. Sampai dengan Rp15.000.000.000,00	10
b. Rp15.000.000.001,00 . Rp20.000.000.000,00	20
c. Lebih dari Rp20.000.000.000,00	30

- e. Perjanjian Konsesi Nomor 009/UM.PERJ/IV/95 tanggal 17 April 1995 tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam antara Otorita Batam dengan Konsorsium yang terdiri dari Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun.

Otorita Batam berkewajiban untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan oleh Perusahaan Konsesi, memberikan izin dan atau membantu perolehan izin yang diperlukan oleh Perusahaan Konsesi dari instansi/badan pemerintah lainnya untuk mengambil dan menggunakan air baku dari waduk.

Kewajiban Perusahaan Konsorsium antara lain:

- Rehabilitasi atas fasilitas lama
- Pengadaan failitas baru dan kelengkapannya
- Menyalurkan air bersih kepada konsumen, yang jika jumlah maupun mutu tidak tercapai maka Perusahaan Konsesi akan dikenakan sanksi
- Menyerahkan kepada Otorita batam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar.



Berdasarkan perjanjian tersebut. Otorita Batam berhak atas:

- a. Pendapatan air baku
 - b. Pendapatan sewa. sehubungan dengan penggunaan fasilitas lama oleh Perusahaan Konsorsium
 - c. Royalti sebesar 15 (lima belas persen) dari divden yang dibagikan kepada para pemegang saham Perusahaan Konsesi
- f. Perjanjian Kerjasama Nomor 1/PERJ.KA/I/2010 dan 010/IDC.OB/ADD/BOT.SKP/I/2010 Tanggal 11 Januari 2010 kerjasama Membangun, Mengelola dan Memelihara Terminal Ferry International Sekupang dengan mekanisme Bangun Serah Guna (BOT) antara OB Batam dengan PT. Indodharma Corpora. Jangka Waktu perjanjian adalah 28 tahun mulai 20 Agustus 2004 sampai dengan 19 Agustus 2032. Perjanjian ini merupakan perubahan perjanjian kerjasama Nomor 12/PERJ.KA/VIII/2004 dan 111/DC.OB/SP/BOT.SKP/VIII/2004 Tanggal 20 Agustus 2004

Berdasarkan perjanjian tersebut Otorita Batam menunjuk dan memberikan kuasa kepada PT Indodharma Corpora untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal baru. pengoperasian dan pemeliharaan terminal lama. membongkar terminal lama. pengoperasian dan pemeliharaan terminal Ferry Internasional Sekupang dan penyerahan kembali pada saat perjanjian berakhir, dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BOT).

PT Indodharma Corpora berkewajiban untuk, antara lain:

- 1) Membayar Beban konsesi
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh investasi dan realisasi Beban pekerjaan pembangunan Terminal Ferry Internasional Sekupang
- 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan baik dan mengacu standar internasional pengelolaan terminal ferry.
- 4) Menyerahkan laporan.laporan yang telah ditentukan antara lain:
 - Laporan hasil kinerja
 - Laporan keuangan tengah tahunan
 - Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan yang terdaftar.
- 5) Selambat.lambatnya 90 hari sejak saat berakhirnya perjanjian, menyerahkan kembali seluruh Barang Milik Negara berikut seluruh Komplek terminal Ferry Sekupang

Berdasarkan perjanjian tersebut. Pihak Pertama dalam hal ini adalah Badan Pengusahaan



Batam berhak atas royalti dari gross revenue yang besarnya ditetapkan secara progressive (memingkat) yang dihitung dan dibayar oleh Pihak Kedua terhitung sejak 1 Januari 2008 berdasarkan perhitungan berikut:

- a) Gross revenue sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah) setahun. besarnya Royalty adalah 10 (sepuluh Persen) dari Gross Revenue tersebut;
 - b) Gross revenue di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) setahun. maka selain hak atas penerimaan Royalty menurut perhitungan huruf (a) di atas. Pihak Pertama berhak atas tambahan Royalty sebesar 20 (dua puluh persen) dari nilai kenaikan Gross Revenue di atas angka Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut;
 - c) Gross Revenue di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar rupiah) setahun. maka selain hak atas penerimaan Royalty menurut perhitungan huruf (a) dan huruf (b) di atas. Pihak Pertama berhak atas tambahan Royalty 30 (tiga puluh persen) dari nilai kenaikan Gross Revenue di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tersebut;
 - (d) Gross Revenue di atas Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun. maka selain hak di atas penerimaan Royalty menurut perhitungan huruf (a). (b). dan huruf (c) di atas. Pihak Pertama berhak atas tambahan Royalty sebesar 35 (tiga puluh lima persen) dari nilai kenaikan Gross Revenue di atas angka Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar) tersebut.
- g. Pada tanggal 12 Januari 2007 Otorita Batam mengadakan perjanjian Sewa Menyewa Fuel Distribution System (FDS) Avtur Kabil dengan PT Patra Niaga dengan surat perjanjian No. 01/PERJ-KA/I/2007. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya sepanjang tidak ada pengakhiran perjanjian sebelum waktunya.

Berdasarkan perjanjian tersebut Otorita Batam akan menyerahkan FDS dan berhak untuk mendapatkan pembayaran uang sewa sebesar Rp3.247.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). dengan mekanisme sebagai berikut:

- Uang muka sebesar 30% dari Beban sewa per tahun yang dibayarkan selambat.lambatnya 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani.
- Untuk sisa sewa akan dibayarkan 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian.
- Sisa dari Beban sewa per tahun setelah dikurangi uang muka dan sisa sewa akan



dibayarkan pada saat mulai beroperasinya FDS setelah rekondisi selambat.lambatnya 10 bulan setelah penandatanganan perjanjian.

- Untuk pembayaran Beban sewa tahun kedua dan seterusnya selama masa perjanjian akan dibayar dimuka setiap 3 bulan sekali sejumlah Rp811.750.000.00.

PT Patra Niaga wajib menyerahkan jaminan kepada Otorita Batam Rp811.750.000.00 yang berlaku selama 1 tahun dan diserahkan paling lambat 1 bulan sebelum periode pembayaran tahun kedua dan seterusnya.

Sampai dengan saat ini Perpanjangan perjanjian telah berakhir dan hak BP. Batam telah dipenuhi. Kemudian diterbitkan Berita Acara Kesepakatan Tarif Sewa Tangki Timbun Kabil dan Fuel Distribution System (FDS) Avtur Kabil dan Bandara Hang andim antara Badan Pengusahaan Batam dengan PT Pertamina Patra Niaga nomor 40/A4.2/11/2014 Nomor 032/PPN100.120/BA/2014 dengan kesimpulan adalah:

FDS Avtur Kabil dan BUBU Hang Nadim:

- | | |
|--|---------------------|
| - Sewa FDS Avtur Kabil dan Bandara HN
2012 s/d 2013 | Rp 7.362.034.160,40 |
| - Sewa FDS Avtur Kabil dan Bandara HN
2014 s/d 2015 | Rp 8.082.805.797,72 |
| - Sewa FDS Avtur Kabil dan Bandara HN
mulai2016 | Rp 8.896.274.988,47 |

Saat ini sampai dengan per 31 Desember 2017 Kontrak Perpanjangan antara PT. Patra Niaga dengan BUBU Hang Nadim masih dalam proses.

- h. Berdasarkan Kesepakatan Standar Pelayanan (*Serviced Level Agreement/SLA*) Pengoperasian Kapal Tunda Di Pelabuhan Batam. Nomor 04/PER.PL/04/2010 / Nomor 068/KS/ADM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang kemudian diubah dengan Kesepakatan Nomor 08/PERJ.PL/9/2010 / Nomor 032/KS.PL/IX/2010 tanggal 1 September 2010. Otorita Batam mengadakan kerjasama dengan PT Pelayaran Kurnia Samudra untuk menyediakan fasilitas pelayanan jasa tunda (dengan pengoperasian kapal tunda TB. Putra I) untuk dioperasikan di Pelabuhan Batu Ampar. Jangka waktu perjanjian adalah 2 (dua) tahun sampai dengan 28 April 2012 dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan perjanjian tersebut PT Pelayaran Kurnia Samudra wajib menyediakan kapal tunda yang layak. dibuktikan dengan sertifikat.sertifikat yang sah dan masih berlaku.

Berdasarkan Kesepakatan awal (tanggal 30 April 2010). masing-masing pihak berhak atas



pendapatan dari Jasa Tunda dengan pembagian. Pihak Otorita Batam mendapatkan 20% dari Gross Revenue

Perpanjangan Kesepakatan Standar Pelayanan (*Service Level Agreement/SLA*) Pengoperasian Kapal Tunda TB. Putra I di Pelabuhan Batam atas Perjanjian Nomor 04/PERJ.PL/04/2010 dan Nomor 068/KS/ADM/IV/2010 dengan Nomor 11/SPJ/A1.2/4/2012 dan Nomor 272/KS.ADM/IV/2012 antara Heri Kafianto yang menjabat Kepala Bidang Komersil Kantor Pelabuhan Laut yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam dengan Syahrul yang menjabat Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pelayaran Kurnia Samudra. Jangka Waktu 3 (tiga) Tahun sesuai Surat Ijin Operasi yang diberikan yaitu Surat Ijin Operasi TB. Putra Nomor PP.309/1/1Kpl.Btm.12 tanggal 27 April 2012.

Otorita Batam berhak memperoleh royalty dari gross revenue yang besarnya ditetapkan secara progressif sebagai berikut:

<u>Gross revenue sebulan</u>	<u>%</u>
a. Sampai dengan USD 30.000	10
b. Lebih dari USD 30.000 sampai dengan USD 50.000	15
c. Lebih dari USD 50.000	20

Peraturan tersebut diatas mengalami perubahan pertama Perjanjian Kerjasama Nomor 65/SPJ/A3.2/04/2015 dan 028/PKS/ADM/IV/2015 tanggal 7 September 2015 yang berisi perubahan kesepakatan pasal 6 tentang dasar pengenaan tarif dan administrasi pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian berakhir sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
- b. Penerimaan atas pungutan jasa. Badan Pengusahaan Batam memperoleh hak sebesar 20% dan PT. Pelayaran Kurnia Samudra memperoleh hak sebesar 80%;
- c. Perhitungan tarif kegiatan yang menggunakan mata uang asing disesuaikan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Dasar perhitungan tarif rupiah adalah tariff yang berlaku dikalikan dengan kurs saat kegiatan selesai dilaksanakan;
 2. Kurs yang digunakan adalah kurs jual penutupan Bank Indonesia satu hari sebelum kegiatan selesai.



- i. Pada tanggal 1 April 2011. dilakukan kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam dengan Politeknik Negeri Batam dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 24/SPJ.Ang.4/4/2011 dan Nomor 143/MOU.POLBAT/IV/2011 Jangka waktu perjanjian kerjasama tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2017 (perjanjian ini telah berakhir). tentang Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Pada Politeknik Negeri Batam. Perjanjian tersebut merupakan perpanjangan dari Kesepakatan Bersama Nomor 27/PERJ.KA BP/12/2010 / Nomor 02/BP.YPB/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Kerjasama Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Politeknik Batam yang telah berakhir terhitung tanggal 31 Desember 2010.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk terus mensinergikan fungsi dan peranan masing-masing lembaga secara efektif dan efisien guna mendukung upaya program peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Pulau Batam.

Pembebanan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama menjadi beban dan tanggungjawab Para Pihak dengan mengacu kepada mekanisme penganggaran yang berlaku. Badan Pengusahaan Batam dapat memberikan pemBebanan yang diperlukan Politeknik Negeri Batam dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan ketersediaan Badan Pengusahaan Batam serta peraturan perundang.undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan.

Pendapatan sewa atas pemanfaatan sarana dan prasarana milik Badan Pengusahaan Batam yang terletak di lingkungan Politeknik Negeri Batam kepada Pihak Ketiga/Penyewa disetorkan ke rekening Badan Pengusahaan Batam. Pendapatan tersebut dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam cq Kepala Biro Keuangan dan Biro Umum.

Badan Pengusahaan Batam dapat melakukan audit operasional pelaksanaan Perjanjian Kerjasama paling sedikit satu (1) kali pada tiap tahun anggaran. YPB cq Direktur Politeknik Batam wajib menyampaikan Laporan Bulanan Penerimaan dan Penggunaan Kas/Bank Politeknik Batam dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui kepada Badan Pengusahaan Batam paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pihak Pertama dapat melakukan Audit Operasional paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun.

- j. Perjanjian kerja sama No. 18/PERJ-PL/6/2011-38/SMP/6/2011 tanggal 6 juni 2011 tentang



kerjasama pengelolaan Fasilitas Buoy Tambat di perairan Batu Ampar antara Bp Batam dengan PT. Snepac Multiperkasa. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun mulai 3 juni 2011 sampai dengan tanggal 02 mei 2016. Dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 1535/SPJ/A3/12/2017 dengan jangka waktu 3 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Atas pendapatan kegiatan kapal tongkang yang tambat di Buoy tambat tersebut, Bp. Batam akan memperoleh 30%, sedangkan PT. Snepac Multipekara akan memperoleh 70%. Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan dalam mata uang rupiah, perhitungan tarif kegiatan yang menggunakan mata uang asing agar disesuaikan dengan menggunakan mata uang rupiah.

- k. Perjanjian kerjasama Nomor 22/PERJ.PL/10/2011 dan Nomor 032/GS.OPS/X/2011 antara Otorita Batam yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelabuhan Laut Otorita Batam dengan PT. Gemalindo Shipping Tanggal 3 Oktober 2011 Tentang perubahan ketiga Kesepakatan Standar Pelayanan (*Service Level Agreement / SLA*) Pelayanan Jasa Penundaan di Pelabuhan Batam yang sebelumnya para pihak pada tanggal 1 April 2010 telah mengikatkan diri kedalam kesepakatan Standar Pelayanan (*Service Agreement/SLA*) PelayananJasa Penundaan di Pelabuhan Batam Nomor 03A/PERJ.PL/4/2010 dan Nomor 013/gs.ops/iv/2010. Kesepakatan tersebut berakhir pada tanggal 1 Oktober 2010. dan perjanjian ini telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir nomor 78/SPJ/A3.2/05/2015 dan 20/GS.Dir/V/2015 tanggal 28 Mei 2015. Jangka waktu perjanjian ini adalah 6 (enam) tahun terhitung tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021.
- l. Perjanjian Kerjasama Nomor: 213/SPJ/A1/10/2012 dan Nomor 012/DIR.BDP/X/2012 antara Anggota 1/Deputi Bidang Pengusahaan Saranan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bertindal untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan **PT. Bias Delta Pratama** tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemanduan di perairan Wajib Pandu pada perairan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Jangka waktu perjanjian 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Diperpanjang melalui perjanjian dengan Nomor 1262/SPJ/A3/9/2017 – 0068/BDP-DIR/X/2017 pada tanggal 8 September 2017 dengan jangka waktu tanggal 11 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2017

- a. Evaluasi pada 1 (satu) tahun pertama;



- b. Peninjauan dan evaluasi dilakukan setiap 2 (dua) tahun, dengan ketentuan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa peninjauan berakhir. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama akan mengadakan kajian tentang pelaksanaan pemanduan pada perairan Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk pelaksanaan selanjutnya.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan jasa pemanduan guna menjamin keselamatan pelayaran dan ketertiban, serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu kelas II Tanjung Uncang, Batam dan untuk memenuhi tersedianya sarana dan prasarana pemanduan, tenaga pandu serta untuk dapat saling memberikan kontribusi kepada Para Pihak.

Persentase pembagian atas *gross revenue* adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengusahaan Batam adalah sebesar 1.75 (satu koma tujuh lima persen) dari *gross revenue*;
- b. Pendapatan yang merupakan hak **PT. Dias Delta Pratama** adalah sebesar 78.6 (tujuh puluh delapan koma enam persen) dari *gross revenue* dan digunakan untuk Beban operasional gaji karyawan, dan Beban lain-lain serta keuntungan **PT. Dias Delta Pratama**.
- m. Perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2012 – 156/SPJ/KA/7/2012 Tanggal 18 Juli 2012 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bertindak untuk dan atas nama kantor Pelabuhan Laut dengan PT. Citra Tritunas Tentang Kerjasama Pengelolaan Terminal Penumpang Harbour Bay. Di addendum pada tanggal 31 Juli 2013 dengan Perjanjian No.453/SPJ/KA/7/2013-015/CT/HB/TERMINAL/VII/2013. Masa berlaku perjanjian akan berakhir pada saat berakhirnya masa berlaku Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Badan Pengusahaan Batam berhak atas pendapatan dengan pembagian sebagai berikut.

- 1) Sebesar 100 dari pendapatan jasa labuh dan sebesar 50 dari pendapatan jasa tambat.
- 2) Royalti Pass Penumpang

<u>Tahun</u>	<u>Royalti</u>
Tahun ke 0 s.d tahun ke.5	10 <i>revenue</i> pass penumpang
Tahun ke. 6 s.d tahun ke.10	15 <i>revenue</i> pass penumpang
Tahun ke. 11 s.d seterusnya	20 <i>revenue</i> pass penumpang

- n. Pada tanggal 5 Mei 2017, BP Batam melalui BUBU Hang Nadim mengadakan Berita Acara Kesepakatan dengan PT. Gemalindo Air Support sebagai pengganti sementara selama



Perjanjian Kerjasama dalam proses pembuatan TMT 01 Januari 2017. Mengenai Pendapatan dan Bagi hasil ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pihak Pertama menerima Royalty untuk GSE sebesar 4% dan Konsesi Fee Pendapatan 5%;
 - Tarif Shelter Sementara ditetapkan sebesar Rp58,000/m² sesuai tariff pergudangan berdasarkan Perka nomor 18 tahun 2016;
 - Apabila tarif yang ditetapkan dari hasil penilaian DJKN Kanwil Riau lebih rendah maka akan dilakukan penagihan kurang tagih dan apabila tariff yang ditagihkan lebih tinggi maka akan dilakukan konversi pada penagihan periode berikutnya.
- o Perjanjian Konsesi No. 009/UM-PERJ/IV/95 tanggal 17 April 1995 tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam antara Otorita Batam dengan Konsorsium yang terdiri dari Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang, pada tahun 2010 dilakukan amandemen perubahan nomor 3/PERJ-KA/3/2010 dan terjadi perubahan kepemilikan pemegang saham menjadi Sembcorp Utilities (Netherlands) N.V dan PT. Bangun Cipta Kontraktor. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dan berakhir pada 14 Nopember 2020.

Kewajiban Perusahaan Konsorsium antara lain:

- a. Rehabilitasi atas fasilitas lama
- b. Pengadaan failitas baru dan kelengkapannya
- c. Menyalurkan air bersih kepada konsumen, yang jika jumlah maupun mutu tidak tercapai maka Perusahaan Konsesi akan dikenakan sanksi
- d. Menyerahkan kepada Otorita batam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar

Berdasarkan perjanjian tersebut, Otorita Batam berhak atas:

- a. Pendapatan air baku
 - b. Pendapatan sewa, sehubungan dengan penggunaan fasilitas lama oleh Perusahaan Konsorsium
 - c. Royalti sebesar 15% (lima belas persen) dari total deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham Perusahaan Konsesi.
- p. Badan Pengusahaan Batam pada tahun 2015 mendapatkan Pinjaman Luar Negeri dari Pemerintah Korea dengan pagu sebesar Rp123.555.600.000,00 yang digunakan untuk



pembangunan saluran air limbah di pulau Batam.

Proyek Pengembangan saluran air limbah di Pulau Batam dilaksanakan selama 39 Bulan dimana untuk Kontrak konsultan DED Dan Supervisi di tanda tangani Pada Tanggal 19 Desember 2014 dengan nilai Kontrak Sebesar US\$ 3.847.077,49 dimana untuk kegiatan Desain Rinci sebesar US\$ 2.247.530,47 dan Supervisi US\$ 1.599.547,02. Dimana pada Tahun Anggaran 2015 BP Batam dapat alokasi dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp123.555.600.000,00 dari pagu tersebut terealisasi sebagai berikut :

1. Uang Muka US\$ 769.415 Kurs 12.605,63 Ekuivalen Rupiah	(Rp9.698.957.653,00)
2. Termin I US\$ 359.604.87 Kurs 12.908,33 Ekuivalen Rupiah	(Rp4.641.899.591,00)
3. Termin II US\$ 359.604.87 Kurs 12.897,52 Ekuivalen Rupiah	(Rp4.638.012.022,00)
4. Termin III US\$ 539.407.32 Kurs 12.897,52 Ekuivalen Rupiah	(Rp6.957.018.033,00)
5. Termin IV US\$ 529.407.33 Kurs 12.865,09 Ekuivalen Rupiah	<u>(Rp6.810.872.775,00)</u>
Total	Rp32.746.760.074,00

Dimana dari pagu Anggaran 2015 sebesar Rp123.555.600.000,00 terealisasi selama Tahun 2015 sebesar Rp32.746.760.074,00 sisa Rp90.808.839.926,00, tersisanya anggaran tersebut disebabkan belum terlaksananya kontrak/gagal kontrak untuk kegiatan fisik proyek pengembangan system saluran air limbah di Pulau Batam.

Pada Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan tersebut diatas terealisasi sebagai berikut:

1. Termin V US\$ 127.963,76 Kurs 13.729,97 Ekuivalen Rupiah	(Rp1.756.938.447,00)
2. Termin VI US\$ 127.963,76 Kurs 13.729,97 Ekuivalen Rupiah	<u>(Rp1.756.938.447,00)</u>
Total	Rp3.513.876.894,00

- q. Perjanjian Nomor 21/SPJ/KA/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993 tentang Pengalokasian Tanah untuk keperluan Pembangunan. Pengelolaan. Penyerahan kembali (Build. Operate & Transfer) Tanah dan Terminal Ferry Penumpang di Nongsa antara Otorita Batam dengan PT. Nongsa Terminal Bahari. Adapun perjanjian tersebut berlaku selama 30 tahun sampai tanggal 9 Juni 2023.

Berdasarkan perjanjian tersebut Kewajiban dan Hak PT. Nongsa Terminal Bahari adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib membangun Terminal Ferry Penumpang di atas tanah mentah atas bagian.bagian tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam mulai tanggal efektif diterimanya Surat Izin membangun dari Otorita Batam
- 2) Terhitung sejak tanggal efektif diterimanya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)



dari Otorita Batam sampai dengan tanggal penyerahan kembali tanah & Terminal Ferry Penumpang. PT. Nongsa Terminal Bahari berhak untuk menjaminkan/menggunakan sebagai anggunan hak.hak yang timbul dari perjanjian ini kepada Bank/Lembaga Keuangan dan Penyandang dana tersebut diizinkan untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai penerima Hak.hak tersebut dengan syarat bahwa pihak yang akan ditunjuk akan tunduk pada syarat dan ketentuan.ketentuan dalam perjanjian ini.

- 3) Otorita Batam memberikan hak tunggal kepada PT. Nongsa Terminal Bahari untuk mengelola Terminal Ferry Penumpang beserta fasilitas penunjangnya untuk Wilayah Pantai Timur Sub Wilayah Nongsa sejak tanggal selesai pembangunan sampai dengan tanggal penyerahan kembali tanah dan terminal Ferry Penumpang.
- 4) Selama Jangka waktu mengelola. Otorita Batam setuju untuk memberi hak tunggal kepada PT. Nongsa Terminal Bahari untuk menguasai, mengelola, menempati, menggunakan dan menyewakan Tanah dan Terminal Ferry Penumpang serta Fasilitas lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya, menurut harga dan syarat yang dianggap baik oleh PT. Nongsa Terminal Bahari dan menerima seluruh penghasilan apapun dari penyewa dan atau pengelolaan tersebut.
- 5) PT. Nongsa Terminal Bahari wajib membayar :
 - a. Biaya Perawatan dan perbaikan Terminal Ferry Penumpang
 - b. Biaya pemakaian semua fasilitas antara lain listrik. Air segala jenis dan bentuk pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah.
- 6) PT. Nongsa Terminal Bahari berhak menarik semua punggutan antara lain berupa Terminal Fee yaitu Pass Penumpang untuk tujuan luar negeri dan menyewakan ruangan serta fasilitas dalam arti yang menyangkut aktivitas pelabuhan .
- 7) PT. Nongsa Terminal Bahari berhak sepenuhnya untuk memiliki hasil punggutan lainnya yang diperoleh dari pengelolaan Terminal Ferry Penumpang selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini. Kecuali uang Labuh Tambat adalah menjadi hak Otorita Batam.
- 8) PT. Nongsa Terminal Bahari Bertanggung jawab atas biaya Pemeliharaan Terminal Ferry Penumpang serta pengerukan alur pelayaran mulai dari muara sungai Nongsa sampai di Terminal sehingga alur pelayaran tersebut dapat dilayari oleh Ferry/ kapal.kapal dengan 178ancer dan aman.
- 9) PT. Nongsa Terminal Bahari menjamin agar selama perjanjian berlaku Pihak Kedua wajib tetap terikat dan menjalankan kewajiban.kewajibannya berdasarkan



perjanjian ini dengan baik. Meskipun terjadi perubahan/ penggantian pengurus, anggaran dasar atau struktur pemilikan saham dan PT. Nongsa Terminal Bahari wajib segera memberitahukan secara tertulis setiap perubahan / penggantian demikian kepada Otorita Batam.

Sedangkan Hak & Kewajiban Otorita Batam adalah :

- 1) Otorita Batam Wajib untuk mengusahakan didapatkannya dan atau mengeluarkannya semua izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dan disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Terminal Ferry Penumpang.
- 2) Otorita Batam Bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan rambu.rambu navigasi dan pengerukan alur pelayaran yang berada di luar muara sungai Nongsa (dilaut).
- 3) Otorita Batam Wajib tetap terikat dan menjalankan kewajiban.kewajiban berdasarkan perjanjian dengan baik. Dan apabila ternyata terjadi perubahan pejabat atau susunan organisasi Otorita Batam yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini. Otorita Batam wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT. Nongsa Terminal Bahari.
- 4) Otorita Batam mengkoordinir dan menjamin agar pelaksanaan dari perjanjian ini memperoleh dukungan dari instansi Pemerintah terkait. Termasuk dan tidak terbatas pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Departemen Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Departemen Kehakiman. Direktorat Jenderal Imigrasi. Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.
- 5) Otorita Batam membantu secara layak PT. Nongsa Terminal Bahari atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh PT. Nongsa Terminal Bahari dalam pengurusan perizinan atau penyelesaian surat-surat yang diperlukan oleh Instansi yang berwenang yang berhubungan dengan tanah dan pembangunan Terminal Ferry Penumpang.



G.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, telah dilakukan Revaluasi terhadap seluruh objek revaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Revaluasi atas Tanah dilaksanakan pada Semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp21.369.935.025.133,00 yang terdapat pada:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Hasil Revaluasi pada UPKPB Lahan sesuai dengan BA nomor: BAR-IP-77/WKN.03/KNL.04/2017; BAR-IP78/WKN.03/KNL.04/2017; BAR-IP-79/WKN.03/KNL.04/2017; BAR-IP-80/WKN.03/KNL.04/2017; BAR-IP82/WKN.03/KNL.04/2017; BAR-IP-83/WKN.03/KNL.04/2017;	21.271.711.249.133,00
b.	Hasil Revaluasi pada UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan Berita Acara Nomor: BAR-IP-147/WKN.03/KNL.04/2017.	98.223.776.000,00
	Jumlah	21.369.935.025.133,00

2. Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada Semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp4.664.385.947.824,00 yang terdapat pada:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Biro Umum sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-126/WKN.03/KNL.04/2017;	4.846.140.354.948,00
b.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Direktorat Pengamanan sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-100/WKN.03/KNL.04/2017;	8.959.019.535,00
c.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-155/WKN.03/KNL.04/2017;	537.695.366,00
d.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Rumah Sakit sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-121/WKN.03/KNL.04/2017;	29.731.973.861,00
e.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-116/WKN.03/KNL.04/2017;	6.205.250.064,00
f.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-147/WKN.03/KNL.04/2017;	926.331.060,00
g.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Bandara sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-113/WKN.03/KNL.04/2017;	(57.176.630.596,00)
h.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Kantor Pelabuhan Laut sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-112/WKN.03/KNL.04/2017.	(3.281.438.991,00)
i.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Biro Umum sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-126/WKN.03/KNL.04/2017;	(88.466.002.836,00)
j.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Direktorat Pengamanan sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-100/WKN.03/KNL.04/2017;	(805.067.478,00)



No	Uraian	Jumlah (Rp)
k.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan BAR IP nomor: BAR -IP-155/WKN.03/KNL.04/2017;	(103.907.366,00)
l.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Rumah Sakit sesuai dengan BAR IP nomor: BAR -IP-121/WKN.03/KNL.04/2017;	(7.341.780.308,00)
m.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Bandara sesuai dengan BAR IP nomor: BAR -IP-113/WKN.03/KNL.04/2017;	(39.513.067.544,00)
n.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Kantor Pelabuhan Laut sesuai dengan BAR IP nomor: BAR -IP-112/WKN.03/KNL.04/2017;	(6.661.936.328,00)
o.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-116/WKN.03/KNL.04/2017;	(5.494.869.530,00)
p.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BAR IP nomor: BAR -IP-147/WKN.03/KNL.04/2017.	(1.348.371.060,00)
q.	Koreksi Gedung dan Bangunan berdasarkan surat Ditjen. Perbendaharaan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018 perihal penyampaian nilai koreksi atas hasil revaluasi BMN Tahun 2017	(17.921.604.973,00)
	Jumlah	4.664.385.947.824,00

3. Revaluasi atas Jalan, Jaringan dan Irigasi dilaksanakan pada Semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp2.456.582.417.215,00 yang terdapat pada:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Biro Umum sesuai dengan BAR IP nomor: BAR -IP-126/WKN.03/KNL.04/2017;	(1.648.976.994,00)
b.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan BAR IP nomor: BAR -IP-155/WKN.03/KNL.04/2017;	(44.156.257.360,00)
c.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Bandara sesuai dengan BAR IP nomor: BAR -IP-113/WKN.03/KNL.04/2017;	(17.195.408.787,00)
d.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-116/WKN.03/KNL.04/2017;	(867.880.244.583,00)
e.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Kantor Pelabuhan Laut sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-112/WKN.03/KNL.04/2017;	(1.105.112.709,00)
f.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Direktorat Pengamanan sesuai dengan BAR IP nomor: BAR -IP-100/WKN.03/KNL.04/2017;	66.161.092,00
g.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Rumah Sakit sesuai dengan BAR IP nomor: BAR -IP-121/WKN.03/KNL.04/2017;	742.247.424,00
h.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-147/WKN.03/KNL.04/2017.	76.294.620,00
i.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-155/WKN.03/KNL.04/2017;	82.964.956.022,00
j.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Kantor Pelabuhan Laut sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-112/WKN.03/KNL.04/2017;	415.735.448.869,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
k.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Biro Umum sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-126/WKN.03/KNL.04/2017;	(10.336.675.600,00)
l.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Direktorat Pengamanan sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-100/WKN.03/KNL.04/2017;	(143.153.000,00)
m.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Rumah Sakit sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-121/WKN.03/KNL.04/2017;	(244.910.000,00)
n.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Bandara sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-113/WKN.03/KNL.04/2017;	(402.847.715.203,00)
O.	Hasil revaluasi Pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-116/WKN.03/KNL.04/2017.	(5.581.307.619,00)
p.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Biro Umum sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-126/WKN.03/KNL.04/2017;	9.104.325.375,00
q.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Direktorat Pengamanan sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-100/WKN.03/KNL.04/2017;	51.649.908,00
r.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-155/WKN.03/KNL.04/2017;	2.139.843.390.132,00
s.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-116/WKN.03/KNL.04/2017;	150.562.591.549,00
t.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB RSBP sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-121/WKN.03/KNL.04/2017;	402.633.076,00
u.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB BUBU Hang Nadim sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-113/WKN.03/KNL.04/2017;	752.383.593.997,00
t.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi Pada UPKPB Kantor Pelabuhan Laut sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-112/WKN.03/KNL.04/2017;	261.116.358.610,00
u.	Transaksi yang mengurangi Akumulasi Penyusutan terhadap Objek Revaluasi UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BAR IP nomor: BAR-IP-147/WKN.03/KNL.04/2017.	46.304.380,00
v.	Koreksi Jalan dan Jembatan berdasarkan surat Ditjen. Perbendaharaan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018 perihal penyampaian nilai koreksi atas hasil revaluasi BMN Tahun 2017	(5.667.397.299,00)
w.	Koreksi Irigasi berdasarkan surat Ditjen. Perbendaharaan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018 perihal penyampaian nilai koreksi atas hasil revaluasi BMN Tahun 2017	293.621.315,00
	Jumlah	2.456.582.417.215,00

Hasil revaluasi diatas merupakan hasil revaluasi yang telah dilakukan pada LBMN dan masing-masing UPKPB sedangkan pada tingkat K/L hasil revaluasi tersebut di eliminasi, penyajian atas hasil revaluasi ditunda sampai dengan tahun 2018. Hasil revaluasi akan disajikan pada Laporan Keuangan setelah seluruh objek revaluasi di seluruh K/L Pemerintah Pusat selesai dinilai kembali.



LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

BAGIAN ANGGARAN 112

(AUDITED)

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO.1, BATAM CENTRE - PULAU BATAM
KEPULAUAN RIAU 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456
WEBSITE : <http://www.bpmatam.go.id>